



# LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS  
TAHUN 2022



Tim Pengendalian Inflasi Pusat  
(TPIP)





---

# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2022

---

TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT  
(TPIP)

# Daftar Isi

Bab I	<b>Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2022</b>	16
1.1	Inflasi Inti	20
1.2	Inflasi <i>Volatile Food</i> (VF)	22
1.3	Inflasi <i>Administered Prices</i> (AP)	23
1.4	Inflasi Regional	24

Bab II	<b>Kebijakan Pengendalian Inflasi</b>	26
2.1	Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2022	28
2.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	28
2.1.2	Kebijakan Fiskal	29
2.1.3	Kebijakan Pangan	31
2.1.4	Kebijakan Energi	34
2.1.5	Kebijakan Konektivitas	38
2.1.6	Kebijakan Ketenagakerjaan	40
2.2	Program Kerja TPIP 2022	41
2.2.1	Keterjangkauan Harga	41
2.2.2	Ketersediaan Pasokan	45
2.2.3	Kelancaran Distribusi	54
2.2.4	Komunikasi Efektif	57



Bab III **Prakiraan Inflasi 2023**

62

Bab IV **Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023**

68

4.1	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023	70
4.1.1	Kebijakan Bank Indonesia	70
4.1.2	Kebijakan Fiskal	71
4.1.3	Kebijakan Pangan	72
4.1.4	Kebijakan Energi	72
4.1.5	Kebijakan Konektivitas	73
4.1.6	Kebijakan Ketenagakerjaan	73
4.2	Program Kerja TPIP 2023	74
4.2.1	Keterjangkauan Harga	74
4.2.2	Ketersediaan Pasokan	76
4.2.3	Kelancaran Distribusi	80
4.2.4	Komunikasi Efektif	81



## Daftar Grafik

<b>Grafik 1.1</b>	Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi	<b>18</b>	<b>Grafik 1.9</b>	Perkembangan Penjualan Eceran	<b>22</b>
<b>Grafik 1.2</b>	Inflasi Inti (% yoy)	<b>20</b>	<b>Grafik 1.10</b>	Perkembangan Inflasi AP	<b>23</b>
<b>Grafik 1.3</b>	PDB dan <i>Output Gap</i>	<b>20</b>	<b>Grafik 1.11</b>	Perkembangan Inflasi Sub Kelompok Terkait Inflasi AP	<b>24</b>
<b>Grafik 1.4</b>	Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i> (rerata yoy)	<b>20</b>	<b>Grafik 2.1</b>	Perbandingan Inflasi Bulanan pada Masa Penyesuaian Harga BBM	<b>36</b>
<b>Grafik 1.5</b>	Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i> (akhir periode yoy)	<b>21</b>	<b>Grafik 2.2</b>	Penyaluran KPSH Bulanan Tahun 2020 – 2022	<b>42</b>
<b>Grafik 1.6</b>	Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (yoy)	<b>21</b>	<b>Grafik 2.3</b>	Tingkat Partisipasi TPID Dalam TPID Award 2022	<b>59</b>
<b>Grafik 1.7</b>	Inflasi VF, Inflasi Inti dan IHIM Pangan	<b>22</b>	<b>Grafik 3.1</b>	Proyeksi Harga Komoditas Global	<b>64</b>
<b>Grafik 1.8</b>	Perkembangan Inflasi <i>Volatile Food</i>	<b>22</b>	<b>Grafik 3.2</b>	Ekspektasi Inflasi	<b>65</b>

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1</b>	Inflasi Gabungan Kota IHK	<b>19</b>	<b>Gambar 2.3</b>	Capaian Kinerja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas	<b>56</b>
<b>Gambar 2.1</b>	Program Tol Laut Dan Jembatan Udara dalam Upaya Penurunan Disparitas Harga	<b>39</b>	<b>Gambar 2.4</b>	Penyusunan Peta Jalan TPID	<b>58</b>
<b>Gambar 2.2</b>	Peta Sebaran Jembatan Udara Tahun Anggaran 2022	<b>56</b>	<b>Gambar 2.5</b>	Tingkat Partisipasi TPID dalam TPID Award 2022	<b>59</b>
			<b>Gambar 4.1</b>	Kronologis Persiapan Implementasi B35	<b>78</b>

## Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1</b>	Dukungan Kebijakan Fiskal dalam Pengendalian Inflasi 2022	<b>30</b>	<b>Tabel 2.7</b>	Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Produksi Gula Tahun 2022	<b>49</b>
<b>Tabel 2.2</b>	Capaian Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Berdasarkan Rumpun Komoditi Tahun 2022	<b>41</b>	<b>Tabel 2.8</b>	Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau	<b>53</b>
<b>Tabel 2.3</b>	Produktivitas Komoditas di <i>Food Estate</i> Wonosobo dan Temanggung	<b>46</b>	<b>Tabel 2.9</b>	Pemenang TPID Award 2022	<b>60</b>
<b>Tabel 2.4</b>	Perluasan Kawasan <i>Food Estate</i> Padi	<b>46</b>	<b>Tabel 2.10</b>	Nominasi TPID Award 2022	<b>61</b>
<b>Tabel 2.5</b>	Pengembangan Kampung Hortikultura	<b>47</b>	<b>Tabel 3.1</b>	Asumsi Ekonomi Global dan Domestik	<b>64</b>
<b>Tabel 2.6</b>	Produksi Daging Tahun 2021 dan 2022	<b>48</b>			



---

# RINGKASAN EKSEKUTIF



## 1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2022

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2022 meningkat dari tahun sebelumnya dan berada di atas kisaran sasaran  $3,0 \pm 1\%$ . Inflasi IHK 2022 tercatat sebesar 5,51% (yoy), meningkat dari realisasi 2021 yang sebesar 1,87% (yoy) didorong terutama oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022, gangguan cuaca La Nina, serta kenaikan harga komoditas global. Kenaikan inflasi IHK terjadi di seluruh komponennya, yaitu kelompok inti, kelompok pangan bergejolak (*volatile food*, VF), dan kelompok harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*, AP). Inflasi inti meningkat menjadi sebesar 3,36% (yoy) pada 2022 dari 1,56% (yoy) pada 2021, terutama didorong oleh transmisi kenaikan harga komoditas global ke domestik yang masih berlangsung secara gradual. Inflasi VF meningkat menjadi sebesar 5,61% (yoy) pada 2022 dari sebesar 3,21% (yoy) pada 2021 akibat gangguan cuaca La Nina yang mengganggu ketersediaan pasokan bahan pangan dan peningkatan harga komoditas CPO global. Inflasi AP pada 2022 juga meningkat menjadi 13,34% (yoy) dari 1,79% (yoy) pada 2021 terutama didorong oleh peningkatan harga bensin dan tarif angkutan udara (AU) seiring dengan kebijakan penyesuaian BBM, kenaikan mobilitas, dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket, serta kebijakan pengenaan *fuel surcharge* akibat kenaikan harga avtur.

Dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi terhadap inflasi terjaga rendah dan tidak setinggi prakiraan semula. Dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM yang lebih rendah, belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, dan ekspektasi inflasi yang terkendali menahan kenaikan inflasi inti lebih lanjut. Selain itu, stabilitas nilai tukar Rupiah masih terjaga sesuai dengan fundamental perekonomian di tengah tekanan global yang tinggi karena dibayangi berbagai ketidakpastian geopolitik. Perkembangan ini didukung oleh respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang *front-loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Lebih lanjut, sinergi kebijakan yang makin erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis lainnya melalui

TPIP-TPID serta GNPIP mampu menurunkan laju inflasi pangan dan transportasi, serta mengendalikan ekspektasi inflasi yang sempat meningkat karena penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Secara spasial, inflasi gabungan kota IHK 2022 meningkat di seluruh wilayah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Balinusra menjadi wilayah dengan inflasi gabungan kota IHK tahunan tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 6,29% (yoy), diikuti oleh Sumatera sebesar 6,14% (yoy), Kalimantan sebesar 5,94% (yoy), Sulampua sebesar 5,63% (yoy), dan Jawa sebesar 5,27% (yoy). Berdasarkan provinsi, realisasi inflasi gabungan kota IHK tahun 2022 tertinggi terjadi di provinsi Sumatera Barat sebesar 7,42% (yoy), Sulawesi Tenggara sebesar 7,39% (yoy), dan Kalimantan Selatan sebesar 6,99% (yoy). Penyumbang inflasi terbesar di ketiga provinsi tersebut terdiri atas komoditas AU, bensin, dan beras.

## 2. Kebijakan Pengendalian Inflasi

Upaya pengendalian inflasi pada 2022 melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas harga, serta mengendalikan ekspektasi inflasi yang sempat meningkat. Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan Bank Indonesia selama 2022 diselaraskan dengan upaya akselerasi pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas, diantaranya dengan kebijakan normalisasi likuiditas, stabilisasi nilai tukar, dan suku bunga yang diterapkan secara komprehensif. Dari sisi kebijakan fiskal, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pos subsidi dan kompensasi ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat, terutama dengan menyiapkan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) bagi masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan pangan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan energi pada semester I 2022 masih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, namun pada semester II 2022 Pemerintah melakukan penyesuaian harga jual energi bersubsidi karena kenaikan harga minyak global. Kebijakan energi juga diarahkan untuk mendukung

ketahanan energi nasional khususnya kebijakan transisi kebijakan hijau. Kebijakan konektivitas wilayah dilakukan untuk menurunkan disparitas harga antarwilayah untuk mendukung kelancaran distribusi dengan meningkatkan konektivitas laut, darat melalui kereta api, dan udara. Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan masih tetap diarahkan untuk menjaga daya beli, diantaranya dengan mempertahankan Program Kartu Prakerja serta menyesuaikan upah minimum.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*). Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI7DRR pada semester II tahun 2022 untuk merespons kenaikan tekanan inflasi inti dan ekspektasi inflasi ke depan. Upaya stabilisasi nilai tukar juga terus diperkuat sejalan dengan tekanan eksternal yang meningkat serta penguatan kebijakan normalisasi likuiditas dengan menaikkan secara bertahap Giro Wajib Minimum (GWM), baik untuk Bank Umum maupun Bank Umum Syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga mempererat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dalam mengendalikan dampak penyesuaian harga BBM serta meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengendalikan inflasi pangan. Program GNPIP ini dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia di 46 wilayah kerja KPwDN selama Juli hingga Desember 2022 dengan capaian realisasi target hingga 100%.

Kebijakan fiskal telah berperan secara optimal dengan APBN yang diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat pada 2022, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan fiskal melalui APBN berperan sebagai *shock absorber* di tengah risiko global yang tidak menentu. Anggaran subsidi energi mengalami peningkatan signifikan akibat kenaikan minyak mentah global. Pemerintah juga menganggarkan Perlinsos untuk kelompok masyarakat rentan dengan memberikan Kartu Sembako dan Bantuan Langsung Tunai untuk komoditas tertentu. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menganggarkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) untuk program Perlinsos, termasuk untuk subsidi transportasi setelah penyesuaian harga BBM bersubsidi selama Oktober-Desember 2022.

Kebijakan pangan Pemerintah dilaksanakan dengan memperkuat pasokan baik dari produksi domestik maupun stabilisasi harga pangan melalui penguatan impor. Kebijakan pangan Pemerintah juga didukung oleh perbaikan regulasi di bidang pangan dan peningkatan ketersediaan data pangan yang berkualitas sejalan dengan penguatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Selama 2022, Perum BULOG dan ID Food melakukan sejumlah upaya stabilisasi pasokan pangan pada komoditas beras, daging sapi, daging lembu, dan daging ayam ras. Selain itu, upaya stabilisasi harga pangan juga dilakukan melalui penguatan pasokan impor, subsidi selisih harga, dan prioritas pasokan minyak goreng domestik sebagai upaya merespons tekanan inflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis seperti minyak goreng, kedelai, dan jagung akibat kenaikan harga global.

Kebijakan energi nasional pada 2022 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendukung ketahanan energi. Meskipun harga minyak global berada dalam tren meningkat sejak 2021, pemerintah masih mempertahankan harga jual sejumlah komoditas energi yang mendapatkan subsidi oleh APBN hingga Agustus 2022. Namun demikian, tekanan harga minyak yang terus meningkat dan jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi awal APBN 2022 mengakibatkan Pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik nonsubsidi pada Juli 2022 serta harga jual Solar dan Pertalite pada September 2022. Untuk melindungi kelompok masyarakat rentan miskin, Pemerintah memberikan bantuan sosial (*bansos*) antara lain berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta dana transfer umum (DTU). Selain itu, kebijakan energi diarahkan untuk transisi kebijakan energi hijau dengan menerbitkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengembangan Energi Terbarukan serta peluncuran *Energy Transition Mechanism* (ETM) untuk mobilisasi pembiayaan.

Kebijakan konektivitas antarwilayah ditujukan untuk mendukung pengendalian inflasi dalam strategi kunci mendukung Kelancaran Distribusi. Kebijakan konektivitas transportasi ditempuh untuk mendorong penurunan disparitas harga antarwilayah melalui peningkatan konektivitas laut, darat melalui kereta api, dan udara. Implementasi kebijakan konektivitas antara lain dilakukan melalui pembangunan jalan tol baru, penyediaan konektivitas multimoda, pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, peningkatan kapasitas bandara primer, penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui optimalisasi tol laut dan jembatan udara. Selain itu, peningkatan infrastruktur konektivitas milik daerah juga terus dilakukan melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan ketenagakerjaan pada 2022 tetap diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Program Kartu Prakerja tetap dilaksanakan dengan skema “semi-bantuan sosial” untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan untuk membantu biaya hidup dan mencari pekerjaan dengan menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah juga melanjutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang berpenghasilan rendah. Di samping itu, Pemerintah terus mendorong kebijakan pengupahan untuk menyesuaikan upah minimum dengan ketentuan pada Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian upah minimum sehingga dapat mendorong tumbuhnya produktivitas perusahaan, melindungi pekerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

### 3. Program Kerja TPIP Tahun 2022

Program Kerja TPIP pada 2022 diarahkan untuk terus mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga stabilitas inflasi dalam kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif. Penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan untuk komoditas pangan strategis (minyak goreng, gula, jagung, daging ayam ras, dan telur ayam ras) dilakukan untuk memperkuat program Keterjangkauan Harga. Pemerintah juga berupaya untuk mendorong peningkatan stabilisasi

dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok dengan melaksanakan program Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH), penggunaan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) oleh Perum BULOG untuk komoditas jagung dan kedelai, serta koordinasi kebijakan penetapan harga komoditas dalam inflasi kelompok AP. Di sisi lain, Bank Indonesia juga melakukan upaya dukungan untuk program Keterjangkauan Harga yaitu dengan menjaga volatilitas nilai tukar untuk menekan volatilitas inflasi barang impor. Bank Indonesia juga melakukan upaya menjaga keseimbangan internal perekonomian dengan bersinergi bersama Pemerintah melalui kebijakan moneter yang *pro-stability*.

Program Kerja TPIP untuk menjaga Ketersediaan Pasokan terus dikembangkan dan diperkuat selama 2022. Penguatan tersebut dilakukan dengan menjaga pasokan dalam negeri seperti peningkatan produktivitas dengan pengembangan *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya pertanian, pengembangan *food estate* atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), perluasan kawasan lumbung pangan untuk padi, pengembangan Kampung Hortikultura, optimalisasi bantuan sarana produksi dan pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Di samping itu, penguatan program Ketersediaan Pasokan juga dilakukan dengan menerapkan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), pengelolaan produksi peternakan yang profesional, percepatan swasembada gula, peningkatan produksi kebun sawit, peningkatan ketersediaan telur ayam ras, modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian, penguatan kelembagaan dan peningkatan pemenuhan pembiayaan bagi petani, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) dan nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK). Pemerintah juga menerapkan kebijakan pemenuhan pasokan dengan penguatan realisasi impor bahan pangan dan diversifikasi negara asal impor untuk komoditas pangan strategis.

Pelaksanaan program kerja Kelancaran Distribusi difokuskan untuk menekan disparitas inflasi antarwilayah. Program kerja Kelancaran Distribusi pada 2022 dilakukan dengan upaya penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), peningkatan kelancaran pergerakan logistik bahan pangan ke daerah 3TP, penguatan program tol laut dan

peningkatan kemandirian jalan. Penguatan kerjasama antardaerah dilakukan dengan penguatan asesmen *pre-matchmaking* dalam pemilihan calon pelaku usaha pelaksana KAD dan mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sebagai operator KAD. Kementerian Pertanian juga terus berupaya menjaga kelancaran distribusi pangan melalui penyaluran bahan pangan melalui Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center (PMT/TTIC) dan Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia (TMT/TTI). Di samping itu, penguatan distribusi pangan dilakukan dengan memperkuat implementasi digitalisasi UMKM Pangan sisi hilir untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan nilai tambah terhadap komoditas pangan melalui *e-commerce* nasional maupun lokal.

Program Kerja Komunikasi Efektif terus dilakukan sepanjang 2022, antara lain melalui penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan dilakukan dengan menyediakan sistem informasi terintegrasi untuk komoditas pangan utama, meningkatkan kualitas dan keakuratan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), menyusun peta jalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta meningkatkan keandalan TPID melalui *capacity building*. Selain itu, bauran kebijakan yang kredibel dilaksanakan untuk terus menjaga ekspektasi inflasi dengan didukung oleh komunikasi kebijakan yang rutin dan terpercaya.

#### 4. Prospek Inflasi Tahun 2023

Inflasi 2023 diperkirakan menurun dan kembali berada dalam kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Inflasi inti diperkirakan menurun didukung oleh tekanan harga komoditas impor yang semakin terkendali, nilai Rupiah yang relatif stabil, serta respons kebijakan moneter yang *front-loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti terjaga dalam kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Tekanan inflasi VF diperkirakan akan semakin terkendali didukung oleh penurunan harga komoditas global, prakiraan cuaca yang lebih kondusif, serta langkah pengendalian inflasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta mitra strategis lainnya melalui TPIP-TPID serta GNPIP yang semakin erat. Inflasi AP juga akan lebih rendah dengan potensi penyesuaian harga yang minimal seiring dengan penurunan harga minyak global dan harga keekonomian BBM.

#### 5. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023

Upaya pengendalian inflasi 2023 diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga inflasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan domestik, serta memperkuat ketersediaan barang dan jasa untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Bauran kebijakan Bank Indonesia 2023 akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian dalam sinergi serta komunikasi yang erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter 2023 akan tetap berfokus pada upaya menjaga stabilisasi (*pro-stability*) untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi, menjaga nilai tukar Rupiah, serta stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kebijakan suku bunga akan dilanjutkan untuk memastikan ekspektasi inflasi dan inflasi terus menurun sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Sementara itu, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk memitigasi dampak lanjutan gejolak global terhadap inflasi. Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP-TPID serta program GNPIP dalam rangka pengendalian inflasi. Program unggulan TPIP-TPID dan GNPIP pada 2023 difokuskan pada upaya pengendalian inflasi yang bersifat struktural, *forward looking*, dan berbasis digital.

Kebijakan fiskal pada 2023 akan diarahkan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tetap mewaspadaikan risiko ketidakpastian global. Pemerintah terus melanjutkan program-program Perlinsos guna menjaga daya beli masyarakat rentan dan miskin. Sebagian dari APBN 2023 juga dialokasikan untuk subsidi, termasuk di dalamnya adalah subsidi dan kompensasi energi serta subsidi pupuk yang tepat sasaran. Sementara itu, kebijakan ketahanan pangan yang akan ditempuh pada 2023 antara lain melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan, dan modernisasi. Di samping itu, kebijakan ketahanan pangan juga dilakukan melalui upaya pengembangan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas dan kelancaran distribusi. Di sisi lain, kebijakan ketenagakerjaan pada 2023 diarahkan untuk mendukung akselerasi ekonomi antara lain dengan: (i) melakukan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan dan

pelatihan vokasi; (ii) pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi; serta (iii) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

Kebijakan pangan pada 2023 akan semakin diperkuat dengan mencakup penguatan kualitas data pangan nasional, pembaruan harga acuan, penyempurnaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta program stabilisasi pasokan. Penguatan instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan akan mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama antara Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah. Kebijakan penguatan infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang terutama difokuskan untuk kegiatan prioritas sebagaimana RPJMN 2020-2024 yaitu: (i) konektivitas transportasi jalan; (ii) konektivitas transportasi kereta api; (iii) konektivitas transportasi laut; (iv) konektivitas transportasi udara; dan (v) konektivitas transportasi darat.

## 6. Program Kerja TPIP 2023

Program kerja pengendalian inflasi pada 2023 tetap difokuskan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Untuk menjaga Keterjangkauan Harga, TPIP memiliki program kerja untuk menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan. Upaya stabilisasi harga mencakup evaluasi atas harga pembelian di tingkat konsumen dan produsen, melalui kebijakan pada komoditas pangan strategis sekaligus pemberian insentif bagi petani dan/atau peternak. Upaya peningkatan stabilisasi juga dilakukan dengan melakukan pengawasan harga maupun stok bahan pokok, terutama saat periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Penguatan mekanisme pelaksanaan dan perbaikan target pasar juga terus diperkuat sejalan dengan upaya menjaga ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau melalui optimalisasi kegiatan Operasi Pasar, koordinasi penetapan kebijakan harga komoditas *administered prices* (AP), dan minimalisasi volatilitas nilai tukar. Dalam kebijakan mengelola permintaan, sinergi dan inovasi bauran kebijakan

makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan akan terus diarahkan sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Penguatan kebijakan Ketersediaan Pasokan diharapkan dapat memperkuat produksi domestik dan meningkatkan produktivitas. Penguatan produksi domestik dilakukan dengan terus memperluas adopsi *internet of things* (IoT) dalam bidang pertanian, pengembangan lumbung pangan termasuk peningkatan produksi hortikultura, optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, serta penyediaan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pertanian. Penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) domestik terus dilanjutkan sejalan dengan pengelolaan mekanisme impor bahan pangan. Penguatan CPP merupakan upaya pemenuhan ketersediaan pasokan, khususnya sebagai langkah antisipatif menjelang masa HBKN. Penguatan kelembagaan juga terus dilakukan secara konsisten untuk mendukung kesejahteraan petani, baik melalui aspek pembiayaan perdagangan maupun perlindungan usaha.

Dalam rangka menjaga Kelancaran Distribusi, TPIP akan terus memperkuat upaya peningkatan infrastruktur konektivitas, kerja sama perdagangan antardaerah (KAD), serta fasilitasi distribusi pangan untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Penguatan KAD akan dilakukan melalui perluasan cakupan komoditas pangan strategis sesuai kondisi inflasi dan karakteristik masing-masing daerah, mendorong penguatan kelembagaan serta meningkatkan digitalisasi dan inovasi. Upaya mendorong kelancaran distribusi juga diperkuat melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas terus dilakukan guna mendukung kelancaran pergerakan bahan pangan termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Perbatasan) dengan fokus utama pengembangan

infrastruktur jalur darat. Selain itu, implementasi digitalisasi UMKM sisi hilir juga terus diperkuat untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, memperlancar distribusi bahan pangan, serta meningkatkan akses petani ke masyarakat.

Komunikasi Efektif pada program kerja TPIP pada 2023 diarahkan untuk memperbaiki kualitas data dan informasi pangan serta menjaga ekspektasi inflasi agar sesuai rentang sasaran. TPIP akan terus memperkuat penyediaan sistem informasi data pangan yang terintegrasi pada 2023 dengan memperbaiki

kualitas data pangan pada PIHPS Nasional melalui penguatan aplikasi yang digunakan dalam survei, baik yang berbasis *mobile* dan *web*. Koordinasi dan komunikasi yang konsisten antara pusat dan daerah juga diperlukan untuk meningkatkan keandalan TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Bank Indonesia dan pemerintah akan terus melanjutkan pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat termasuk dalam membahas sasaran inflasi 2025-2027 yang akan disampaikan pada *High Level Meeting* TPIP untuk dibahas dan disepakati bersama.

Jakarta, 31 Juli 2023

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

**Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian**



**Ferry Irawan**  
Plt. Deputi Bidang  
Koordinasi Ekonomi Makro  
dan Keuangan

**Bank Indonesia**



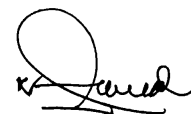
**Firman Mochtar**  
Kepala Departemen  
Kebijakan Ekonomi dan  
Moneter

**Kementerian Keuangan**



**Febrio N. Kacaribu**  
Kepala Badan Kebijakan  
Fiskal

**Kementerian Dalam Negeri**



**Restuardy Daud**  
Direktur Jenderal Bina  
Pembangunan Daerah



BAB I

---

# EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2022

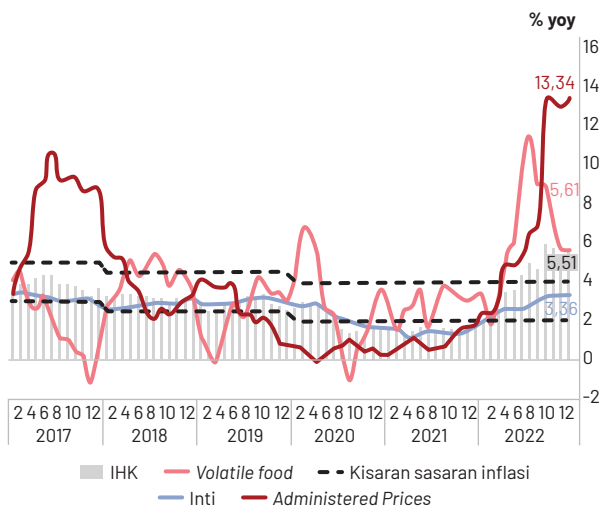


Inflasi IHK pada 2022 meningkat menjadi sebesar 5,51% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran inflasi 3,0±1%. Peningkatan inflasi IHK tahun 2022 tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022 serta kenaikan harga komoditas pangan karena gangguan cuaca. Selain faktor domestik, realisasi inflasi 2022 juga turut dipengaruhi oleh transmisi harga komoditas global yang berlangsung gradual selama 2022. Walaupun meningkat, realisasi inflasi tersebut lebih rendah dari prakiraan semula karena dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi

yang tidak setinggi prakiraan. Lebih rendahnya realisasi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak terlepas dari pengaruh koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dan tekanan inflasi sisi permintaan yang masih berlangsung gradual. Ke depan, sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan agar inflasi segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.

Inflasi IHK 2022 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya disumbang oleh kenaikan seluruh komponennya. Inflasi IHK 2022 meningkat menjadi sebesar 5,51% (yoy), dari realisasi 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran inflasi 3,0±1% (yoy) (Grafik 1.1). Realisasi inflasi 2022 tersebut dipengaruhi terutama oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022, kenaikan harga komoditas pangan karena gangguan cuaca La Nina, dan transmisi kenaikan harga komoditas global ke harga domestik. Namun demikian, dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti dan aneka angkutan terjaga rendah dan tidak setinggi prakiraan semula. Tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan juga masih berlangsung secara gradual sehingga menahan kenaikan inflasi lebih lanjut. Selain itu, stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga sesuai dengan fundamental perekonomian di tengah tekanan global yang tinggi karena dibayangi berbagai ketidakpastian geopolitik. Lebih lanjut, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, mampu menurunkan tekanan inflasi dan mengendalikan ekspektasi inflasi yang sempat meningkat karena penyesuaian harga BBM bersubsidi.

**Grafik 1.1. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi**

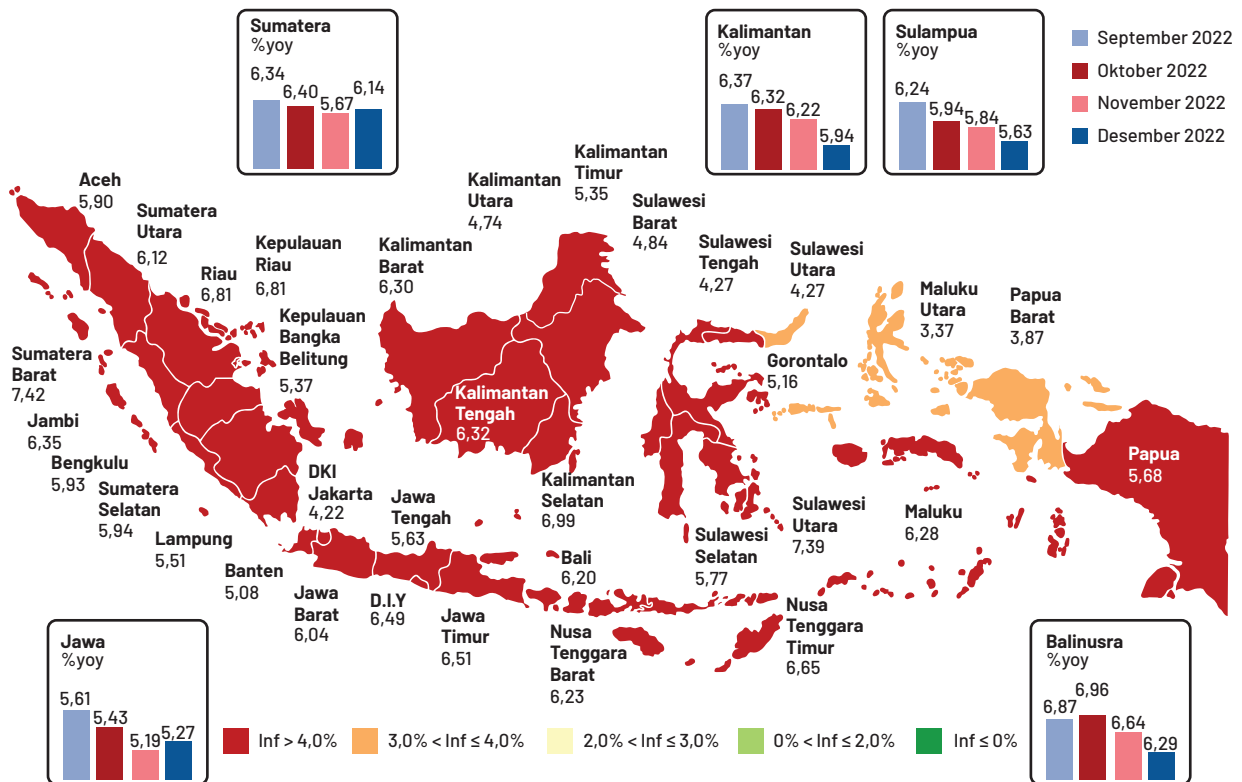


Sumber: BPS, diolah

Secara spasial, inflasi gabungan kota IHK 2022 meningkat di seluruh wilayah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Balinusra menjadi wilayah dengan inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 6,29% (yoy), diikuti oleh Sumatera sebesar 6,14% (yoy), Kalimantan sebesar 5,94% (yoy), Sulampua sebesar 5,63% (yoy), dan Jawa sebesar 5,27% (yoy) (Gambar 1.1). Inflasi gabungan kota IHK di seluruh wilayah pada tahun 2022 tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan provinsi, realisasi inflasi gabungan kota IHK tahun 2022 yang tertinggi terjadi di provinsi Sumatera Barat sebesar 7,42% (yoy), Sulawesi Tenggara sebesar 7,39% (yoy), dan Kalimantan Selatan sebesar 6,99% (yoy). Komoditas penyumbang inflasi terbesar di ketiga provinsi tersebut ialah komoditas tarif AU, bensin, dan beras.

Berdasarkan disagregasinya, semua kelompok inflasi IHK yang terdiri dari kelompok inti, *Volatile Food* (VF), dan *Administered Prices* (AP) meningkat pada 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inflasi inti meningkat menjadi sebesar 3,36% (yoy) pada 2022 dari 2021 yang sebesar 1,56% (yoy) terutama didorong oleh transmisi kenaikan harga komoditas global ke domestik yang masih berlangsung secara gradual meski nilai tukar relatif stabil. Walaupun meningkat, inflasi inti 2022 tetap terjaga rendah disebabkan terutama oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM yang rendah, tekanan inflasi dari sisi permintaan yang belum kuat, dan ekspektasi inflasi yang terkendali. Sementara itu, inflasi VF meningkat menjadi 5,61% (yoy) pada 2022 dari 2021 sebesar 3,21% (yoy). Peningkatan inflasi VF ini terutama disebabkan oleh gangguan cuaca La Nina yang mengganggu ketersediaan pasokan bahan pangan, khususnya komoditas hortikultura dan aneka ikan. Sementara itu, kelompok AP juga mengalami kenaikan inflasi menjadi 13,34% (yoy) pada 2022 dari 1,79% (yoy) pada 2021 terutama didorong oleh penyesuaian tarif harga BBM bersubsidi, aneka angkutan, dan rokok. Penyesuaian kebijakan berbagai tarif tersebut dilakukan karena kenaikan harga komoditas global, perbaikan mobilitas masyarakat, dan kenaikan cukai rokok.

Gambar 1.1. Inflasi Gabungan Kota IHK (% yoy)



Sumber: BPS, diolah

Ke depan, sinergi dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga baik di pusat maupun daerah akan terus diperkuat untuk meningkatkan upaya pengendalian inflasi agar dapat mendorong inflasi kembali ke dalam sasarnya yaitu  $3,0 \pm 1,0\%$ . Upaya sinergi dan koordinasi tersebut kemudian diwujudkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan menyepakati lima langkah strategis dalam pengendalian inflasi pada kegiatan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) tanggal 9 Maret 2022 yakni: (i) memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional; (ii) memitigasi dampak *upside risks*, antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat;

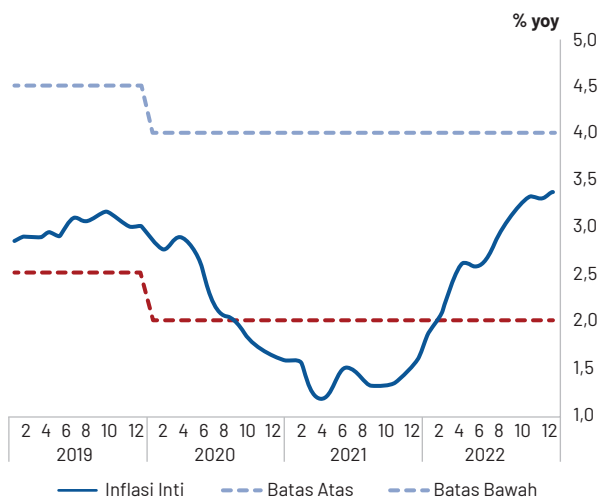
(iii) menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran 3,0–5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antardaerah; (iv) memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat; dan (v) memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema: “Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”.

## 1.1. Inflasi Inti

Inflasi inti tetap terjaga pada 2022 didukung oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM yang terbatas, tekanan inflasi dari sisi permintaan yang belum kuat, dan ekspektasi inflasi yang terkendali. Inflasi inti pada 2022 meningkat menjadi sebesar 3,36% (yoy) dari sebesar 1,60% (yoy) pada 2021 (Grafik 1.2). Peningkatan inflasi inti 2022 tersebut terutama didorong oleh transmisi kenaikan harga komoditas global ke domestik yang terus berlangsung secara gradual. Namun demikian, dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM, belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan, dan terkendalnya ekspektasi inflasi menahan kenaikan inflasi inti lebih lanjut.

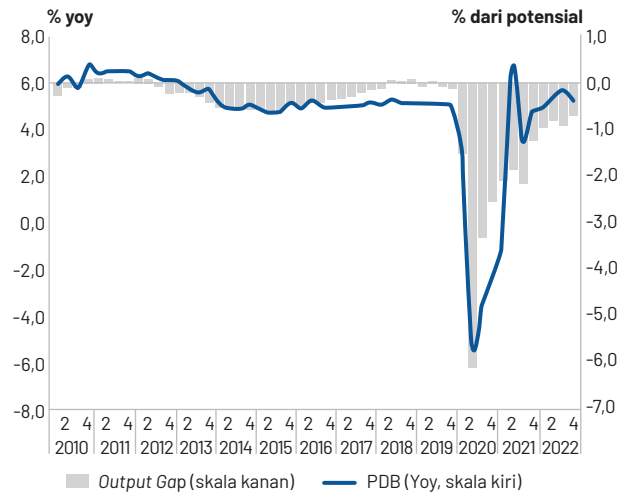
Daya beli masyarakat yang meningkat gradual berdampak pada realisasi inflasi inti yang masih terjaga. Meredanya pandemi Covid-19 telah mendorong pelanggaran mobilitas yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik menjadi 5,31% (yoy) pada 2022, dari sebesar 3,70% (yoy) pada 2021. Konsumsi rumah tangga yang mempunyai pangsa yang paling dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 4,48% (yoy) pada tahun 2022, meningkat dari 1,88% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sebagaimana PDB yang terus membaik, *output gap*<sup>1</sup> juga semakin menyempit yang menunjukkan pemakaian *output* nasional yang semakin mendekati output potensial (Grafik 1.3).

Grafik 1.2. Inflasi Inti (% yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3. PDB dan Output Gap



Sumber: BPS, diolah, perhitungan Bank Indonesia

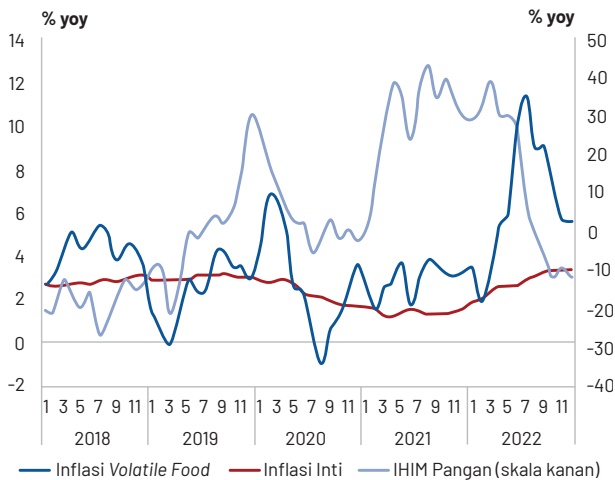
Ekspektasi inflasi pada 2022 berada di atas sasaran karena sentimen kenaikan harga komoditas global serta inflasi pangan domestik yang meningkat. Berbagai sentimen tersebut meningkatkan ekspektasi sejak awal 2022 hingga mencapai puncaknya pada September 2022 saat terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun demikian, kebijakan pengendalian inflasi baik dari sektor moneter maupun riil berhasil menurunkan ekspektasi inflasi tahun 2022. Upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dan sinergi kebijakan yang ditempuh untuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM ke inflasi inti berhasil menahan kenaikan ekspektasi inflasi lebih lanjut. Ekspektasi inflasi yang dicatat oleh survei *Consensus Forecast* (CF) untuk 2022 yang dirilis pada Desember 2022 adalah sebesar 4,30% (rerata, yoy) atau 5,50% (akhir periode, yoy).

Ekspektasi inflasi tersebut meningkat dari CF tahun 2022 yang dirilis pada Desember 2021 sebesar 2,90% (rerata, yoy) atau 3,80% (akhir periode, yoy). Ke depan, ekspektasi inflasi tahun 2023 menurun dibandingkan dengan ekspektasi inflasi 2022, yaitu sebesar 4,20% (rerata, yoy) atau 3,30% (akhir periode, yoy) didukung oleh prakiraan tekanan harga komoditas global yang mereda di tengah permintaan domestik yang diperkirakan meningkat secara gradual (Grafik 1.4 dan 1.5).

1 Selisih antara output realisasi dan output potensial

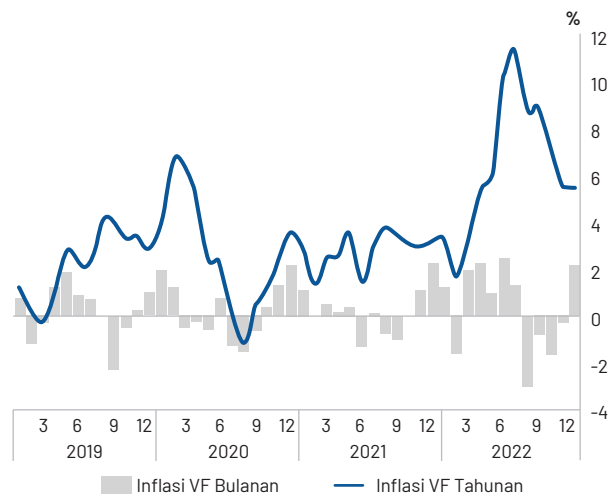


**Grafik 1.7. Inflasi VF, Inflasi Inti dan IHIM Pangan**



Sumber: Bloomberg, BPS, diolah

**Grafik 1.8. Perkembangan Inflasi Volatile Food**



Sumber: BPS, diolah

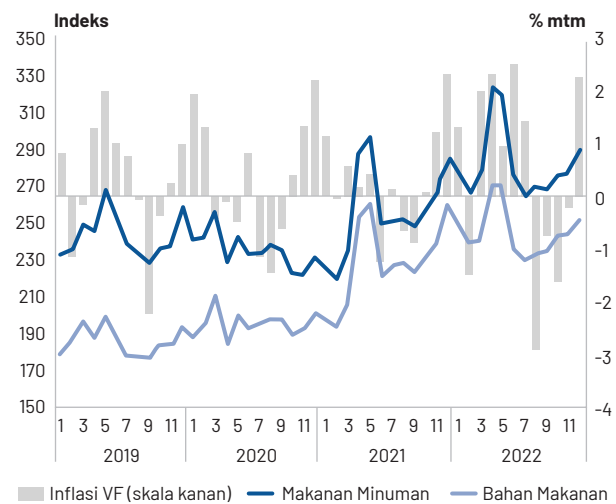
## 1.2. Inflasi Volatile Food (VF)

Inflasi kelompok VF meningkat pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya terutama karena produksi pangan yang terkendala akibat gangguan cuaca La Nina. Inflasi kelompok VF tercatat sebesar 5,61% (yoy) atau lebih tinggi dari 2021 yang mengalami inflasi sebesar 3,20% (yoy) (Grafik 1.8). Inflasi VF 2022 tersebut berada di atas target inflasi VF yang disepakati pada *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang sebesar 4,0%±1. Peningkatan inflasi VF tersebut terutama disebabkan oleh produksi komoditas pangan, khususnya hortikultura, yang terkendala akibat gangguan cuaca La Nina. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat yang mendorong perbaikan permintaan domestik juga menaikkan inflasi VF (Grafik 1.9).

Perkembangan tersebut mengakibatkan sebagian besar komoditas dari sembilan komoditas pangan dengan bobot terbesar<sup>2</sup> mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi dari rerata historisnya, terutama minyak goreng, aneka cabai, dan bawang merah. Hanya komoditas bawang putih yang mencatatkan perkembangan harga yang lebih rendah dari rerata historisnya.

<sup>2</sup> Beras, daging ayam ras, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, bawang merah, cabai merah, bawang putih dan cabai rawit.

**Grafik 1.9. Perkembangan Penjualan Eceran**



Sumber: Bank Indonesia, BPS, diolah

Kondisi cuaca pada 2022 yang tidak sepenuhnya kondusif mengakibatkan gangguan pada produksi pangan. Fenomena La Nina dengan intensitas lemah hingga moderat yang berlangsung sepanjang tahun mengakibatkan cuaca pada 2022 cenderung lebih basah. Fenomena La Nina tersebut menyebabkan curah hujan menengah hingga tinggi di berbagai wilayah sentra pada awal dan pertengahan tahun 2022 sehingga mengakibatkan gangguan produksi dan distribusi pada komoditas hortikultura. Selain

fenomena La Nina, terdapat pula fenomena anomali IOD (*Indian Ocean Dipole*) yang turut menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan dan cuaca ekstrem terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Walaupun secara umum fenomena La Nina mengganggu produksi komoditas hortikultura, kondisi cuaca ini mendukung produksi komoditas padi karena pasokan pengairan yang lebih merata sepanjang tahun.

Permintaan pangan domestik membaik secara *gradual* sepanjang 2022 karena mobilitas masyarakat yang meningkat. Permintaan pangan, khususnya yang berasal dari sektor horeca (hotel, restoran, dan *catering*) mulai membaik sejak awal 2022, terutama sejak HBKN Idul Fitri pada Maret-April 2022 yang merupakan HBKN pertama tanpa pembatasan. Kenaikan permintaan pangan yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat tersebut terus berlanjut secara *gradual* hingga akhir 2022.

Sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi TPIP-TPID terus diperkuat selama 2022 untuk mengendalikan pengaruh gejolak sisi pasokan dan mengantisipasi kenaikan permintaan terhadap inflasi pangan. Sejumlah *extra effort* dilaksanakan dalam kerangka pengendalian inflasi 4K baik di pusat maupun daerah oleh TPIP dan TPID. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menjaga pasokan minyak goreng domestik, menjaga stabilitas harga dan memperluas jangkauan distribusi minyak goreng curah. Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Perum BULOG melakukan sejumlah upaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, antara lain berupa: (i) pengawasan dan pengawalan produksi hortikultura serta fasilitasi distribusi dari daerah surplus produksi ke daerah defisit; (ii) pembatasan mobilitas dan percepatan vaksinasi dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi; (iii) penguatan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)<sup>3</sup> beras; dan (iv) fasilitasi pembelian daging ayam ras oleh BUMN dan perusahaan untuk mendorong perbaikan harga daging ayam ras di tingkat peternak. Lebih lanjut, sinergi TPIP

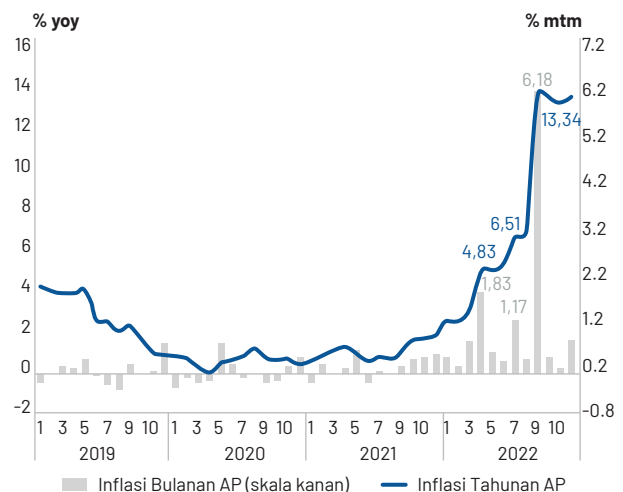
dan TPID bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga telah berhasil mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, antara lain melalui penguatan operasi pasar, penyediaan fasilitasi distribusi, dan perluasan gerakan tanam cabai di berbagai daerah. Implementasi sejumlah *extra effort* tersebut berhasil menahan tekanan inflasi VF lebih lanjut.

### 1.3. Inflasi Administered Prices (AP)

Inflasi AP pada 2022 lebih tinggi dari 2021 terutama karena penyesuaian harga energi domestik, khususnya BBM bersubsidi. Inflasi AP pada 2022 meningkat menjadi 13,34% (yoy), dari 2021 sebesar 1,79% (yoy) (Grafik 1.10). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian harga BBM, khususnya jenis subsidi, Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT), kenaikan tarif AU dan angkutan dalam kota, serta kenaikan harga rokok (Grafik 1.11). Walaupun inflasi AP tersebut meningkat, kenaikan inflasi AP tersebut tidak setinggi prakiraan sebelumnya karena realisasi dampak penyesuaian harga BBM terhadap tarif angkutan yang terbatas.

Inflasi komoditas energi meningkat dari tahun sebelumnya disumbang oleh penyesuaian harga BBM, *Liquid Petroleum Gas* (LPG), dan tarif listrik karena kenaikan harga minyak global. Inflasi subkelompok pengoperasian transportasi pribadi, yang antara lain

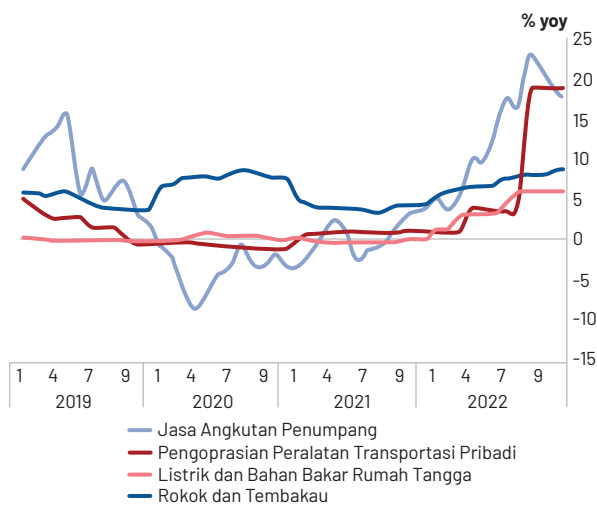
Grafik 1.10. Perkembangan Inflasi AP



Sumber: BPS, diolah

3 Saat ini menjadi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

**Grafik 1.11. Perkembangan Inflasi Subkelompok Terkait Inflasi AP**



Sumber: BPS, diolah

mencakup komoditas BBM, mengalami inflasi sebesar 16,87% (yoy) pada 2022, meningkat dari 0,33% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September tahun 2022 maupun harga BBM nonsubsidi pada Maret, April, September, Oktober, dan Desember tahun 2022. Penyesuaian harga juga terjadi pada komoditas LPG nonsubsidi, khususnya di tingkat penjual eceran, selama 2022 dan kebijakan penyesuaian tarif listrik nonsubsidi pada Juli 2022. Hal tersebut menyebabkan inflasi subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga meningkat menjadi 6,23% (yoy) pada 2022 dari sebesar 0,28% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Inflasi komoditas jasa angkutan penumpang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan inflasi BBM dan perbaikan mobilitas masyarakat. Inflasi jasa angkutan penumpang pada tahun 2022 adalah sebesar 18,05% (yoy), meningkat dari 4,05% (yoy) pada tahun 2021. Tarif AU memberikan andil inflasi terbesar yang antara lain disebabkan oleh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket, pengenaan tarif *fuel surcharge* yang didorong oleh kenaikan harga avtur sejak April 2022, serta kenaikan tarif *passenger service charge* di beberapa *airport* Indonesia pada Juni hingga Agustus 2022. Dari sisi permintaan, kenaikan tarif AU juga didorong oleh kenaikan jumlah penumpang AU seiring dengan relaksasi mobilitas, di tengah jumlah armada pesawat yang masih belum kembali ke level normal sebelum Covid-19. Tarif angkutan

darat, terutama angkutan dalam kota, juga meningkat dibandingkan dengan 2021 dipengaruhi oleh dampak lanjutan penyesuaian BBM bersubsidi. Meski demikian, kenaikan tarif aneka angkutan dalam kota tersebut tidak setinggi prakiraan awal karena didukung oleh subsidi transportasi dari Pemerintah Daerah dan strategi operator angkutan yang berfokus pada keterisian penumpang (*seat load factor*) dan pangsa pasar (*market share*).

Inflasi aneka rokok dalam tren meningkat yang didorong oleh kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Realisasi inflasi subkelompok rokok dan tembakau adalah sebesar 8,92% (yoy) pada 2022, lebih tinggi dari 4,58% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut disebabkan oleh transmisi kenaikan tarif cukai sebesar 12% (rerata tertimbang) terhadap harga konsumen yang dilakukan oleh produsen rokok. Sejalan dengan kebijakan relaksasi mobilitas dan khususnya momen Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru, penjualan rokok hingga akhir Desember tahun 2022 terus meningkat. Meski demikian, produsen juga tetap mempertimbangkan *market share* sehingga kenaikan harganya cenderung bersifat gradual.

## 1.4. Inflasi Regional

Inflasi gabungan kota IHK pada 2022 meningkat di seluruh wilayah dan berada di atas sasaran inflasi nasional. Disparitas inflasi antarwilayah meningkat terutama didorong oleh kebijakan penyesuaian harga BBM, gangguan pasokan pangan strategis, dan peningkatan permintaan secara gradual. Inflasi gabungan kota IHK tertinggi terjadi di provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Selatan masing-masing sebesar 7,42% (yoy), 7,39% (yoy), dan 6,99% (yoy). Dari gabungan kota IHK di ketiga provinsi tersebut, inflasi terutama disumbang oleh komoditas bensin, tarif AU, beras, bahan bakar rumah tangga (BBRT), dan rokok kretek filter. Penyesuaian harga BBM bersubsidi berdampak pada kenaikan inflasi komoditas bensin, angkutan dalam kota, solar, angkutan antarkota, dan tarif kendaraan *online* di berbagai daerah. Kenaikan inflasi komoditas AU juga terjadi di mayoritas daerah seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket AU, pengenaan tarif *fuel surcharge* akibat kenaikan harga avtur, serta peningkatan permintaan karena relaksasi mobilitas. Selain itu, inflasi aneka rokok

juga meningkat didorong oleh berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau oleh produsen di berbagai daerah. Dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kenaikan inflasi terutama terjadi pada komoditas beras dan hortikultura. Tekanan harga kedua komoditas tersebut meningkat pada paruh kedua 2022 karena gangguan cuaca yang mengakibatkan penurunan produksi di daerah sentra.



BAB II

---

# KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2022



Sesuai dengan kesepakatan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada tanggal 9 Maret 2022, kebijakan pengendalian inflasi 2022 diarahkan untuk mendukung upaya menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar  $3,0\% \pm 1,0\%$ . Kebijakan tersebut mencakup lima langkah strategis, yaitu: (i) memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional; (ii) memitigasi dampak upside risks, antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat; (iii) menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya tersebut dilakukan

dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antardaerah; (iv) memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat; dan (v) memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema: "Digitalisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilisasi Harga".

## 2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2022

### 2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus berkomitmen menempuh bauran kebijakan, yang diselaraskan dengan arah kebijakan nasional untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas. Pada 2022, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk merespons risiko meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju, khususnya Amerika Serikat, di tengah ekonomi Indonesia yang masih berada pada tahap awal akselerasi pemulihan ekonomi. Untuk itu, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan 4 (empat) instrumen lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*).

Di bidang moneter, Bank Indonesia menerapkan kebijakan normalisasi likuiditas, stabilisasi nilai tukar, dan suku bunga secara komprehensif untuk memastikan terjaganya stabilitas. Sejalan dengan tekanan inflasi inti yang masih rendah pada semester I tahun 2022, Bank Indonesia menempuh respon kebijakan normalisasi likuiditas secara bertahap, terukur, dan sangat berhati-hati, serta dikomunikasikan dengan baik (*well-calibrated, well-planned, dan well-communicated*). Kebijakan normalisasi likuiditas tersebut mencakup kenaikan bertahap rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah menjadi 9% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dan 7,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS).

Upaya stabilisasi nilai tukar terus diperkuat agar sesuai dengan fundamentalnya di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Penguatan stabilisasi nilai tukar ditempuh sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi barang impor (*imported inflation*), di samping untuk memitigasi dampak rambatan dari depresiasi nilai tukar dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada 2022, langkah stabilisasi nilai tukar mencakup *triple intervention*, melalui transaksi spot, *Domestic*

*Non-deliverable Forward (DNDF)*, maupun pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Selain itu, langkah stabilisasi nilai tukar juga diperkuat melalui inovasi kebijakan *twist operation* melalui pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan BI-7 *Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)* pada semester 2 tahun 2022 sebagai langkah *front loaded, pre-emptive* dan *forward looking* untuk merespons kenaikan tekanan inflasi inti dan ekspektasi inflasi ke depan. Suku bunga BI7DRR masih dipertahankan rendah sebesar 3,50% sampai dengan Juli 2022 didukung oleh inflasi inti yang terjaga rendah. Namun demikian, intensitas ketidakpastian global terus meningkat, kenaikan harga energi dan pangan global juga berlanjut sehingga mulai berdampak pada kenaikan inflasi inti dan prakiraannya ke depan. Bank Indonesia kemudian merespons peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi tersebut dengan menaikkan BI7DRR secara bertahap pada Agustus hingga Desember 2022 dengan total kenaikan sebesar 200 bps. Pada Desember 2022, BI7DRR mencapai sebesar 5,50%. Kenaikan suku bunga tersebut dilakukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang masih terlalu tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan tetap berada dalam kisaran  $3,0 \pm 1\%$ , dan di saat bersamaan juga dapat mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamentalnya. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kenaikan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi. Penguatan tersebut dilakukan melalui kenaikan struktur bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti tetap terjaga pada kisaran.

Koordinasi fiskal dan moneter juga terus diperkuat untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas. Dalam rangka memitigasi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, kebijakan fiskal Pemerintah berperan sebagai *shock absorber* dengan menambah alokasi subsidi dan dana kompensasi energi pada 2022 dari semula Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, sehingga mampu menahan kenaikan inflasi di Indonesia agar tidak setinggi kenaikan inflasi di berbagai negara lainnya.

Oleh karena itu, respons kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRR) juga tidak setinggi negara-negara lainnya, baik di negara maju seperti AS, Eropa, dan Inggris, maupun negara berkembang termasuk Brazil, India, dan Filipina. Selain itu, Bank Indonesia pada tahun 2022 juga telah mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total sebesar Rp273,11 triliun, sebagai komitmen untuk terus mendukung pendanaan APBN baik dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak pandemi Covid-19 maupun dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia mempererat koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dalam mengendalikan dampak rambatan penyesuaian harga BBM. Merespon penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022, koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi di Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat untuk mengelola dampak lanjutan penyesuaian harga BBM serta kenaikan harga pangan dunia. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai langkah nyata, termasuk diantaranya koordinasi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dukungan anggaran fiskal tambahan untuk menurunkan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat melalui Dana Insentif Daerah (DID) dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi, antara lain dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU), serta kebijakan stabilisasi lainnya untuk menahan kenaikan inflasi nasional.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan inovasi untuk pengendalian inflasi dan sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional, Bank Indonesia meluncurkan GNPIP sejak September 2022. GNPIP merupakan upaya pengendalian inflasi pangan dari sisi permintaan dan penawaran sehingga dapat mendukung daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Upaya ini menjadi bagian dari program TPIP-TPID yang juga merupakan *extra effort* pengendalian inflasi pangan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022. GNPIP dilakukan secara terintegrasi, *end-to-end*, inovatif dan berskala nasional yang sejalan dengan kerangka

strategis 4K yang dirumuskan pada tujuh (7) program unggulan yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia, yaitu: (i) optimalisasi anggaran K/L dan Pemda untuk Operasi Pasar (OP), Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan menjaga daya beli; (ii) perluasan Kerjasama Antardaerah (KAD); (iii) optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkut; (iv) memperkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya melalui gerakan tanam bersama serta replikasi *best practice* model bisnis hulu hilir; (v) peningkatan pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprota) demi mendukung pengembangan kluster pangan secara *end-to-end*; (vi) penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pelaksanaan GNPIP pada 2022 dilakukan di seluruh 46 wilayah kerja KPwDN selama Juli hingga Desember 2022, dengan capaian realisasi target seluruhnya lebih dari 100%. Realisasi target tertinggi adalah pelaksanaan OP yang disinergikan dengan pelaksanaan OP oleh Kementerian/Lembaga, yaitu sebesar 1038,5% dari target. Kegiatan OP pada 2022 telah dilaksanakan di sebanyak 2638 titik di 46 KPwDN untuk komoditas aneka cabai, bawang merah, beras, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam ras, serta gula pasir. Sementara itu, capaian program digitalisasi oleh KPwDN dalam rangka GNPIP memiliki realisasi yang paling rendah, meski tetap melebihi dari target yang ditetapkan. Pada 2022, capaian target digitalisasi sebesar 104,3% dengan pelaksanaan sebanyak 48 program di 40 KPwDN. Pelaksanaan program digitalisasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain masih rendahnya literasi digital petani sehingga memerlukan pendampingan yang intensif, biaya yang cukup mahal, dan ketersediaan infrastruktur teknologi pendukung yang minim.

### 2.1.2. Kebijakan Fiskal

Pada 2022, salah satu fokus kebijakan fiskal adalah menjaga stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat. APBN telah berperan secara optimal sebagai *shock absorber* di tengah tekanan risiko global yang tidak menentu. Tahun 2022 juga menjadi tahun yang krusial bagi APBN karena merupakan tahun terakhir dari mandat atas fleksibilitas defisit fiskal

di atas 3%. Untuk itu, Pemerintah dengan hati-hati merancang APBN untuk tetap waspada, antisipatif, dan responsif di tengah gejolak perekonomian, dengan tetap memerhatikan kesehatan APBN untuk memberikan pijakan bagi konsolidasi fiskal di 2023 serta menjaga keberlanjutan kebijakan fiskal untuk jangka menengah dan panjang.

APBN berperan penuh dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi nasional. Untuk menjaga tingkat permintaan, alokasi APBN dalam subsidi dan kompensasi bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat di 2022. Dalam perkembangannya, anggaran subsidi energi mengalami peningkatan yang signifikan didorong oleh peningkatan harga komoditas global, terutama minyak mentah. Alokasi belanja subsidi energi, yang awalnya sebesar Rp134,0 triliun pada APBN 2022, mengalami peningkatan realisasi menjadi Rp171,9 triliun. Kompensasi juga meningkat secara signifikan menjadi Rp379,3 triliun sebagai konsekuensi APBN yang berupaya memberikan bantalan bagi masyarakat. Sementara itu, realisasi belanja subsidi non-energi tercatat sebesar Rp80,9 triliun yaitu terdiri subsidi pupuk Rp29,8 triliun, subsidi *Public Service Obligation* (PSO) Rp6,3 triliun, subsidi kredit program Rp29,1 triliun, serta subsidi pajak Rp15,7 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam APBN 2022 guna memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Anggaran Perlinsos tersebut pada 2022 mencapai Rp461,6 triliun. Selain program perlinsos yang rutin diselenggarakan seperti penyaluran bantuan Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Pemerintah juga menggulirkan berbagai program tambahan untuk mengantisipasi dampak dari pergerakan harga komoditas. Program dimaksud antara lain adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp7,0 triliun (untuk 20,4 juta keluarga, April) serta BLT BBM sebesar Rp13,0 triliun (untuk 20,7 juta keluarga, September). Sementara itu, realisasi anggaran akselerasi Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) mencapai Rp 396,2 triliun, lebih rendah dari anggaran tahun-tahun sebelumnya dan berakhir di tahun 2022.

Dukungan anggaran terhadap pengendalian inflasi juga dilakukan hingga ke tingkat daerah. Pemerintah Daerah di 2022 diwajibkan untuk menganggarkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk program perlinsos selama bulan Oktober-Desember 2022 dengan total anggaran sebesar Rp3,5 triliun. Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tersebut, antara lain dialokasikan untuk program bantuan sosial, perluasan lapangan pekerjaan, serta subsidi sektor transportasi di daerah, termasuk dalam mengantisipasi dampak rambatan dari kebijakan penyesuaian harga BBM yang dilakukan pada awal September 2022. Pemerintah Daerah juga didorong untuk mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

**Tabel 2.1. Dukungan Kebijakan Fiskal dalam Pengendalian Inflasi 2022**

Uraian	APBN	Realisasi
Subsidi Energi	Rp134,0 T	Rp171,9 T
Subsidi Non-energi	Rp72,9 T	Rp80,9 T
• Pupuk	RP25,3 T	Rp29,8 T
• <i>Public Service Obligation</i>	Rp6,0 T	Rp6,3 T
• Kredit Program	Rp29,0 T	Rp29,1 T
• Pajak	Rp12,7 T	Rp15,7 T
Perlindungan Sosial	Rp431,5 T	Rp461,6 T
Dana Transfer Umum - Penanganan Inflasi	-	Rp3,5 T

Sumber: Kementerian Keuangan

### 2.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan Pemerintah diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam rangka memperkuat kebijakan pangan nasional, sejak 2022 perumusan kebijakan di bidang pangan menjadi kewenangan dari Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional melakukan koordinasi, perumusan dan penetapan serta pelaksanaan kebijakan bidang pangan sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk sejumlah bahan pangan strategis. Orkestrasi perumusan kebijakan pangan yang ditangani oleh satu lembaga pemerintah khusus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari implementasi kebijakan pangan nasional serta mampu menyeimbangkan kepentingan sisi hulu (petani) dan hilir (konsumen). Dalam pelaksanaan kebijakan pangan, Badan Pangan Nasional bersama Perum BULOG dan ID Food selaku operator, melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan, antara lain melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah, fasilitasi distribusi pangan dan intervensi stabilisasi pasokan pangan melalui gerakan pangan murah. Selain itu, upaya untuk menyempurnakan tata niaga dan regulasi pangan terus dilakukan secara paralel dalam rangka memperbaiki tata kelola kebijakan pangan nasional.

Pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara konsisten diarahkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung peningkatan ketahanan dan ketersediaan pangan yang bersumber dari dalam negeri. Berdasarkan publikasi *Global Food Security Indeks* (GFSI), ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan pada 2022 dibandingkan dengan periode 2020-2021, khususnya dari aspek keterjangkauan pangan (*affordability*) dengan indeks

ketahanan pangan 2022 berada di level 60,2. Hal ini didukung oleh koordinasi dan perumusan kebijakan pangan yang semakin kuat, sehingga upaya perbaikan pasokan dan distribusi pangan antara lain melalui perbaikan infrastruktur pertanian dan distribusi, penguatan produksi pangan, optimalisasi anggaran Pemerintah, dapat memberikan dampak positif bagi kesinambungan pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kecukupan produksi, ketersediaan stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan dikelola secara optimal sehingga meskipun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antarwilayah, namun pangan harus tersedia secara cukup, baik jumlah dan jenisnya, serta berkelanjutan sesuai permintaan.

Penyempurnaan tata kelola dan kebijakan pangan nasional didukung oleh peningkatan ketersediaan data pangan yang berkualitas dan penguatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Tahun 2022 menandai pemanfaatan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) yang menjadi acuan bagi penetapan kebijakan ekspor dan impor sejumlah komoditas strategis, termasuk pangan. Sinan NK merupakan sebuah sistem yang terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga yang memuat kebutuhan dan ketersediaan pasokan komoditas pangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi penetapan kebijakan dan strategi penguatan ketahanan pasokan domestik. Dalam implementasi tahap I, pemanfaatan Sinan NK telah dilakukan pada penetapan kebijakan impor dan ekspor komoditas pangan beras, gula, daging lembu, garam, dan perikanan. Pada implementasi tahap II, implementasi Sinan SK akan mencakup komoditas jagung dan bawang putih. Selain itu, penguatan ketahanan pasokan pangan domestik juga didukung oleh penerbitan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mengamankan penyelenggaraan CPP

yang lebih luas yaitu mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging sapi dan kerbau (daging ruminansia), gula konsumsi, minyak goreng dan ikan. Sebagai tahap awal, penyelenggaraan CPP difokuskan pada beras, jagung dan kedelai dengan mengoptimalkan peran Perum BULOG dan ID Food sebagai pengelola. Menindaklanjuti terbitnya Perpres Nomor 125 Tahun 2022, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan peraturan yang mengamankan penyelenggaraan CPP khususnya beras, jagung, kedelai yaitu Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perbadan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), dan Perbadan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP). Regulasi tersebut mengatur aspek pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CBP, CJP dan CKP sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait.

Penugasan pengelolaan cadangan pangan kepada Perum BULOG dan ID Food memberikan dampak psikologis dan ekspektasi positif kepada pasar terhadap kesinambungan pasokan pangan strategis. Cadangan pangan yang dikelola dengan baik dapat mendukung terjaganya harga pangan di level yang terjangkau bagi masyarakat, serta meminimalisir potensi permainan pasokan dan harga pangan oleh pelaku usaha. Selain sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan juga berperan sebagai salah satu pendukung pertumbuhan perekonomian dan stabilitas keamanan Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan merupakan hal yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dan efisien agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pangan tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat namun juga telah diimplementasikan pada pemerintah daerah sampai di tingkat kabupaten dan desa. Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah tetap mengupayakan pembentukan, penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan sebagai wujud komitmen untuk menjamin penyediaan pangan.

Perum BULOG bersama dengan ID Food melakukan sejumlah upaya stabilisasi pasokan pangan pada 2022, antara lain pada komoditas beras, daging

sapi, daging lembu, dan daging ayam ras. Penugasan kepada Perum BULOG untuk komoditas beras dan daging kerbau dilakukan melalui mekanisme tambahan anggaran pemerintah maupun melalui mekanisme bisnis. Seiring dengan peningkatan tekanan inflasi beras, upaya stabilisasi pasokan dan harga beras dilakukan melalui penguatan dan perluasan intervensi pasokan beras dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasar-pasar melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Sepanjang semester II tahun 2022, Perum BULOG telah melakukan intervensi pasokan beras sebesar 1,041 juta ton beras dengan rata-rata penyaluran KPSH bulanan mencapai 175,59 ribu ton per bulan. Selain itu, dalam rangka memperkuat tingkat CBP yang telah berada di bawah target 1-1,5 juta ton, Pemerintah menetapkan penambahan pasokan beras melalui impor yang direalisasikan pada Desember 2022 hingga Februari 2023, atau sebelum panen raya berlangsung. Untuk mendukung pemenuhan pasokan daging sapi domestik, dilakukan percepatan realisasi impor daging sapi maupun daging kerbau beku penugasan kepada Perum BULOG dan ID Food, serta upaya diversifikasi negara importir daging sapi. Pada 2022, Perum BULOG memperoleh penugasan impor daging kerbau beku sebesar 120 ribu ton. Minimnya ketersediaan logistik perkapalan dan tingginya kepadatan pelabuhan transit memberikan tantangan bagi pemenuhan pangan melalui pasokan impor, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman daging kerbau beku. Dalam rangka merespon wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan wabah PMK yang bertugas antara lain melakukan upaya pengendalian mobilisasi ternak terdampak PMK dan mempercepat perluasan vaksinasi PMK di bawah koordinasi bersama Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk daging ayam ras, upaya stabilisasi harga dilakukan di tingkat produsen. Kondisi *oversupply* daging ayam ras mengakibatkan rendahnya harga *live bird* di tingkat produsen. Untuk menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat, Badan Pangan Nasional bersama dengan ID Food melakukan langkah fasilitasi distribusi daging ayam ras dari daerah surplus ke daerah defisit dan penyerapan *live bird* sebagai cadangan pangan pemerintah. Untuk stabilisasi harga daging dan telur ayam ras, Pemerintah juga melakukan upaya pengendalian produksi, fasilitasi distribusi, dan peningkatan serapan *livebird*. Ke depan, diperlukan kebijakan untuk mendorong penataan industri

perunggasan yang berkeadilan sehingga peternak mandiri dapat ikut tumbuh dan berkembang bersama perusahaan peternakan yang terintegrasi.

Merespon tekanan inflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis seperti minyak goreng, kedelai, dan jagung akibat kenaikan harga global, Pemerintah menempuh sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan stabilisasi harga pangan melalui penguatan pasokan impor, subsidi selisih harga, dan upaya memprioritaskan penyediaan minyak goreng domestik. Untuk minyak goreng, Pemerintah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan produksi *Crude Palm Oil* (CPO) untuk *Domestic Market Obligation* (DMO). Selain itu, ID Food bersama Perum BULOG turut memberikan dukungan upaya stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng melalui penguatan distribusi minyak goreng curah, khususnya ke wilayah Indonesia bagian timur. Untuk mengamankan pasokan kedelai yang didominasi oleh pasokan dari impor, Perum BULOG ditugaskan melakukan importasi kedelai dan memberikan subsidi selisih harga pembelian bahan baku kedelai kepada pengrajin tempe dan tahu yang pelaksanaannya juga melibatkan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) sebagai mitra untuk penyediaan data anggota koperasi yang menjadi target penerima bantuan. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan kedelai produksi lokal, Kementerian Pertanian telah menginisiasi penanaman kedelai pada 2022 seluas 600 ribu ha dengan target produksi yang diperkirakan mencapai 900 ribu ton. Untuk mengatasi peningkatan harga pakan yang mengakibatkan tekanan pada biaya input produksi telur ayam ras, Perum BULOG ditugaskan untuk melakukan penyediaan dan distribusi jagung pakan ternak bagi peternak ayam petelur mikro-kecil melalui Koperasi Peternak Sasaran (KPS) sejumlah 50 ribu ton.

Penguatan kebijakan pangan nasional didukung pula oleh penyempurnaan sejumlah regulasi di bidang pangan. Sejumlah ketentuan diperbarui antara lain terkait penetapan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tingkat Produsen) dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP Tingkat Konsumen) agar dapat disesuaikan dengan perkembangan biaya produksi dan biaya distribusi. Pada 2022, Badan Pangan Nasional telah menetapkan ketentuan mengenai HAP bagi komoditas jagung, telur ayam ras, daging ayam ras, kedelai, bawang merah,

cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi. Selain itu, telah diterbitkan pula ketentuan untuk memperkuat penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah baik dari sisi pengadaan, pengelolaan, penyelenggaraan penyaluran dan jenis cadangan pemerintah yang kini mencakup beras, jagung dan kedelai. Lebih lanjut, seiring dengan potensi tekanan inflasi pangan yang masih membayangi maka program Strategi Pengendalian Harga Pangan (SPHP) turut diperkuat melalui penerbitan ketentuan penyelenggaraan stabilisasi pasokan dan harga beras, jagung, dan kedelai di tingkat konsumen yang menjadi acuan detail bagi Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan intervensi pasokan pangan yang lebih tepat waktu ketika terjadi peningkatan fluktuasi harga. Dengan lebih kuatnya sisi pengelolaan dan ketentuan kebijakan pangan nasional, maka diharapkan stabilisasi pasokan dan harga dapat tercapai secara berkelanjutan sehingga kebijakan pangan nasional dapat difokuskan pada tujuan selanjutnya yaitu peningkatan kualitas dan keragaman pangan nasional.

Kebijakan ketersediaan pangan pada 2022 diupayakan melalui peningkatan produksi dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem produksi nasional yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal, pengembangan efisiensi usaha pangan, pengembangan teknologi produksi pangan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan serta pengembangan lahan produktif. Salah satu bantuan dari pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi ialah melalui program Kartu Tani. Kartu Tani diinisiasi oleh Pemerintah sekaligus juga sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KPK dan BPK agar pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran, yaitu diberikan kepada petani yang berhak menerima. Jumlah provinsi yang mengimplementasikan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi sebanyak 29 provinsi. Perkembangan Kartu Tani per tanggal 31 Desember 2022 adalah tercetak Kartu Tani sebanyak 15,9 juta (100%), terdistribusi sebanyak 10 juta (65,54%), dan dipakai transaksi dari terdistribusi sebanyak 3 juta (30,28%). Pemakaian Kartu Tani masih rendah, sehingga perlu percepatan implementasi Kartu

Tani nasional yang lebih menyeluruh. Jika dilihat dari sisi hilir, ketersediaan pangan secara umum cukup selama 2022 baik melalui pemenuhan dalam negeri maupun pengadaan dari luar negeri walaupun terdapat peningkatan fluktuasi ketersediaan pangan antarwaktu.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pangan serta agribisnis, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendorong pelaksanaan program-program strategis yang mendukung kebijakan pangan 2022. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain ialah: (i) stabilisasi harga dan pasokan pangan; (ii) pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor; (iii) pengembangan kemitraan *closed loop* agribisnis hortikultura; (iv) peremajaan sawit rakyat; (v) peremajaan karet rakyat; (vi) pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak; (vii) pengembangan industri rumput laut; (viii) transformasi kebijakan subsidi pupuk; (ix) pengendalian alih fungsi lahan sawah; serta (x) pengembangan korporasi petani dan nelayan.

#### 2.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi oleh Pemerintah khususnya pada semester 1 tahun 2022 masih diarahkan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Harga minyak global khususnya *Indonesian Crude Price* (ICP) berada dalam tren meningkat sejak semester 2 tahun 2021 dan mencapai level tertinggi pada Juni, yaitu sebesar USD117,62 per barel (rerata), dan secara rerata 2022 mencapai sebesar USD97 per barel. Peningkatan harga minyak dunia tersebut mendorong harga keekonomian komoditas energi domestik, sehingga memberikan tekanan bagi Badan Usaha untuk menyesuaikan harga jual domestik. PT. Pertamina telah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan LPG nonsubsidi. Sebagaimana periode sebelum pandemi Covid-19, harga BBM nonsubsidi yaitu jenis Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, telah secara rutin dilakukan penyesuaian harga sejak akhir 2021 dan berlanjut selama 2022 sejalan dengan pergerakan harga keekonomiannya. LPG nonsubsidi antara lain jenis 5,5 kg dan 12 kg juga telah disesuaikan sejak akhir 2021 hingga Agustus 2022. Namun

demikian, Pemerintah masih mempertahankan harga jual sejumlah komoditas energi yang mendapatkan subsidi dan/atau kompensasi oleh APBN, yaitu BBM jenis Solar dan Peralite, serta tarif listrik golongan rumah tangga (RT), industri, dan bisnis. Pemerintah menilai bahwa masyarakat masih dibebani oleh kenaikan harga pangan pada semester 1-2022, sehingga Pemerintah perlu mendukung daya beli lebih lanjut. Selain komoditas energi dan/atau kompensasi, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina juga masih dipertahankan mengingat pangsa konsumsinya yang juga cukup besar. Setelah Pemerintah resmi menghapus BBM jenis Premium dan memutuskan Peralite menjadi BBM yang mendapatkan kompensasi pada April 2022, Pertamina menjadi BBM jenis bensin terbesar kedua yang dikonsumsi oleh masyarakat setelah Peralite.

Tekanan harga minyak yang terus meningkat dan telah jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi awal APBN 2022 yang sebesar USD63 per barel kemudian mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan harga jual energi subsidi dan/atau kompensasi pada semester 2 tahun 2022. Kenaikan harga keekonomian menyebabkan deviasi dengan harga jual komoditas energi subsidi dan/atau kompensasi semakin lebar, sehingga meningkatkan beban fiskal Pemerintah. Sebagai langkah awal untuk mengurangi beban fiskal tersebut, Pemerintah menyesuaikan tarif listrik nonsubsidi khusus rumah tangga (RT) golongan 3500 VA ke atas sebesar 9% pada Juli 2022. Kebijakan penyesuaian tarif listrik yang hanya dikenakan pada RT golongan mampu tersebut dinilai telah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih dan mengedepankan alokasi subsidi serta kompensasi energi yang adil serta tepat sasaran. Demi menjaga daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan serta mendukung pemulihan pelaku usaha, tarif listrik untuk golongan RT < 3500 VA, golongan industri, dan bisnis masih dipertahankan oleh Pemerintah. Pada September 2022, Pemerintah melakukan penyesuaian harga jual Solar dan Peralite masing-masing sebesar 30%, sementara untuk Pertamina sebesar 16%. Kebijakan penyesuaian harga energi subsidi dan/atau kompensasi tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan, serta melindungi masyarakat

miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan harga pangan dan energi. Penyesuaian harga jual BBM juga diiringi dengan kebijakan pengalihan subsidi BBM melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2% dana transfer umum (DTU) untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang solid bagi transformasi subsidi yang lebih efisien dan berkeadilan.

Kebijakan energi juga diarahkan untuk terus mendukung ketahanan energi khususnya kebijakan transisi energi hijau. Pada 2022, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang memprioritaskan pengembangan pembangkit Energi Terbarukan (EBT) dan menghentikan pembangunan PLTU kecuali untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan sebelumnya dan memiliki dampak keekonomian yang strategis. Selain itu, Pemerintah juga membuat inisiatif baru dengan meluncurkan *Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform* yang diharapkan dapat memobilisasi pembiayaan untuk mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau.

**Boks**  
**1.**

**Upaya Tambahan (*Extra Effort*) Pengendalian Inflasi Pada Masa Penyesuaian harga BBM**

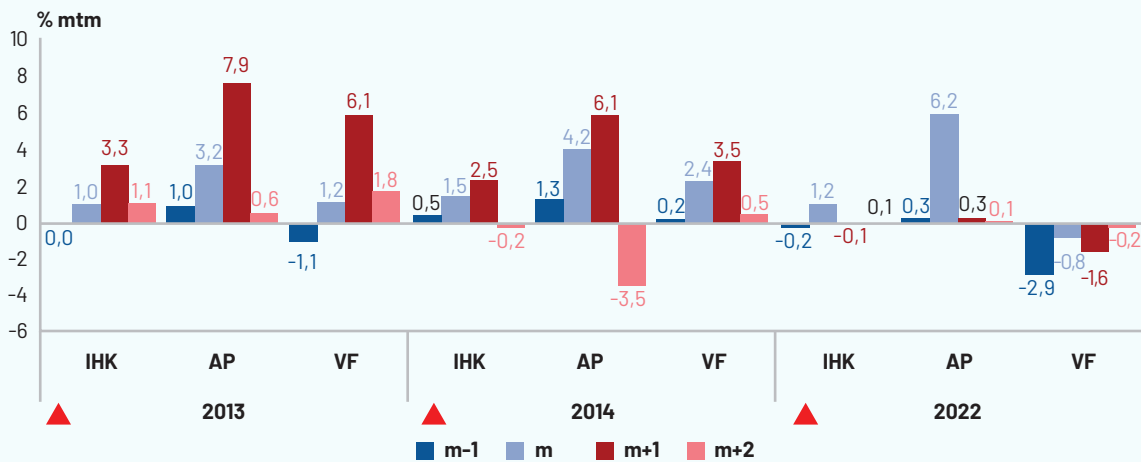
Seiring dengan tingginya tekanan harga global, terutama komoditas energi, Pemerintah memutuskan perlunya menempuh kebijakan penyesuaian harga energi domestik. Sepanjang Januari-Agustus 2022, harga BBM domestik masih dipertahankan untuk menjaga aktivitas ekonomi rumah tangga dan industri. Namun demikian, dengan tingginya harga minyak mentah, Pemerintah memutuskan kebijakan penyesuaian harga BBM Solar, Pertalite, dan Pertamax guna meningkatkan kualitas belanja subsidi dan kompensasi energi serta ketepatan sasaran penerima. Kebijakan ini dilakukan melalui berbagai pertimbangan yang sangat panjang, terutama dengan mempertimbangkan perumusan kebijakan dengan dampak distorsi pada ekonomi yang paling minimal karena kondisi ekonomi domestik yang masih dalam proses pemulihan.

Pelaksanaan kebijakan yang tidak populer sangat membutuhkan persiapan dan pertimbangan yang sangat matang, terlebih lagi kebijakan penyesuaian harga BBM. Secara historis, pelaksanaan kebijakan ini akan mendorong kenaikan inflasi yang cukup tinggi. Sementara itu, kebijakan pada 2022 masih

dalam periode akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Di tengah tekanan harga global dan risiko terhadap APBN, Pemerintah harus menempuh kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara umum serta situasi sosial yang kondusif didukung dengan komunikasi publik yang baik. Alokasi subsidi dan kompensasi energi harus mengedepankan asas keadilan dan diterima secara tepat sasaran.

Jika dilihat secara historis, pelaksanaan kebijakan penyesuaian BBM mendorong kenaikan harga umum secara signifikan. Hal ini terlihat juga pada kenaikan harga VF pada periode tahun 2013-2014. Dampak penyesuaian harga BBM juga tertransmisi pada naiknya inflasi VF. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah mempelajari bahwa dampak rambatan tersebut perlu untuk diantisipasi, terutama di tengah kondisi tingkat konsumsi rumah tangga yang masih dalam proses pemulihan akibat tekanan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah mempertimbangkan *timing* dan besaran penyesuaian dengan matang yang menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan guna mengelola konsekuensi dan risiko dampaknya.

**Grafik 2.1. Perbandingan Inflasi Bulanan pada Masa Penyesuaian Harga BBM**



Sumber: BPS

Pelaksanaan kebijakan penyesuaian harga pada 2022 diputuskan dilaksanakan di masa harga pangan terkendali atau bahkan pada masa deflasi sehingga mengurangi dampak rambatan ekspektasi yang berlebihan. Hal ini karena BBM merupakan komoditas krusial dalam proses produksi dan distribusi.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan hasil kerja keras bersama seluruh elemen tanpa terkecuali. Seluruh pemangku kepentingan melakukan kebijakan yang responsif sesuai dengan wewenang guna menciptakan bauran kebijakan yang tepat dan terukur. Kebijakan fiskal yang terus diperkuat, baik di tingkat pusat dan daerah, serta pelaksanaan kebijakan di sektor riil yang terintegrasi sangat didukung oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Koordinasi dan sinergi menjadi kunci dalam pengendalian inflasi di masa penyesuaian harga BBM. Kebijakan fiskal yang berperan penuh sebagai *shock absorber* semakin diperkuat dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah yang mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga dan fasilitasi atau subsidi transportasi sehingga dampak rambatan dapat terminimalisasi. Sebagai instrumen dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, Pemerintah tentunya juga memberikan bantalan kebijakan untuk mengantisipasi dampak terhadap tingkat kemiskinan dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah. Sebagaimana arahan Presiden, dalam rangka menekan dampak inflasi dari kebijakan penyesuaian BBM, disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, daerah diwajibkan mengalokasikan sebesar 2% Dana Transfer Umum (DTU) dalam rangka penanganan dampak inflasi sebagai tambahan bantalan sosial untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlintas tambahan. Hal ini juga menjadi perhatian karena pada bulan September bertepatan dengan masa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang juga menangkap angka kemiskinan.

Koordinasi dan sinergi kebijakan pengendalian inflasi di pusat dan daerah yang selama ini sudah solid juga terus diperkuat. Menteri Dalam Negeri secara berkala menyelenggarakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi di daerah. Dalam rapat koordinasi yang dimulai sejak 24 Oktober 2022 tersebut, Menteri Dalam Negeri memberikan arahan terkait langkah-langkah konkrit yang harus di laksanakan daerah untuk menurunkan inflasi yakni: (i) melakukan operasi pasar murah; (ii) melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; (iii) kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; (iv) gerakan menanam tanaman cepat panen seperti cabai dan bawang merah; (v) memanfaatkan anggaran BTT untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan pengendalian inflasi; (vi) optimalisasi anggaran APBD untuk dukungan transportasi. Dalam rangka sarana pemantauan atas kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal ini TPID, BPS dan Kementerian Perdagangan melakukan penghitungan Indeks Pergerakan Harga (IPH) pada 20 (dua puluh) komoditas. Data tersebut digunakan sebagai *early warning* bagi TPID untuk dapat melakukan intervensi atas komoditas yang berpotensi sebagai penyumbang inflasi pada bulan berikutnya.

Lebih lanjut, program kebijakan pengendalian inflasi yang sudah berjalan sebelumnya terus ditingkatkan pelaksanaannya. Kebijakan tersebut antara lain ialah perluasan kerjasama antardaerah, perluasan gerakan tanam pangan pekarangan khususnya untuk komoditas cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, pemantauan dan penguatan data pangan secara detail, pemantauan/sidak pasar bersama Satgas Pangan, maupun optimalisasi pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga dan operasi pasar.

### 2.1.5. Kebijakan Konektivitas

Penguatan konektivitas wilayah ditempuh untuk menurunkan disparitas harga antarwilayah. Arah kebijakan pembangunan konektivitas berdasarkan Perpres No 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 mencakup: (i) pembangunan jalan tol baru, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (ii) penyediaan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (*food estate*, industri dan pariwisata); (iii) implementasi *Major Project* Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yang meliputi standarisasi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (iv) peningkatan kapasitas bandara primer dan aktivitas jaringan *hub and spoke* penerbangan; (v) penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) termasuk keperintisan, program tol laut bersubsidi dan jembatan udara; serta (vi) peningkatan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemanfaatan skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) untuk peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan daerah serta DAK Bidang Transportasi Perairan untuk rehabilitasi prasarana pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi perairan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan konektivitas yang mendukung pengendalian inflasi dalam strategi kunci 4K diarahkan untuk mendukung Kelancaran Distribusi. Berbagai kebijakan konektivitas tersebut untuk mendukung Kelancaran Distribusi tersebut di antaranya ialah pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE); pembangunan

jalan dan jembatan; perbaikan bandara; peningkatan jalur kereta api (KA); serta peningkatan infrastruktur logistik. Peningkatan konektivitas wilayah ditempuh untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Terwujudnya konektivitas yang baik diharapkan dapat menopang perekonomian nasional, khususnya jalur utama logistik dan meningkatkan aksesibilitas daerah 3T. Peningkatan konektivitas pada jalur darat diwujudkan dengan selesainya pembangunan jalan trans pada 18 pulau 3T serta Jalan Trans Papua trase Merauke-Sorong yang juga mendukung pengendalian inflasi. Selain itu, pembangunan jalan tol yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional yang didetailkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 21 tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional mencantumkan sejumlah 53 ruas Jalan Tol menjadi proyek yang didukung percepatan untuk mewujudkan peningkatan konektivitas jalur darat di Indonesia.

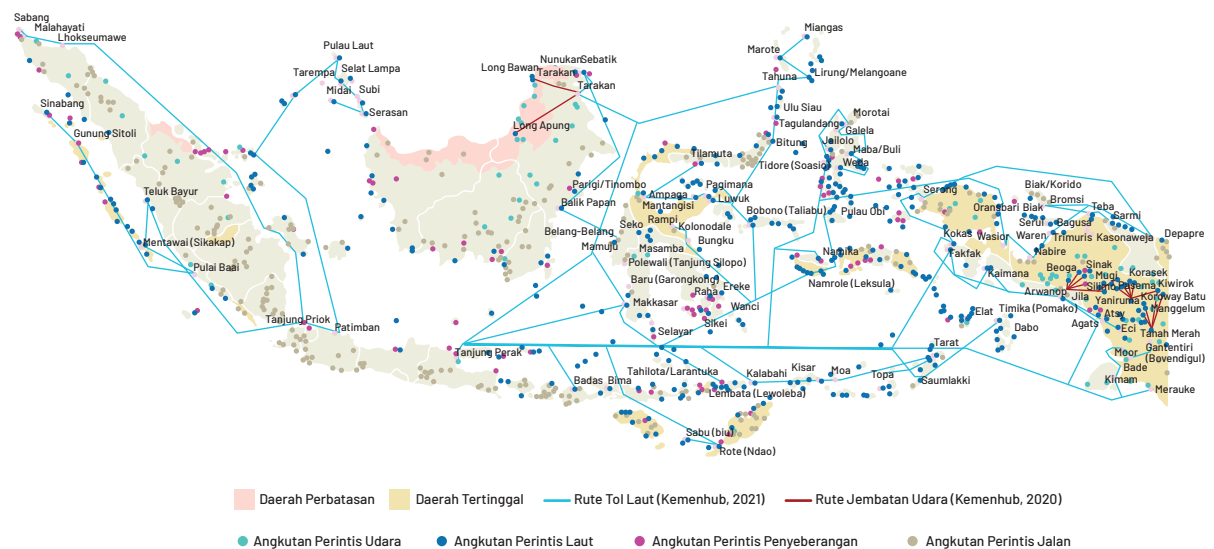
Upaya pengendalian inflasi untuk mendukung Kelancaran Distribusi juga dilakukan dengan meningkatkan konektivitas laut, darat melalui kereta api, dan udara. Konektivitas laut diarahkan melalui peningkatan produktivitas peti kemas melalui *Integrated Port Network* (IPN). Sementara itu, pengembangan jaringan kereta api dilakukan melalui peningkatan angkutan penumpang antarkota khususnya kota-kota besar, pengembangan angkutan perkotaan pada jaringan yang berada di kawasan metropolitan, serta pengembangan angkutan logistik. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi di kedua kota metropolitan. Disamping itu, dilakukan juga pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan, penyediaan dana *Public Service Obligation* (PSO), dan pemberian subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial serta subsidi operasi AU kargo.

Implementasi peningkatan konektivitas didorong melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan memanfaatkan pendanaan kreatif (*creative financing*), baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), maupun alternatif pendanaan lainnya.

Pembangunan konektivitas diarahkan melalui penyediaan layanan keperintisan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah 3T. Untuk mendukung kelancaran distribusi sektor angkutan jalan, layanan perintis angkutan jalan ditingkatkan dari 101 rute pada 2005 menjadi 310 rute pada 2019 dan ditargetkan mencapai 340 rute pada 2024.

Penguatan sektor penyeberangan dilakukan dengan mendorong peningkatan layanan keperintisan angkutan penyeberangan dari 65 rute pada 2005 menjadi 213 rute pada 2019 dan diperkirakan mencapai 335 rute pada 2024. Penyelenggaraan subsidi AU perintis ditingkatkan dari 2019 sebanyak 190 rute pada 2019 menjadi 116 rute pada 2024. Pada 2021, sebanyak 73 trayek perintis dioperasikan, jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 113 trayek pada 2024. Untuk mengurangi kesenjangan harga di wilayah 3T, Pemerintah menyelenggarakan program tol laut yang disinergikan dengan program 37 rute jembatan udara di Papua. Peta Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam upaya penurunan disparitas harga sebagaimana pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.1. Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam Upaya Penurunan Disparitas Harga**



- Jalur Utama Tol Laut dimanfaatkan untuk mendukung distribusi barang menuju pelabuhan pangkal subsidi Tol Laut
- Pemanfaatan perintis laut, **pelayaran rakyat**, dan jembatan udara untuk mengangkut barang sampai ke masyarakat
- Mengoptimalkan muatan angkutan balik melalui integrasi dengan angkutan hasil perikanan
- Pemanfaatan layanan keperintisan angkutan udara, laut, **penyeberangan** dan jalan terintegrasi dengan program tol laut dan jembatan udara

Sumber: Kementerian Perhubungan

### 2.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Pandemi Covid-19 masih berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan, walaupun kondisinya menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah berhasil diturunkan dari 6,49% pada 2021 menjadi 5,86% atau 8,42 juta orang pada 2022, meskipun masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan TPT sebelum pandemi. Pekerja yang terkena dampak pandemi dalam bentuk pengurangan jam kerja, semakin berkurang sehingga jumlah pekerja dengan kategori setengah penganggur menurun menjadi 6,32% pada 2022 dibandingkan dengan 2021. Terdapat 4,15 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran (240 ribu orang), bukan angkatan kerja (320 ribu orang), tidak bekerja (110 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (3,48 juta orang). Dampak pandemi pada upah pekerja/buruh sudah semakin berkurang. Rata-rata upah pekerja/buruh mencapai Rp3,07 juta, meningkat sebesar 12,22% dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar Rp2,74 juta. Secara wilayah, penurunan upah terjadi di Provinsi Maluku Utara (1,94%), Aceh (0,62%) dan Nusa Tenggara Timur (0,18%) (Sakernas Agustus 2022).

Kebijakan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 masih berlanjut di 2022. Program Kartu Prakerja tetap dilaksanakan dengan skema "semi-bantuan sosial" dengan total bantuan sebesar Rp3,55 juta per orang yang diprioritaskan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan untuk membantu biaya hidup dan mencari pekerjaan. Terdapat sekitar 4,98 juta orang penerima Kartu Prakerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp17,84 triliun atau sekitar 99,12%. Selain itu, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga berlanjut di 2022 sebagai bentuk bantalan sosial bagi pekerja dengan total bantuan sebesar Rp600 ribu untuk pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (sampai dengan Juli 2022) dengan upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota jika upah minimumnya lebih dari

Rp3,5 juta. BSU berhasil disalurkan kepada 12.111.906 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,26 triliun atau sebesar 94,59% (Desember 2022). Pemerintah juga memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak dengan mulai menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Februari 2022. Dari sekitar 12,8 juta orang peserta aktif Program JKP, sebanyak 10.864 orang telah mendapat manfaat uang tunai, 13.720 orang telah mendapat manfaat akses informasi, dan 104 orang telah mendapat pelatihan kerja (Desember 2022).

Kebijakan pengupahan, khususnya upah minimum telah disesuaikan dengan ketentuan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan aturan turunannya yaitu PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Penetapan kenaikan upah minimum didasarkan pada formula dengan variabel ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat diprediksi sehingga dapat memberikan kejelasan bagi pengusaha/pemberi kerja dalam merencanakan investasi tahunannya. Selain itu, terdapat pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan usaha kecil yang upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan syarat tertentu. Pada akhir 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, termasuk Klaster Ketenagakerjaan. Perpu tersebut memperjelas beberapa ketentuan upah minimum sebelumnya, seperti syarat penetapan upah minimum kabupaten/kota, formula perhitungan upah minimum dengan menambahkan variabel indeks tertentu, serta penegasan bahwa struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Perbaikan pada ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian upah minimum sehingga dapat mendorong tumbuhnya produktivitas perusahaan/pemberi kerja, melindungi pekerja, dan tetap menjaga daya beli masyarakat.

## 2.2. Program Kerja TPIP 2022

### 2.2.1. Keterjangkauan Harga

#### 2.2.1.1. Review Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Untuk menjaga keterjangkauan harga, selama 2022 telah dilakukan berbagai penyesuaian harga eceran tertinggi dan harga acuan untuk komoditas pangan strategis. Penyesuaian harga eceran dan acuan tersebut ditetapkan untuk komoditas minyak goreng, gula, jagung, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Keseluruhan ketentuan yang diterbitkan ini bertujuan untuk meningkatkan Keterjangkauan Harga komoditas pangan strategis bagi masyarakat. Untuk komoditas minyak goreng, Pemerintah menerbitkan Permendag 49 Tahun 2022 mengenai Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat sebesar Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg baik dalam bentuk kemasan atau curah. Untuk komoditas gula, Pemerintah menerbitkan tiga ketentuan berupa Surat Edaran (SE) terkait harga acuan yaitu: (i) SE Dirjen PDN No 06 Tahun 2022 terkait harga acuan penjualan gula oleh ritel modern ke konsumen akhir paling tinggi Rp13.500/kg; (ii) SE Dirjen PDN No 10 Tahun 2022 terkait harga acuan penjualan gula di wilayah Indonesia Timur oleh ritel modern ke konsumen akhir paling tinggi sebesar Rp14.000/kg untuk gula curah dan paling tinggi sebesar Rp14.500/kg untuk gula kemasan; dan (iii) SE Bersama Bapanas dan Dirjen

PDN No 65.1/Pangan/06/2022 dan No. 17 Tahun 2022 terkait pembelian GKP ditingkat petani dengan harga paling sedikit Rp11.500/kg yang berlaku mulai 17 Juni 2022 sampai 31 Desember 2022. Sementara itu untuk komoditas jagung, daging ayam ras, dan telur ayam ras, telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen komoditas jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

#### 2.2.1.2. Peningkatan Stabilisasi dan Pengawasan Harga Maupun Stok Bahan Pokok

Pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok. Salah satu indikator stabilisasi harga barang pokok dihitung melalui koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok yang dihitung dalam 2 kelompok yaitu kelompok antarwaktu dan kelompok rumpun komoditi. Kelompok rumpun komoditi dibagi menjadi 4 antara lain: (i) rumpun komoditi pertanian (beras dan kedelai); (ii) hortikultura (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah); (iii) peternakan dan perikanan (daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, dan ikan kembung); dan (iv) industri (minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir). Pada 2022, koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu mencapai sebesar 6,53%, atau sedikit di atas target 5,9%. Selain itu, capaian koefisien variasi harga bahan pokok berdasarkan rumpun komoditi pada 2022 cenderung beragam (Tabel 2.2).

**Tabel 2.2. Capaian Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Berdasarkan Rumpun Komoditi Tahun 2022**

Rumpun Komoditi	Target	Capaian	Indikasi
Bahan Pokok Hasil Pertanian	2,9%	2,58%	Harga terkendali
Bahan Pokok Hasil Hortikultura	23%	24,23%	Harga fluktuatif
Bahan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan	5,9%	4,46%	Harga terkendali
Bahan Pokok Hasil Industri	4,9%	7,79%	Harga fluktuatif

Sumber: Kementerian Perdagangan

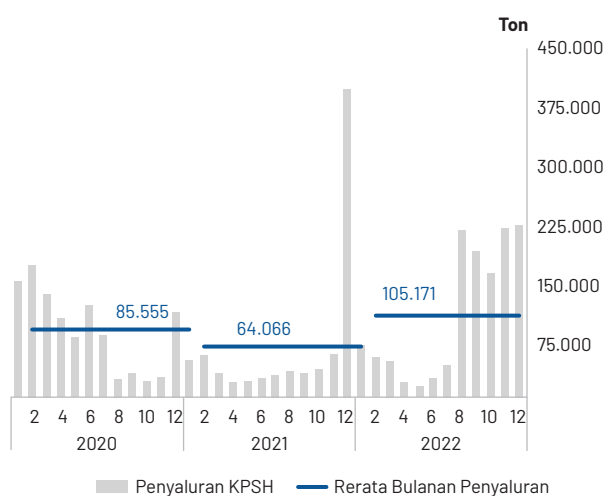
Capaian koefisien variasi harga bahan pokok yang beragam tersebut di atas disebabkan oleh berbagai faktor. Bahan pokok hasil pertanian dan bahan pokok hasil peternakan serta perikanan masih di bawah target maksimal, atau mengindikasikan harga yang terkendali sepanjang 2022, yang antara lain didukung oleh upaya Pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga. Sementara itu, bahan pokok hasil hortikultura dan bahan pokok hasil industri di atas target maksimal, atau mengindikasikan harga yang cenderung fluktuatif. Khusus bahan pokok hortikultura, perkembangan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya fenomena La Nina pada Juni, Juli, dan Desember 2022, yaitu dimana curah hujan tinggi yang berpengaruh terhadap produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga bahan pokok hasil hortikultura. Namun demikian, harga cabai dan bawang merah pada Agustus hingga November 2022 mengalami penurunan karena produksi mulai berangsur normal. Adanya fluktuasi harga setiap bulan tersebut kemudian menyebabkan koefisien variasi harga bahan pokok hortikultura tersebut tinggi. Sementara itu, koefisien variasi bahan pokok hasil industri yang lebih tinggi dari target maksimal antara lain akibat adanya transmisi harga gandum internasional yang melonjak tajam sepanjang semester pertama tahun 2022, dan penurunan harga minyak goreng di awal tahun 2022, namun kembali mengalami kenaikan harga pada November 2022. Selain upaya stabilisasi harga oleh Pemerintah, kegiatan monitoring untuk harga maupun pasokan di daerah juga terus dilakukan oleh satuan tugas (satgas) pangan yang dikoordinasikan oleh Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Sepanjang 2022, kegiatan monitoring di daerah telah terlaksana sebanyak 4 kali (termasuk pada saat HBKN). Secara umum, kegiatan monitoring telah berjalan dengan baik, terutama untuk memastikan tidak ada gangguan dan/atau penimbunan pasokan, serta permainan harga oleh oknum yang dapat meningkatkan harga lebih lanjut terutama saat periode HBKN dan/atau pascapenyesuaian harga BBM bersubsidi.

### 2.2.1.3. Optimalisasi Kegiatan Operasi Pasar/ Kegiatan Pasokan dan Stabilisasi Harga

Pelaksanaan program Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) sepanjang 2022 secara kontinu dilaksanakan untuk meningkatkan keterjangkauan harga bahan pangan pokok bagi masyarakat. Program KPSH selain bertujuan untuk menjaga stabilitas

harga beras tingkat konsumen juga bertujuan antara lain untuk (i) menjadi salah satu bentuk intervensi Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan beras setiap saat pada harga maksimal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing wilayah; (ii) menjadi outlet dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga stok tetap terjaga pada kuantitas yang ditugaskan (1-1,5 juta ton) dan berkualitas baik didukung perputaran stok yang reguler; dan (iii) memberi peluang bagi Pemerintah untuk memberikan jaminan harga dan pasar hasil panen petani melalui penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG. Pelaksanaan program KPSH beras medium tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan CBP yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 127/M-DAG/PER/12/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga dan Surat Menteri Perdagangan RI No. 10/M-DAG/SD/1/2022 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Berdasarkan surat Menteri Perdagangan tersebut, Perum BULOG diberikan amanat untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Sepanjang semester II tahun 2022, Perum BULOG telah melakukan intervensi pasokan beras sebesar 1,04 juta ton beras dengan rata-rata penyaluran KPSH bulanan mencapai 175,59 ribu ton per bulan. Secara keseluruhan tahun 2022, Perum BULOG telah menyalurkan CBP dalam rangka pelaksanaan KPSH sebesar 1,25 juta ton.

**Grafik 2.2. Penyaluran KPSH Bulanan Tahun 2020 - 2022**



Sumber: Perum Bulog

#### 2.2.1.4. Penggunaan Anggaran Cadangan Stabilisasi Harga Pangan

Untuk mendapat keterjangkauan harga pada 2022, Perum BULOG mendapat penugasan stabilisasi pasokan dan harga jagung dan kedelai dengan menggunakan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan<sup>4</sup>. Program pengadaan jagung bertujuan untuk menjaga ketersediaan jagung pakan di tingkat peternak ayam petelur rakyat dalam rangka menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam ras di tingkat konsumen. Pengadaan jagung dilakukan melalui pengadaan domestik melalui mobilisasi jagung dari daerah sentra produksi (lokal) dengan bantuan Asosiasi Padi Jagung dan Kedelai sejumlah 50 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan para peternak mandiri skala mikro dan kecil di wilayah sasaran. Kriteria dan daftar Koperasi Peternak Sasaran yang berhak menerima jagung bersubsidi melalui penugasan Perum BULOG tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI melalui Surat Nomor B-30002/TU.020/F2.5/09/2021. Perum BULOG juga mengamankan pasokan kedelai yang didominasi oleh pasokan dari impor guna menjaga stabilitas pasokan kedelai bagi produksi tempe dan tahu serta menjaga stabilitas harga tempe dan tahu di tingkat konsumen. Untuk itu, Perum BULOG diberikan penugasan untuk melakukan importasi kedelai sejumlah 200 ribu ton dan memberikan subsidi selisih harga pembelian bahan baku kedelai sebesar Rp1.000/kg kepada pengrajin tempe dan tahu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG sesuai dengan Pasal 2 Perpres 48 Tahun 2016. Pada 2022, alokasi pengadaan kedelai dengan menggunakan anggaran CSHP mencapai 168.475 ton, sementara untuk jagung sebesar 24.967 ton. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kedelai tersebut, Perum BULOG melibatkan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) sebagai mitra untuk penyediaan data anggota koperasi yang menjadi target penerima bantuan. Secara keseluruhan tahun 2022, realisasi penyediaan jagung pakan kepada peternak ayam petelur skala mikro dan

kecil tahun 2022 mencapai 24.968 ton, sedangkan realisasi program bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai sebesar 168.475 ton.

#### 2.2.1.5. Koordinasi Penetapan Kebijakan Administered Prices

Serangkaian koordinasi kebijakan penetapan harga komoditas dalam inflasi AP telah dilakukan lintas Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait. Koordinasi dilakukan antara lain oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak tahun 2021, koordinasi lintas Kementerian telah dilakukan untuk menetapkan kebijakan pengalihan konsumsi Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan dari jenis Premium ke Peralite dan kemudian secara resmi menetapkan Peralite menjadi BBM yang dikompensasi oleh Pemerintah (menggantikan Premium) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang ditetapkan pada 10 Maret 2022 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2022. Sejak awal tahun 2022, tekanan harga minyak global meningkat sehingga semakin memperlebar *gap* harga jual dan harga keekonomian, serta meningkatkan subsidi dan/atau kompensasi energi yang ditanggung Pemerintah. Untuk itu, serangkaian koordinasi dilakukan oleh Pemerintah guna menciptakan kebijakan yang tepat dan terukur mulai dari perumusan hingga implementasi teknis. Koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan penyesuaian harga BBM, khususnya jenis subsidi, yaitu untuk bahan bakar jenis Peralite dan Solar pada 3 September 2022. Kebijakan yang ditempuh telah memperhatikan ruang fiskal yang terbatas, kondisi perekonomian umum, serta mempertimbangkan peningkatan ketepatan sasaran program subsidi BBM. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan dari kebijakan penyesuaian harga, dan menjaga ekspektasi masyarakat.

<sup>4</sup> Berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian dengan agenda Pembahasan Kebijakan Distribusi dan Harga Komoditas Minyak Goreng dan Komoditas Kedelai pada tanggal 13 Maret 2022. Penugasan penyediaan jagung pakan kepada Perum BULOG sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Perekonomian Nasional pada tanggal 23 Maret 2022.

Dari sisi sektor angkutan, Kementerian Perhubungan telah menerapkan sejumlah kebijakan yang memengaruhi tarif angkutan. Pada April 2022, Kementerian Perhubungan menerapkan kebijakan pengenaan *fuel surcharge* kepada penumpang maskapai akibat kenaikan harga avtur yang menyebabkan peningkatan biaya operasional maskapai yang tidak sesuai dengan perhitungan tarif dasar dalam aturan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) AU. Namun demikian, Kementerian Perhubungan masih mempertahankan TBA dan TBB AU untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan relaksasi kebijakan pengenaan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) pada bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, mendukung upaya penambahan armada maskapai, menjaga ketersediaan konektivitas dan pelayanan AU di daerah 3T, serta mendorong kerja sama antarmaskapai, termasuk kolaborasi maskapai dengan Pemerintah Daerah. Sebagai respon akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022, Kementerian Perhubungan menaikkan TBA dan TBB untuk transportasi *online* dan tarif AKAP ekonomi.

### 2.2.1.6. Menjaga Volatilitas Nilai Tukar untuk Stabilisasi Inflasi Barang Impor

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah pada 2022 terus dilakukan agar tetap sejalan dengan fundamentalnya di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Upaya tersebut ditempuh antara lain sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi barang impor (*imported inflation*). Pada 2022, stabilisasi nilai tukar dilakukan melalui *triple intervention*, yaitu intervensi di pasar valas, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Stabilisasi nilai Rupiah diperkuat melalui inovasi kebijakan *twist operation* untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portfolio asing yang dilakukan melalui pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder.

Pengendalian moneter di pasar valas dan pasar SBN serta pemanfaatan kerja sama dengan bank sentral lain juga terus diperkuat selama tahun 2022. Berbagai upaya tersebut mencakup: (i) optimalisasi transaksi DNDF dan memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) secara berkelanjutan, termasuk

penyediaan instrumen *swap* lindung nilai syariah; (ii) menerbitkan instrumen operasi moneter (OM) valas yang baru untuk mendorong penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), khususnya dari ekspor Sumber Daya Alam (SDA), di dalam negeri oleh bank dan eksportir; (iii) memperkuat Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai Rupiah.

Konsistensi Bank Indonesia dalam memonitor dan berada di pasar untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah serta persepsi investor asing yang masih positif terhadap perekonomian Indonesia mampu mendorong kinerja nilai tukar Rupiah pada 2022 yang lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lainnya. Nilai tukar Rupiah terhadap USD selama 2022 mengalami depresiasi dan pada Desember 2022 mencapai sebesar Rp15.597 (rerata harian), lebih tinggi dari rerata 2021 yang sebesar Rp14.300 maupun rerata 2022 yang sebesar Rp14.850. Namun demikian, depresiasi Rupiah tersebut masih relatif lebih baik dari India dan Filipina, dan secara tahunan volatilitasnya mencapai 6,05% (yoy), atau masih sesuai dengan target.

### 2.2.1.7. Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian

*Upaya tambahan (extra effort)* pengendalian inflasi dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia sepanjang 2022 untuk menjaga keseimbangan internal perekonomian pada masa akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber*, sedangkan kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*). Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan *output gap*, yang sempat turun tajam di masa pandemi, dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional. Koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis juga terus diperkuat, melalui koordinasi dalam TPIP dan TPID serta penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Dalam upaya melanjutkan upaya menjaga pemulihan ekonomi di tengah tingginya tekanan geopolitik, APBN memberikan bantalan bagi perekonomian (*shock absorber*). Peran *shock absorber* dioptimalkan agar perekonomian tidak mengalami keterpurukan,

mampu bangkit lebih cepat, serta meminimalkan *scarring effect*. Dalam merespon peningkatan harga komoditas global di 2022 yang berdampak domestik, APBN memperkuat program perlintas, salah satunya melalui program perlintas tambahan, yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat terutama pada kelompok rentan. Beberapa program dimaksud antara lain pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan BBM, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan *earmark* 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk memperkuat program perlintas di daerah.

## 2.2.2. Ketersediaan Pasokan

### 2.2.2.1. Perluasan Adopsi Teknologi *Internet of Things* (IOT) Dalam Budidaya Pertanian

Bank Indonesia terus memperluas adopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya pertanian pada UMKM pangan. Penyempurnaan model bisnis *digital farming* melalui adopsi teknologi IOT dalam budidaya pertanian terus dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan menjaga keberlanjutan pasokan. Selain itu, digitalisasi UMKM pangan juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem terintegrasi antara petani dan pasar digital serta mendorong ketersediaan data *repository* pertanian yang memadukan konsep kluster dan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas usaha tani.

Perluasan adopsi teknologi IoT atau digitalisasi UMKM pangan pada sisi budidaya yang dilakukan secara tepat dinilai mampu meningkatkan produktivitas. Pada 2022, telah dilakukan perluasan adopsi teknologi IoT pada 10 kluster pangan strategis (melebihi target 5 UMKM pangan) di berbagai wilayah di Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur untuk komoditas pangan strategis seperti bawang merah, cabai, dan padi. Implementasi dilakukan melalui kerjasama dengan *platform* penyedia teknologi digital pertanian budidaya dengan memanfaatkan IoT, misalnya melalui sensor tanah/cuaca atau *smart irrigation* yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan/atau efisiensi serta mendukung penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP). Secara umum, implementasi *digital farming* yang dilakukan dapat meningkatkan produktivitas kluster di atas 10%.

### 2.2.2.2. Pengembangan Lumbung Pangan (*Food Estate*)

Pengembangan kawasan *food estate* merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pengembangan kawasan *food estate* di berbagai daerah diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pangan di masa mendatang. Hal tersebut karena pengelolaan pangan dan pertanian di kawasan *food estate* tidak lagi ditempuh dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (*economies of scale*) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Pengembangan kawasan *food estate* dijalankan dengan: (i) mengembangkan usaha pertanian skala besar berbasis kluster; (ii) melaksanakan proses budi daya pertanian multikomoditas yang terintegrasi; (iii) membangun mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi; (iv) membangun proses hilirisasi produksi pertanian; serta (v) menumbuhkan dan mengembangkan korporasi petani.

*Food estate* atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi dalam negeri. Sesuai amanat Perpres Nomor 122 Tahun 2020, pengembangan *food estate* (KSPP) dilakukan dengan terintegrasi, modern, dan berkelanjutan melalui tiga strategi pengembangan. Strategi pengembangan yang pertama diarahkan melalui usaha tani terpadu hulu-hilir, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan lahan pertanian *existing*, dan efisiensi *supply chain* (intensifikasi, optimasi lahan, diversifikasi produk, pertanian konservasi, modernisasi irigasi, pertanian digital/presisi, sistem logistik, sistem resi gudang (SRG), pengolahan primer sesuai kaidah keamanan pangan). Strategi pengembangan kedua dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan pemberdayaan petani dan regenerasi petani (*people centered development*), skema korporasi petani, terintegrasi dengan permodalan, asuransi pertanian dan mampu menarik sumber daya manusia (SDM) muda untuk berkiprah di sektor pertanian. Adapun strategi pengembangan yang ketiga ialah dengan menggerakkan investasi masyarakat dan swasta. Dengan strategi ini, pengembangan infrastruktur dasar

didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pengembangan selanjutnya menggunakan skema investasi masyarakat/swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/ Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor.

Lokasi pengembangan *food estate* tersebar di berbagai wilayah yaitu Wonosobo dan Temanggung untuk komoditas hortikultura, serta di Belu, Sumba Tengah, dan Buru untuk komoditas padi. Adopsi teknologi budidaya yang dikembangkan pada *food estate* mencakup penyemaian benih menggunakan *soil block*, perbanyakan kentang dari planlet, budidaya tanaman hortikultura dalam *green house*, *smart farming* dan penguatan budidaya ramah lingkungan. Pengembangan *food estate* di berbagai wilayah menunjukkan hasil yang cukup baik (Tabel 2.3). Khusus untuk komoditas padi, pengembangan lumbung pangan pada 2022 terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produksi padi nasional (Tabel 2.4).

**Tabel 2.3. Produktivitas Komoditas di Food Estate Wonosobo dan Temanggung**

Komoditas	Jumlah Produktivitas	
	Food Estate Wonosobo	Food Estate Temanggung
Bawang Putih	5,5 ton/ha	15,7 ton/ha
Bawang Merah	24,3 ton/ha	7,7 ton/ha
Kentang	16,97 ton/ha	27 ton/ha
Cabai	7 ton/ha	9 ton/ha

Sumber: Kementerian Pertanian

**Tabel 2.4. Perluasan Kawasan Food Estate Padi**

Kawasan Food Estate	Luas Lahan	Prakiraan Total Produksi
Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur	411 ha	33.093 ton GKG
Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur	6.120 ha	33.093 ton GKG
Kabupaten Buru, Maluku	2.000 ha	10.134 ton GKG

Sumber: Kementerian Pertanian

Pengembangan lumbung pangan melalui skema kawasan agroindustri hortikultura khususnya di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo tidak hanya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek *on-farm* tetapi juga mempertimbangkan aspek *off-farm* melalui model *closed loop*. Oleh karena itu, lahan yang disediakan tidak hanya untuk kawasan penanaman (budidaya) saja tetapi juga disediakan untuk kawasan percontohan padi (*demfarm*), tanaman konservasi, pengolahan hasil panen, dan fasilitas infrastruktur pendukung pertanian modern serta dukungan teknologi. Selain itu, sepanjang 2022 telah dilakukan berbagai diseminasi penggunaan teknologi antara lain pengait untuk sarana angkut pupuk dan sarana produksi (saprodi), rumah kaca (*green house*), pembibitan (*seedling*) cabai dan bawang merah dari biji botani (*true shallot seed/TSS*), *soilblock*, alat pipil dan sortasi bawang putih, alat pembuat pupuk organik cair, teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman ramah lingkungan, gudang penyimpanan, bangsal pascapanen dan sub terminal agribisnis (STA). Selanjutnya, pada lokasi lumbung pangan tersebut juga sudah terbentuk kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang berperan sebagai penggerak keberlanjutan usaha hulu hingga hilir yakni Koperasi Tawon Sindoro Sumbing (Temanggung) dan Koperasi FE Hortikultura Wonosobo (Wonosobo). Sementara itu, pengembangan kawasan untuk lumbung pangan padi di Nusa Tenggara Timur dan Maluku telah diberikan fasilitasi berupa benih, pupuk NPK nonsubsidi, pupuk hayati, pestisida dan pembenah tanah.

### 2.2.2.3. Pengembangan Kampung Hortikultura

Upaya peningkatan Ketersediaan Pasokan juga dilakukan dengan mengembangkan Kampung Hortikultura yang bertujuan menambah pasokan dan menekan fluktuasi harga komoditas hortikultura. Kampung Hortikultura didesain sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir termasuk didalamnya sistem pendukung keberlanjutan usaha tani. Kegiatan tersebut meliputi aspek budidaya, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan jaminan mutu, peningkatan kapasitas SDM petani/petugas dan aspek pendukung lainnya meliputi sarana prasarana pendukung, pemberdayaan kelembagaan usaha tani menuju terbentuknya sistem korporasi untuk menjamin keberlanjutan kegiatan. Pada 2022, telah dilakukan fasilitasi terhadap sejumlah kawasan bawang merah dan cabai yang turut mendukung produksi bawang merah dan cabai nasional (Tabel 2.5)

Tabel 2.5. Pengembangan Kampung Hortikultura

Kawasan Komoditas	Jumlah Kampung	Luas Lahan	Produksi Nasional	Luas Panen
Bawang Merah	257 kampung	5.984 ha	1,98 juta ton (120,5% dari target)	185 ribu ha (110,67% dari target)
Cabai	386 kampung	5.500 ha	3,02 juta ton (105,2% dari target)	316,7 ribu ha (105,65% dari target)

Sumber: Kementerian Pertanian

Kegiatan pengembangan kampung tersebut memperhatikan sosial demografis, agroklimat, kesesuaian komoditas, kesiapan petani dan kelembagaan tani, komitmen pemerintah daerah, dan dampak strategis pengembangan kawasan hortikultura di wilayah sekitar. Kedua kegiatan tersebut diharapkan menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) untuk selanjutnya diregistrasi sebagai basis data pengembangan kawasan hortikultura. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi faktor pengungkit tumbuh kembangnya unit kegiatan ekonomi masyarakat berbasis produk hortikultura yang dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya di desa/kelurahan.

#### 2.2.2.4. Optimalisasi Bantuan Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan antara lain melalui optimalisasi bantuan sarana produksi dan pembangunan infrastruktur pertanian untuk memperkuat produksi domestik serta meningkatkan efisiensi usaha tani. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan CBP dari sisi hulu dan hilir, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN)<sup>5</sup> kepada Perum BULOG sebesar Rp2 triliun rupiah. Pada 2022, Perum BULOG telah mendorong penyerapan anggaran PMN untuk sarana produksi dan infrastruktur pertanian sebesar 80% dari nilai kontrak sebesar Rp1,39 triliun atau 55% dari total pagu, sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyerapan PMN tersebut dialokasikan untuk pembangunan 10 unit *Modern Rice Milling Plant* (MRMP), 7 unit *Rice To Rice* (RTR), 2 unit *Corn Drying Centre* (CDC), 2 unit Gudang Kedelai (GK), 19 unit Gudang Komoditas Pangan (GKP), dan 3 unit Gudang

Modern (GM). Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) turut memberikan dukungan infrastruktur pertanian berupa pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Dukungan infrastruktur ini diperkirakan meningkatkan pasokan air irigasi sehingga mendukung capaian potensi produksi beras sebesar 1,22 juta ton/tahun. Dari total target 61 unit bendungan yang akan diselesaikan hingga 2025, 9 unit bendungan diantaranya telah selesai dibangun pada 2022, yaitu Bendungan Semantok (Provinsi Jawa Timur), Ciawi (Provinsi Jawa Barat), Sukamahi (Provinsi Jawa Barat), Sadawarna (Provinsi Jawa Barat), Beringinsila (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kuwil Kangkoan (Provinsi Sulawesi Utara), Lolak (Provinsi Sulawesi Utara), Margatiga (Provinsi Lampung), dan Tamblang (Provinsi Bali). Kementerian PUPR juga telah melakukan penambahan luas layanan jaringan irigasi atau pembangunan jaringan irigasi dan melakukan rehabilitasi daerah irigasi melalui pembiayaan oleh APBN, APBD, serta DAK. Pada 2022, luas pembangunan jaringan irigasi telah mencapai 35.099 ha, lebih tinggi dibandingkan target seluas 30,4 ribu ha, atau mencapai 115,33% dari target. Sementara itu, luas daerah irigasi yang telah direhabilitasi mencapai 144,83 ribu ha, lebih tinggi dari target seluas 142,62 ribu ha, atau mencapai 101,55% dari target.

Pembangunan infrastruktur juga dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan lumbung pangan (*food estate*) di empat provinsi. Di Provinsi Kalimantan Tengah, penyediaan air untuk irigasi areal sawah pada lahan dengan luas potensial sekitar 165 ribu ha untuk budidaya padi dan singkong. Di Provinsi Papua, penyediaan air untuk irigasi pada lahan dengan total luas potensial 3 ribu ha untuk budidaya jagung, sementara di Provinsi Sumatera

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016

Utara dengan luas potensial 30 ribu ha untuk budidaya komoditas hortikultura. Sementara itu, penyediaan air untuk irigasi di *food estate* Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas potensial 935 ha digunakan untuk budidaya padi, cabai, tomat dan jagung, serta untuk budidaya sorgum dengan luas potensial 634 ha.

Dalam proses pembangunan infrastruktur pertanian tersebut, belanja APBN juga digunakan untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan penerapan program Padat Karya Tunai (PKT) sektor Sumber Daya Air (SDA). PKT dilakukan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dan Operasi serta Pemeliharaan (OP) infrastruktur SDA sebanyak 300,63 ribu orang tenaga kerja. Terkait P3DN, monitoring pada 31 Januari 2023 menunjukkan bahwa realisasi anggaran sektor SDA pada 2022 telah mencapai sebesar 96,68% dan realisasi fisik sebesar 99,59% dari total pagu yang ditetapkan.

#### 2.2.2.5. Penerapan Praktik Budidaya Sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)*

Kementerian Pertanian telah mengupayakan peningkatan produksi komoditas tebu melalui penerapan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Penerapan GAP pada komoditas tebu tersebut sesuai dengan Permentan 53 tahun 2015 tentang Budidaya Tebu Giling yang Baik (GAP Tebu), yang dapat meningkatkan realisasi

produksi tebu dan gula. Pada 2022, luas areal tanaman tebu mengalami peningkatan dari seluas 447,4 ribu ha menjadi 489 ribu ha, atau sebesar 9,29% dari tahun sebelumnya. Produksi tebu juga meningkat dari semula 32,34 juta ton tahun 2021 menjadi 36,43 juta ton tahun 2022, atau meningkat sebesar 12,67%. Demikian pula produktivitas tebu/ha yang meningkat dari sebesar 72,29 ton/ha pada 2021 menjadi 74,52 ton/ha pada 2022, atau meningkat sebesar 3,08%. Produksi gula juga meningkat dari semula 2,35 juta ton pada 2021 menjadi 2,41 juta ton pada 2022, atau meningkat sebesar 2,34%.

#### 2.2.2.6. Peningkatan Produksi Peternakan yang Dikelola Secara Profesional

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dari peternakan terus dilakukan khususnya melalui peningkatan produksi peternakan yang dikelola secara profesional. Program kerja terkait penguatan ketersediaan pasokan daging ayam dilakukan dengan penerapan kewajiban pemilikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) atau *cold storage* sehingga diharapkan pasar akan bergeser dari penjualan *livebird* menjadi *carcass* untuk memperpendek rantai pasok. Upaya ini masih terus digalakkan agar pengelolaan peternakan di Indonesia dapat menjadi semakin modern dan profesional. Sepanjang 2022, realisasi produksi daging ayam adalah sebesar 3,76 juta ton dengan target tahun 2022 sebesar 3,49 juta ton, sementara daging sapi adalah sebesar 373,84 ribu ton dengan target tahun 2022 sebesar 373,77 ribu ton.

**Tabel 2.6. Produksi Daging Tahun 2021 dan 2022**

No.	Jenis Daging	2021			2022*)		
		Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
1	Sapi	403.309	365.510	90,63	373.771	373.843	100,2
2	Kerbau	22.671	14.193	62,61	14.322	15.825	110,50
3	Kambing	50.469	40.515	80,28	41.568	43.180	103,88
4	Domba	48.966	34.670	70,80	34.719	37.370	107,64
5	Babi	162.782	175.997	108,12	117.141	177.286	100,08
6	Ayam Buras	297.910	269.799	90,56	273.118	275.416	100,84
7	Ayam Ras Pedaging	3.509.945	3.185.698	90,76	3.497.897	3.765.573	107,65
8	Itik	40.609	41.021	101,02	41.792	37.309	89,72
Total		4.536.659	4.127.404	90,98	4.454.328	4.725.802	106,09

Sumber: Kementerian Pertanian

### 2.2.2.7. Percepatan Swasembada Gula Melalui Peningkatan Luas Lahan dan Produktivitas Tebu

Dari sisi perkebunan, upaya percepatan swasembada gula dilakukan melalui peningkatan luas lahan dan produktivitas tebu. Gula merupakan bahan pangan yang krusial dalam sistem rantai produksi pangan dan merupakan salah satu komoditas bahan pangan pokok strategis karena penting untuk memenuhi kebutuhan dan kalori bagi masyarakat Indonesia maupun industri makanan dan minuman. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan luas lahan dan produktivitas tersebut yaitu dengan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi produksi gula. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan lahan tebu, sementara strategi intensifikasi dilakukan melalui identifikasi lahan baru potensial di sejumlah lokasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi gula konsumsi. Saat ini, lima pabrik gula baru, PT. Rejoso Manis Indo di Kabupaten Blitar, PT. Kebun Tebu Mas di Lamongan, Jawa Timur, dan PT. Pratama Nusantara Sakti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, yang beroperasi sejak 2-3 tahun terakhir bergabung dan membentuk Gabungan Produsen Gula Indonesia (Gappindo).

**Tabel 2.7. Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Produksi Gula Tahun 2022**

Uraian	Luas Lahan (ha)	Program Bantuan
Ekstensifikasi	1.310	Pupuk NPK majemuk 400 kg/ha, pembenah tanah (asam humat) 13 liter/ha, herbisida 4 liter/ha, serta biaya penanaman sebesar 25 HOK/ ha
• Jawa Barat	360	
• Jawa Tengah	410	
• Jawa Timur	540	
Intensifikasi (Rawat Ratoon)	3.490	pupuk NPK majemuk 400 kg/ha, pembenah tanah (asam humat) 13 liter/ha, herbisida 4 liter/ha
• Jawa Timur	1000	
• Jawa Tengah	590	
• Jawa Barat	550	
• Lampung	400	
• Sumatra Selatan	300	
• Nusa Tenggara Barat	250	
• Daerah Istimewa Yogyakarta	100	

Sumber: Kementerian Pertanian

### 2.2.2.8. Peningkatan Produksi dan Perluasan Kebun Sawit

Upaya peningkatan produksi (intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi) lahan kebun sawit pada tahun 2022 masih perlu terus dioptimalkan. Pada 2022, luas lahan kebun sawit nasional mencapai sekitar 15 juta ha dengan luas tanaman menghasilkan (TM) seluas 12,34 juta ha, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) sebesar 45,58 juta ton, dan produktivitas mencapai 3,69 Kg/ha.<sup>6</sup> Namun demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target awal antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium kelapa sawit yang membuat pembatasan penerbitan izin baru pada areal kawasan hutan sehingga kegiatan perluasan lahan sawit menjadi terbatas dan dampak kebijakan pelarangan ekspor CPO yang membuat CPO di tangki timbun penuh sehingga pabrik kelapa sawit harus mengurangi produksi CPO. Selain itu, upaya intensifikasi kelapa sawit juga terkendala oleh realisasi kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang masih rendah akibat masalah legalitas lahan, kurangnya minat pekebun karena khawatir kehilangan pendapatan selama fase tanaman belum menghasilkan, dan kondisi pekebun yang tidak *bankable* sehingga sulit untuk memperoleh dana lanjutan untuk pemeliharaan.

### 2.2.2.9. Peningkatan Ketersediaan Telur Ayam Ras Tahunan

Peningkatan ketersediaan telur ayam ras tahunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan asupan protein masyarakat sehingga dapat mengurangi berbagai permasalahan di antaranya *stunting*. Di samping itu, produksi telur pada 2022 juga dibutuhkan untuk penyaluran bansos. Realisasi produksi telur pada 2022 mencapai 5,58 juta ton atau 101% dari target yang sebesar 5,52 juta ton. Adapun realisasi populasi ayam ras petelur adalah sebanyak 379,28 juta ekor atau 101,5% dari target sebanyak 373,67 juta ekor. Berdasarkan prognosa Bapanas 2023, produksi telur 2022 tersebut meningkat dari 5,16 juta pada 2021, atau mengalami kenaikan sebesar 7,96% (yoy).

<sup>6</sup> Berdasarkan Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023

### 2.2.2.10. Modernisasi Pengolahan dan Penyimpanan Produk Pertanian

Pemerintah terus memperkuat penyediaan infrastruktur pascapanen untuk menambah pasokan pangan. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan CBP dari sisi hulu dan hilir, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 sebesar Rp2 triliun. Proyek infrastruktur dan modernisasi pengolahan serta penyimpanan produk pertanian dengan PMN tersebut dialokasikan diantaranya untuk pembangunan *Modern Rice Milling Plant (MRMP)*, *Rice To Rice (RTR)*, *Corn Drying Centre (CDC)*, Gudang Kedelai (GK), Gudang Komoditas Pangan (GKP), dan Gudang Modern (GM). Fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura pada 2022 tersebut meningkat sebesar 93% (yoy).

Salah satu proyek infrastruktur dan modernisasi pengolahan serta penyimpanan produk pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian adalah fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura. Pada 2022, total sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura yang terdiri dari sarana pascapanen, sarana pengolahan, dan sarana pemasaran telah terealisasi sebanyak 625 unit (292 unit sarana pascapanen, 233 unit sarana pengolahan, dan 100 unit sarana pemasaran), atau meningkat sebesar 12,82% dari tahun 2021 yang mencapai realisasi sebanyak 554 unit (424 unit sarana pascapanen, 34 unit sarana pengolahan, dan 96 sarana pemasaran). Capaian nilai realisasi fasilitasi nilai tambah produk hortikultura pada tahun anggaran (TA) 2022 mencapai sebesar 12,82%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada TA 2021 yang sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai tambah produk hortikultura sebanyak 83,14 % (yoy).

### 2.2.2.11. Pasokan Bahan Bakar Non-BBM

Penguatan ketersediaan pasokan tidak hanya mencakup komoditas pangan, namun juga non-pangan khususnya bahan bakar non-BBM. Indonesia saat ini tergolong sebagai negara yang paling maju dalam menerapkan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel. Sejak penerapan campuran biodiesel sebesar 30% (B30) secara nasional pada 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar pemanfaatan biodiesel tersebut dapat ditingkatkan menjadi B40, B50, bahkan B100. Sebagaimana target awal, selama Januari-Desember 2022, penerapan campuran biodiesel B30 masih dipertahankan. Pada 2022, total alokasi volume penyaluran BBN jenis biodiesel (B100) untuk 22 Badan Usaha BBN jenis biodiesel sebesar 11,02 juta kl, dengan total realisasi biodiesel sebesar 10,5 juta kl. Sementara itu, produksi biodiesel pada tahun 2022 mencapai sebesar 11,82 juta kl dengan volume ekspor sebesar 328 ribu KL, atau sebesar 2,7 % dari total volume produksi.

### 2.2.2.12. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Dalam rangka memperkuat upaya pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan menjaga ketahanan pangan nasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diterbitkan pada 24 Oktober 2022. Sesuai dengan Perpres tersebut, pemenuhan CPP diperluas menjadi 11 (sebelas) komoditas yang mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan. Perum BULOG ditugaskan untuk melakukan upaya pemenuhan CPP untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai, sedangkan ID Food ditugaskan untuk mengelola CPP komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, dan gula konsumsi.

Adapun pemenuhan CPP terutama dilakukan melalui pengadaan dalam negeri untuk menjaga harga di tingkat petani produsen dan tetap memberikan dorongan bagi peningkatan produksi dalam negeri. Dalam hal ketersediaan pasokan dalam negeri tidak dapat mencukupi pemenuhan CPP maka pemenuhan dapat dilakukan melalui impor. Pada tahun 2022, upaya penguatan CPP difokuskan pada tiga komoditas utama yaitu beras, jagung dan kedelai. Pengelolaan CPP pada 2022 dilanjutkan untuk komoditas beras sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, disertai dengan penguatan sejumlah ketentuan terkait pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sementara itu, upaya pengelolaan CPP untuk komoditas jagung dan kedelai pada tahun 2022 difokuskan pada penyusunan ketentuan yang mendukung implementasi CPP kedua komoditas tersebut<sup>7</sup>. Lebih lanjut, untuk mendukung penguatan CPP dari sisi pembiayaan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2022 yang mengatur mengenai mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP bagi operator pengelola CPP. Ketentuan ini akan diperkuat lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian penjaminan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan CPP.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2022 melanjutkan kebijakan sebelumnya yaitu menugaskan Perum BULOG untuk menjaga level stok CBP pada angka 1-1,5 juta ton setara beras. Pemanfaatan CBP ditujukan sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga beras, program penyaluran kepada golongan masyarakat tertentu dan/atau masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka ketahanan pangan, bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat serta bencana wabah penyakit, program pengurangan kerawanan pangan, kegiatan pelepasan stok CBP, dan bantuan internasional dan kerjasama internasional,

serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan pemerintah<sup>8</sup>. Pengadaan gabah/beras oleh Perum BULOG dilakukan dengan mengutamakan hasil penyerapan produksi domestik melalui saluran pembelian langsung dari petani oleh Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri dan Mitra Pangan Pengadaan (MPP). Selain itu, dalam rangka optimalisasi maka pengadaan gabah/beras untuk Public Service Obligation (PSO) dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Jangka Panjang Bertarget (PJPB) dan pengadaan reguler<sup>9</sup>.

Pengelolaan CBP sepanjang 2022 menghadapi sejumlah tantangan baik di sisi hulu (pengadaan) maupun sisi hilir (penyaluran). Di sisi hulu, tantangan terbesar pengelolaan CBP ialah pengadaan gabah/beras domestik yang berada di bawah rerata historisnya, sedangkan tantangan di sisi hilir terkait dengan pengaturan perputaran stok beras untuk menjaga kualitas stok. Saat ini, meskipun stabilisasi harga melalui program KPSH sebagai outlet penyaluran stok dilaksanakan sepanjang tahun, namun jumlah penyaluran cenderung tidak pasti dan bergantung pada kebutuhan intervensi akibat fluktuasi harga atau pasokan di pasar. Kepastian *outlet* penyaluran beras di sisi hilir memengaruhi keberlanjutan aktivitas penyerapan beras/gabah di tingkat petani (hulu). Selain itu, terdapat pula tantangan pemenuhan ketersediaan CBP untuk keperluan intervensi pasokan beras di pasar dalam rangka stabilisasi harga beras seiring dengan peningkatan inflasi beras yang berlangsung sejak pertengahan 2022. Perkembangan ini mengakibatkan jumlah CBP yang dikelola Perum BULOG pada 31 Desember 2022 berada pada level 334,79 ribu ton dengan rincian Stok Komersial sebesar 8,92 ribu ton dan Stok CBP sebesar 325,87 ribu ton atau di bawah target tingkat CBP sebesar 1-1,5 juta ton<sup>10</sup>.

7 Sejumlah ketentuan turunan Perpres No. 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah telah diterbitkan antara lain (i) Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), (ii) Perbadan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), (iii) Perbadan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP), (iv) Perbadan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai, di Tingkat Konsumen, (v) Perbadan Nomor 4/2023 tentang penyelenggaraan gula konsumsi pemerintah dan cadangan minyak goreng pemerintah, dan (vi) Perbadan Nomor 5/2023 tentang penyelenggaraan daging unggas pemerintah dan cadangan daging ruminansia pemerintah.

8 Berdasarkan berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan cadangan beras pemerintah

9 Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 tahun 2020 tentang Ketentuan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah atau beras

10 Berdasarkan Laporan Manajerial Perum BULOG 4 Januari 2023.

### 2.2.2.13. Diversifikasi Negara Asal Impor Komoditas Pangan Strategis

Kebijakan pangan pada 2022 semakin diperkuat untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan implementasi kebijakan impor yang terukur. Terkait kebijakan impor, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mengupayakan diversifikasi negara asal impor untuk komoditas pangan strategis. Namun demikian, pada 2022 belum terdapat kesepakatan dan/atau pengajuan impor komoditas sapi bakalan ataupun kerbau bakalan, dari negara selain Australia sebagaimana target awal yaitu berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Meksiko dan Chile. Impor sapi atau kerbau bakalan hingga saat ini masih didominasi oleh Australia dan India, mengingat wilayah kedua negara tersebut masih dekat dengan Indonesia sehingga biaya logistik khususnya biaya *handling* masih lebih murah dibandingkan dari Meksiko dan Chile. Meski demikian, saat ini Indonesia dan Chile telah memiliki kerjasama *Free Trade Agreement* (FTA), sehingga apabila diperlukan, proses pengajuan impor dari Chile diperkirakan dapat lebih cepat.

### 2.2.2.14. Penguatan Realisasi Impor Bahan Pangan Untuk Mendukung Ketersediaan Pasokan

Implementasi kebijakan perencanaan dan mekanisme pelaksanaan impor yang lebih baik telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan terutama untuk memastikan agar realisasi impor pangan sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu, sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat tercapai. Untuk peningkatan transparansi aliran data, penghitungan dan perencanaan impor yang lebih baik, serta perbaikan kemudahan proses perizinan dan pemantauan impor, saat ini proses permohonan impor komoditas pangan telah melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas. Pada 2021, terdapat lima komoditas yang diikutsertakan dalam tahap I implementasi Sinan NK yaitu beras, gula, daging lembu, garam, dan perikanan, serta dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dan telah melibatkan K/L ataupun instansi terkait untuk menetapkan NK tahun 2022. Pada 2022, implementasi Sinan NK untuk lima kelompok komoditas tahap I dilakukan secara bertahap dan secara paralel juga dilakukan penetapan kelompok komoditas untuk implementasi Sinan NK tahap II, termasuk diantaranya untuk komoditas jagung dan bawang putih. Lebih lanjut, pada 2022 dilakukan percepatan realisasi impor pangan dalam rangkaantisipasi gangguan pasokan domestik. Percepatan impor dilakukan untuk sejumlah komoditas yaitu beras, kedelai, dan daging sapi/kerbau melalui penugasan kepada Perum BULOG dan ID Food.

### 2.2.2.15. Penguatan Kelembagaan Petani Pangan, Perkebunan Sawit, dan Petani Tebu

Dalam rangka meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan, penguatan kelembagaan petani secara konsisten dilakukan untuk mendukung kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Upaya penguatan kelembagaan petani oleh Kementerian Pertanian pada jangka menengah difokuskan pada petani komoditas hortikultura, perkebunan sawit, serta petani tebu. Pada 2022, Kementerian Pertanian melakukan sejumlah upaya, yaitu korporatisasi pembentukan klaster petani (hortikultura) sebesar 65 klaster, fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit di 10 provinsi, serta mekanisme beli putus tebu dengan tujuh pabrik gula. Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui peningkatan indeks akseptabilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan pertanian, sejalan dengan arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021. Dalam program kerja ini, Kementerian Pertanian berupaya melakukan peningkatan indeks aksesibilitas pada 2022 sebesar 67,13%. Selama 2022, telah terealisasi sebanyak 202 kampung bawang merah dan 374 kampung aneka cabai. Terkait dengan kelembagaan petani tebu, pada 2022 mekanisme beli putus baru tercapai sekitar 50% dari jumlah 59 pabrik gula yang melaksanakan karena adanya kendala anggaran.

Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan tata kelola, serta memperkuat kelembagaan perkebunan sawit. Melalui program PSR, pekebun didorong untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan sawit dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan,

perbaikan kultur teknis, mempermudah akses dana, dan menjamin penjualan produksi dengan harga standar. Program PSR pada 2022 telah dilakukan di 115 kabupaten wilayah sentra sawit di sebanyak 21 provinsi.

### 2.2.2.16. Peningkatan Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan pangan melalui berbagai upaya untuk menunjang pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian termasuk memastikan ketersediaan perlindungan komoditas strategis pertanian berupa Asuransi Pertanian yang terdiri dari Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTSK). Selama 2022, realisasi AUTP dan AUTSK umumnya sudah mendekati target yang telah ditetapkan (Tabel 2.8). Pada 2022, dana bantuan premi AUTP mencapai seluas 1.000.000 ha dan mengalami penyesuaian secara otomatis menjadi 652.778 ha karena wabah PMK, dan difokuskan ulang menjadi 382.485 ha. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 572.982 orang petani, yang mencakup areal sawah seluas 353.258 ha pada 235 kabupaten/kota di 31 provinsi. Sementara itu, dana bantuan premi AUTSK diberikan untuk 150.000 ekor sapi, yang kemudian difokuskan ulang menjadi 92.280 ekor sapi dan telah disalurkan untuk mengasuransikan 67.436 ekor sapi/kerbau dari sebanyak 30.029 orang peternak di 197 kabupaten/kota di 30 provinsi.

Selain perlindungan usaha pertanian, upaya pengendalian inflasi juga terus didukung oleh pemenuhan pembiayaan pertanian melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi KUR di sektor

pertanian pada TA 2022 adalah sebesar Rp113,43 triliun, atau sekitar 126% dari target yang sebesar Rp90 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 2,73 juta orang. Dilihat secara rinci, subsektor perkebunan merupakan subsektor pertanian yang memiliki tingkat penyerapan KUR tertinggi, yaitu sebesar Rp38,47 triliun, diikuti oleh subsektor tanaman pangan sebesar Rp31,74 triliun, peternakan Rp19,21 triliun, hortikultura Rp13,14 triliun, kombinasi pertanian Rp9,39 triliun, dan jasa Rp1,48 triliun. Hasil realisasi KUR ini meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp85,6 triliun dari target sebesar Rp70 triliun, yang mengindikasikan tingginya antusiasme pelaku usaha di sektor pertanian dalam mengakses pembiayaan melalui program KUR.

### 2.2.2.17. Optimasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Potensi SRG untuk mendukung kemajuan sektor pertanian cukup luas mengingat SRG dapat digunakan sebagai agunan kredit, mendukung stabilisasi harga pasar, dan menjadi sumber data dan informasi. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011, telah menghasilkan SRG sebagai instrumen baru dalam sistem pembiayaan perdagangan di Indonesia. SRG dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memfasilitasi pemberian kredit hanya dengan menggunakan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang, tanpa memerlukan agunan tambahan lainnya. Hal ini membuka opsi bagi para pelaku usaha pemilik komoditas, khususnya petani dan usaha kecil dan menengah untuk melakukan tunda-jual di saat harga jual komoditas dinilai terlalu rendah. Dengan demikian, SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, penerapan sistem informasi pada SRG dapat menjadi sumber data dan informasi bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian harga dan pemantauan persediaan nasional.

Secara umum, transaksi penerbitan SRG terus meningkat dengan cakupan kabupaten/kota di Indonesia yang luas pula. Selama 2022, transaksi penerbitan SRG mencapai sebesar Rp1,25 triliun, meningkat 1,02% dari tahun dasar 2019, atau mencapai 11,34% dari target pertumbuhan 9%. Hal ini didorong oleh peningkatan nilai transaksi untuk penerbitan Resi Gudang pada komoditas ikan, bawang merah, dan gula.

**Tabel 2.8. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau**

Jenis Asuransi	Luas Lahan/ Jumlah Ternak	Nilai Nominal
Asuransi Usaha Tani Padi	353,258.50 ha (92,36% dari target)	Rp50.869.224.000
Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau	67,436 ekor (73,08% dari target)	Rp10.789.760.000

Sumber: Kementerian Pertanian

Selain itu, terdapat peningkatan plafon Skema Subsidi Resi Gudang dari Rp75 juta menjadi Rp500 juta per debitur per tahun. Untuk pelaksanaan PLK, selama tahun 2022 transaksi PLK tercatat sebesar Rp47,47 miliar atau mencapai 69% dari target. Transaksi PLK mengalami tantangan yang cukup besar karena adanya fokus ulang anggaran Dekonsentrasi Penyelenggaraan PLK sebesar 44%, semula Rp7 miliar menjadi Rp3,9 miliar.

### 2.2.2.18. Pembentukan dan Optimalisasi Holding BUMN Klaster Pangan

Dalam rangka penguatan kelembagaan untuk mempercepat upaya mewujudkan target kedaulatan pangan pada 2024, Pemerintah telah resmi membentuk *holding* BUMN Pangan yang dikoordinasikan oleh PT. RNI sebagai induk. Melalui *holding* BUMN klaster pangan, pemangku kepentingan seperti klaster pangan dapat meningkatkan skala usaha, akses pendanaan, dan profitabilitas, sekaligus menciptakan sinergi lintas BUMN, klaster, dan swasta dalam ekosistem pangan nasional. Bagi masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, peternak, dan nelayan kecil, serta pemberdayaan dan peningkatan produktivitas UMKM yang selanjutnya dapat terwujud peningkatan produksi untuk mendorong swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada 2022, optimalisasi *holding* BUMN klaster pangan oleh Kementerian BUMN dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas tebu sebesar 76 ton/ha dan akuisisi mitra warung pangan sebanyak 90 ribu mitra.

## 2.2.3. Kelancaran Distribusi

### 2.2.3.1. Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antardaerah

Selama 2022 telah dilaksanakan penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan serta mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. Penguatan kerjasama perdagangan antardaerah dilakukan melalui penguatan asesmen *pre-matchmaking* dalam pemilihan calon pelaku usaha pelaksana KAD, termasuk mendorong peran BUMD pangan sebagai operator KAD. Selama 2022, Bank Indonesia telah memfasilitasi *matchmaking* sebanyak 176 KAD, meningkat 89,2% dibandingkan jumlah KAD tahun sebelumnya sebesar 93 KAD.

Beberapa komoditas yang dominan ditransaksikan selama 2022 mencakup beras dengan pangsa sebesar 29,19%, aneka cabai sebesar 16,22%, bawang merah sebesar 10,27%, serta daging sapi dan telur yang masing-masing sebesar 7,03%.

Keberhasilan penguatan dan perluasan KAD pada 2022 antara lain mencakup replikasi business model KAD dan implementasi teknologi dan digitalisasi. Sebagai contoh, BUMD DKI Jakarta mampu meningkatkan efisiensi melalui implementasi *digital farming* bekerja sama dengan *e-commerce* sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha KAD. Di wilayah Kabupaten Brebes, penguatan model bisnis dilakukan untuk produk turunan hortikultura terutama bawang merah dengan mengoptimalkan platform digital sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan memperluas akses pasar. Di Sumatera Utara, upaya KAD juga telah didukung oleh digitalisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun demikian, berbagai tantangan dalam penguatan dan perluasan KAD juga masih mengemuka, yaitu terkait ketersediaan pelaku usaha atau badan usaha sebagai operator KAD yang profesional, serta komitmen antardaerah dalam penyediaan pasokan secara berkelanjutan perlu diantisipasi melalui sinergi dan kolaborasi antar *stakeholders*.

### 2.2.3.2. Fasilitas Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI) dan Lembaga Lain

Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga kelancaran distribusi pangan melalui bantuan penyaluran bahan pangan melalui Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center (PMT/TTIC) dan Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia (TMT/TTI). Dukungan kelancaran distribusi tersebut merupakan pelayanan masyarakat melalui penjualan bahan pangan pokok/strategis melalui Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Centre (TTIC)/Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan keberadaan TTIC/PMT tersebut, petani yang memasarkan komoditas langsung melalui TTIC/PMT dapat memotong 2-3 tahap rantai distribusi sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Selain itu, kegiatan TTIC/PMT juga dapat membuka dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh komoditas pangan

pokok atau pangan strategis dengan harga terjangkau dan berkualitas baik. Kegiatan PMT/TTIC dilakukan melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang diberikan berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Penyaluran komoditas bahan pangan ke masyarakat dilakukan secara penjualan langsung (*offline*), semi *online*, maupun *full online*. Perubahan teknologi digital saat ini juga menuntut pelaku perdagangan pangan, sehingga PMT/TTIC dan TMT/TTI menjadi semakin adaptif menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, PMT/TTIC saat ini sudah melakukan penjualan secara *online* melalui *marketplace* seperti PasTANI, Go-Food, GoMart, GrabMart, Mitra Bukalapak, dan Digiretail Mandiri. Selama 2022, telah terlaksana kegiatan fasilitas distribusi pangan oleh PMT/TTIC dan TMT/TTI pusat telah menyalurkan 270 ton beras dengan penggunaan dana sebesar Rp297 juta atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Secara spasial, FDP telah menyalurkan beras sebanyak 437 ton disebarkan 21 provinsi, dengan total jumlah dana sebesar Rp437 juta atau sebesar 76% dari target yang ditetapkan.

### **2.2.3.3. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antarwilayah Guna Mendukung Kelancaran Pergerakan Logistik Bahan Pangan**

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kelancaran pergerakan logistik bahan pangan dengan peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan). Hal tersebut dilakukan melalui beberapa program diantaranya subsidi AU perintis kargo dan penguatan tol laut oleh Kementerian Perhubungan, serta pembangunan jalan mantap oleh Kementerian PUPR. Program-program tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah sehingga dapat menekan gejolak harga dan disparitas harga antardaerah.

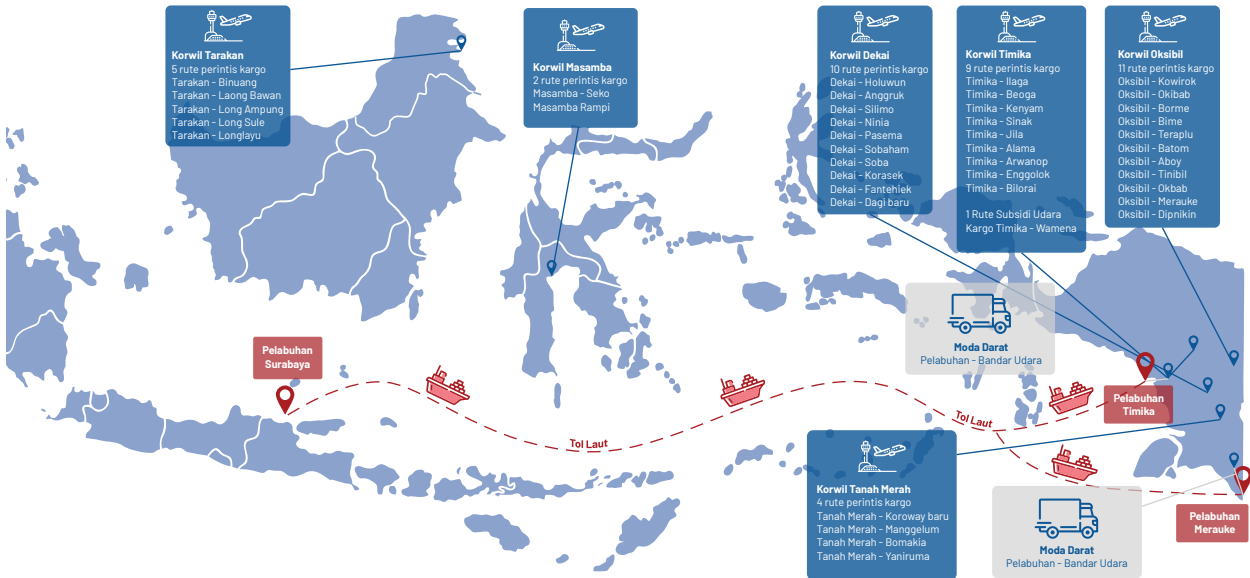
Pada 2022, target capaian program jembatan udara mengalami penyesuaian dari semula 43 subsidi rute udara menjadi 42 subsidi rute udara. Sebagaimana

tercantum dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. KP 254 Tahun 2021, penyelenggaraan subsidi AU dilaksanakan sebanyak 42 rute dengan rincian 41 perintis kargo dan 1 subsidi kargo dengan total anggaran sebesar Rp93 milyar. Rute penerbangan pada 2022 tersebar di 6 koordinator wilayah, yaitu Tarakan, Masamba, Dekai, Timika, Oksibil, dan Tanah Merah. Rute subsidi kargo ke wilayah perintis telah dilaksanakan seluruhnya dengan frekuensi penerbangan dan realisasi muatan kargo masing-masing sebesar 5,23 ribu penerbangan dan 3,82 ribu ton kargo, atau mencapai 98% dan 120% dari target. Subsidi kargo ke wilayah lainnya juga telah dilaksanakan dengan frekuensi penerbangan sebanyak 468 kali atau sesuai target awal, dengan realisasi muatan kargo sebesar 2,18 ribu ton, atau mencapai 120% dari target awal. Secara umum, penerbangan perintis kargo masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain armada yang masih terbatas, keamanan, dan faktor gangguan cuaca.

Realisasi program tol laut pada 2022 sebesar 33 trayek dari 34 trayek yang ditargetkan dan dilayani oleh 32 kapal melalui 130 pelabuhan singgah. Dari total 130 pelabuhan singgah, sebanyak 2 trayek dilaksanakan melalui mekanisme penugasan kepada BUMN karena tidak ada penawaran oleh penyedia angkutan untuk tol laut. Trayek tol laut pada 2022 tersebut melalui berbagai pangkalan di pelabuhan di Indonesia, yaitu Tanjung Perak, Tanjung Priok, Teluk Bayur, Makassar, Bitung, Sorong, Biak, Merauke, Timika, dan Kupang. Untuk angkutan laut perintis dilaksanakan dengan 117 trayek, sementara angkutan khusus ternak telah dilaksanakan sebanyak 6 trayek dengan 2 pelabuhan pangkal yaitu 5 trayek pelabuhan pangkal di Kupang, NTT dan 1 trayek pelabuhan pangkal di Kwandang, Gorontalo.

Di wilayah darat, Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan jalan termasuk meningkatkan kemandirian jalan. Direktorat Bina Marga pada 2022 telah membangun jalan tol sepanjang 142 km, pembangunan jalan nasional baru sepanjang 467 km, pembangunan jembatan sepanjang 20.759 m, serta pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 1,13 ribu m. Untuk akses ke 3TP, akselerasi terus dilakukan melalui tingkat mantap jalan nasional sebesar 92,20% yang tercapai melalui pemeliharaan rutin, preventif, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan serta pemeliharaan rutin jembatan dan preservasi jembatan.

Gambar 2.2. Peta Sebaran Jembatan Udara Tahun Anggaran 2022



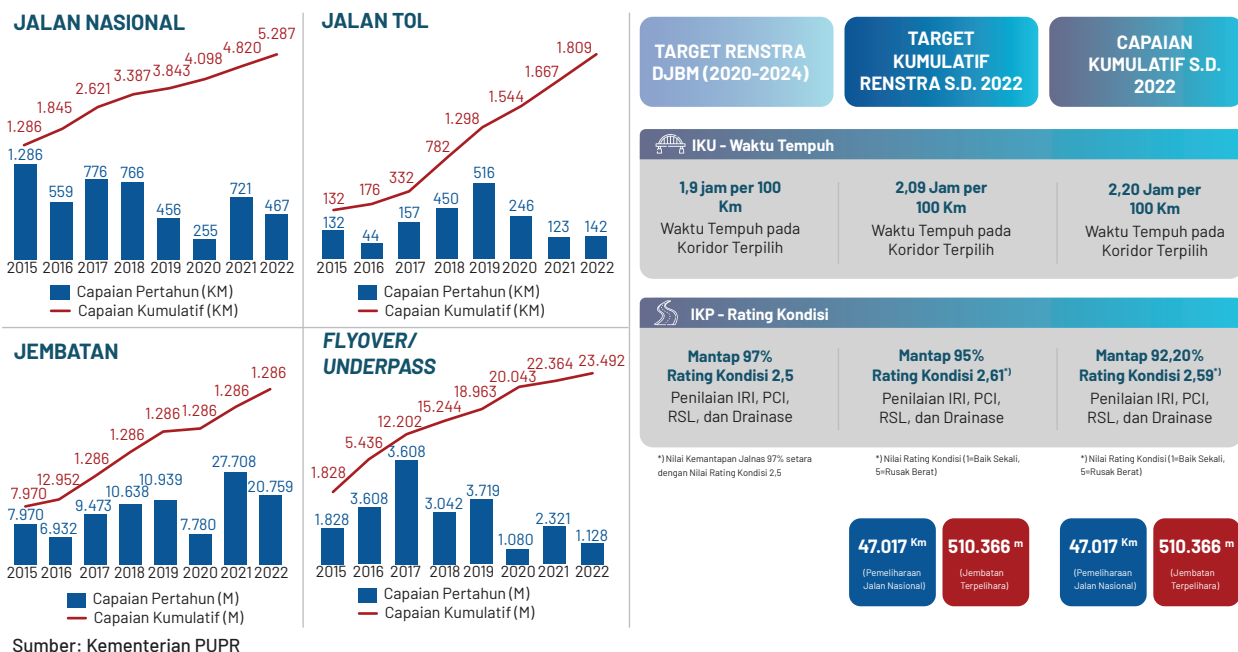
Sumber: Kementerian Perhubungan

Pembangunan jalan nasional dapat mengurangi waktu jarak tempuh pada jalan lintas utama pulau dari sebesar 2,70 jam/100 km pada 2015 hingga menjadi 2,20 jam/100 km pada 2022. Pembangunan infrastruktur konektivitas oleh Kementerian PUPR juga berkontribusi terhadap penurunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), khususnya di Papua Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan daerah dengan IKK tertinggi. Pembangunan Jalan Tol Trans Papua mampu menurunkan IKK Provinsi Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 15% dan 6,8% dalam kurun waktu 5 tahun.

### 2.2.3.4. Penguatan Implementasi Digitalisasi UMKM Pangan Sisi Hilir/Fasilitas E-Commerce

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir sebagai salah satu upaya meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperlancar distribusi bahan pangan, dan memperluas akses petani ke masyarakat. Selama ini komoditas pertanian relatif sulit memasuki e-commerce karena sifatnya yang *perishable* (tidak tahan lama atau mudah rusak). Namun demikian,

Gambar 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Infrastruktur Konektivitas



Sumber: Kementerian PUPR

saat ini telah bermunculan platform digital yang khusus memasarkan komoditas pertanian langsung kepada konsumen, dengan membangun sistem untuk mengantisipasi sifat *perishable* komoditas pertanian, antara lain dengan membangun gudang-gudang di beberapa titik yang dapat menjangkau konsumen dengan cepat. Di sisi lain, masyarakat pun kini mulai terbiasa untuk berbelanja bahan pangan secara *online*.

Digitalisasi UMKM pangan sisi hilir mampu memperluas akses pemasaran dan memberikan nilai tambah terhadap komoditas pangan melalui *e-commerce* nasional maupun lokal yang melakukan penjualan komoditas pertanian secara *online*. Pada 2022, Bank Indonesia telah melakukan fasilitasi kepada 32 UMKM pangan dengan *e-commerce* pertanian atau meningkat sebesar 12,4% dibandingkan dengan *baseline* data UMKM pangan binaan/mitra Bank Indonesia, atau melebihi target TPIP yang sebesar 10%. Digitalisasi UMKM pangan sisi hilir diimplementasikan oleh 20 KPwDN Bank Indonesia di seluruh Indonesia pada berbagai komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, padi, dan daging sapi. Fasilitasi tersebut dilaksanakan bersinergi dengan berbagai platform digital pertanian hilir, baik nasional maupun daerah.

## 2.2.4. Komunikasi Efektif

### 2.2.4.1. Penyediaan Sistem Informasi Terintegrasi Untuk Komoditas Pangan Utama Pada Aplikasi Panel Harga Pangan dan Simonstok Di Pusat dan Daerah

Ketersediaan data harga pangan strategis terkini menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan data harga pangan strategis ialah melalui pengelolaan *database* Panel Harga Pangan yang terdiri dari panel harga pangan tingkat produsen dan konsumen di 34 provinsi di Indonesia. Pada 2022, pemantauan harga pangan pokok strategis di produsen meliputi komoditas gabah (gabah kering panen, gabah kering giling), beras di penggilingan (medium dan premium), jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi hidup, daging ayam ras hidup, telur ayam ras. Sedangkan di tingkat konsumen,

data harga pangan tersebut meliputi komoditas beras (premium, medium, termurah), cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.

Di samping ketersediaan data harga pangan strategis, pengambilan berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan juga membutuhkan ketersediaan data pasokan pangan yang akurat dan tepat waktu. Kondisi ketersediaan pangan antardaerah di wilayah Indonesia berbeda-beda disebabkan oleh kondisi geografis yang terdiri dari daratan, pegunungan, dan kepulauan. Untuk mengetahui ketersediaan atau stok pangan di suatu daerah, maka diperlukan sistem informasi stok pangan yang cepat, tepat, dan akurat. Salah satu pendekatan untuk memperoleh dan memonitor data stok pangan tersebut dilakukan melalui aplikasi Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis (Simonstok). Simonstok dibangun oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian pada 2020. Simonstok ini merupakan instrumen untuk mengetahui kondisi stok pangan baik nasional maupun daerah di 34 provinsi secara mingguan yang disandingkan dengan kebutuhan pangan. Dengan demikian, status ketahanan stok pangan dapat diketahui apakah berstatus surplus atau defisit.

Kegiatan monitoring stok pangan ini dirancang menggunakan metodologi untuk menentukan titik sampel masing-masing komoditas. Pengumpulan data dilakukan setiap minggu dengan melibatkan petugas data atau enumerator pada dinas yang menangani urusan pangan di kabupaten/kota dari sampel yang ditentukan di berbagai simpul distribusi komoditas pangan tersebut. Sasaran kegiatan Simonstok dilakukan pada 10 komoditas pangan strategis, yaitu beras (penggilingan dan pedagang), jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, daging sapi, dan gula pasir. Hasil monitoring stok pangan menampilkan data dan informasi stok dan ketahanan stok serta neraca pangan mingguan baik nasional maupun daerah (34 provinsi) telah dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi kebijakan di pusat dan daerah dalam peningkatan akses pangan pada daerah defisit pangan. Informasi stok pangan ini dapat diakses melalui *website* <https://logistikpangan.id>.

### 2.2.4.2. Peningkatan Kualitas dan Keakuratan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)

Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional terus dilanjutkan untuk memastikan akurasi dan kredibilitas harga pangan strategis bagi pelaku ekonomi, pemangku kebijakan, dan masyarakat luas. Data harga pangan pada PIHPS, yang mencakup 10 komoditas pangan strategis yaitu beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir, terus menjadi referensi harga untuk kepentingan penentuan kebijakan terkait pangan di berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Survei PIHPS dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup empat jenis pasar yaitu pasar tradisional secara harian, pasar modern dan pedagang besar secara mingguan, serta produsen secara bulanan. Pada 2022, akurasi data harga PIHPS secara nasional terjaga, dengan mayoritas korelasi data dengan data inflasi BPS di atas 0,8.

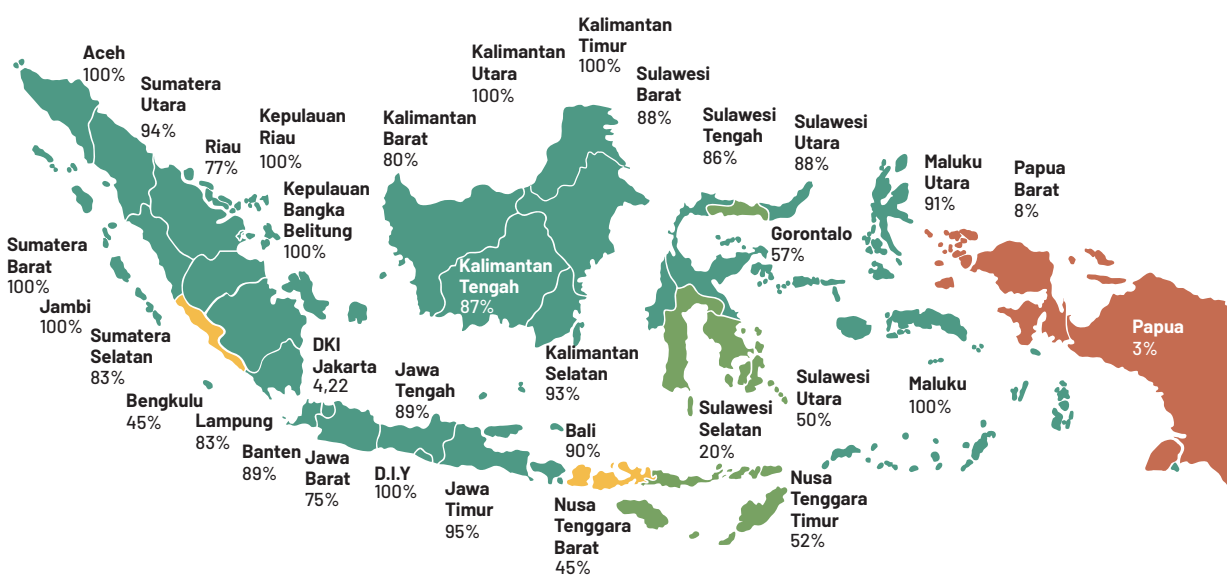
Dalam rangka memperkuat data harga barang kebutuhan pokok sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga, Kementerian Perdagangan telah memperluas cakupan wilayah pemantauan harga harian untuk 20 komoditas pangan/bahan pokok di seluruh kabupaten/kota di Indonesia melalui Sistem

Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Upaya pengembangan SP2KP melalui integrasi dengan sistem pemantauan harga di daerah tersebut merupakan amanat dari UU No. 14 tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemilihan tambahan komoditas dalam SP2KP telah mempertimbangkan keterwakilan komoditas yang tersedia di *sister city* dari kota IHK yang memiliki bobot inflasi tinggi dalam basket paket komoditas inflasi. Sejak November 2022, data SP2KP telah digunakan sebagai basis penyusunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) oleh BPS yang secara berkala disampaikan kepada seluruh daerah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai *early warning system* maupun acuan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah terutama inflasi pangan.

### 2.2.4.3. Penyusunan Peta Jalan TPID Sebagai Tindak Lanjut Penetapan Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah. *Lesson learned* atas pencapaian Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021 serta arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi menjadi juga acuan penyusunan program kerja Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2022-2024. Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 ini disusun sebagai pedoman dalam kebijakan pengendalian

Gambar 2.4. Penyusunan Peta Jalan TPID



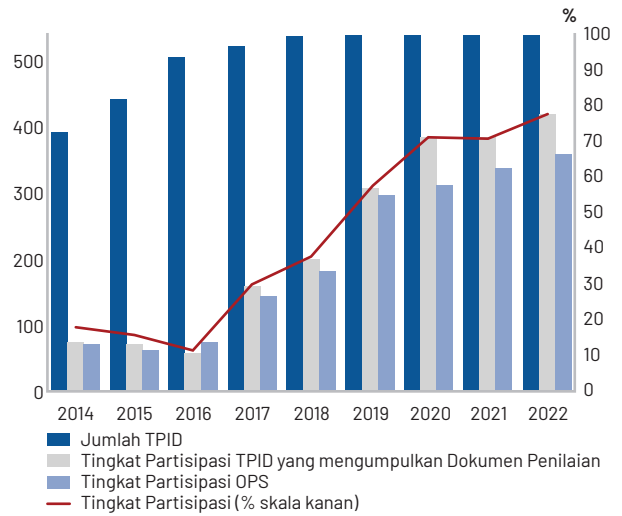
Sumber: Kementerian Dalam Negeri

inflasi ke depan, dengan tema “Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilitas Inflasi dan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”. Sebagaimana TPIP, seluruh TPID Provinsi juga menyusun peta jalan pengendalian inflasi daerah 2022-2024 sebagai acuan dalam penyusunan program kebijakan. Total TPID yang telah menetapkan peta jalan pengendalian inflasi untuk TPID provinsi ialah 34 provinsi atau 100% dari total provinsi. Sementara itu, jumlah TPID kab/kota yang telah menetapkan peta jalan pengendalian inflasi ialah sebanyak 381 kab/kota atau 75% dari total kab/kota.

**2.2.4.4. Peningkatan Keandalan TPID Antara Lain Melalui Program Pembinaan TPID/Capacity Building/Sosialisasi**

Pokja Daerah TPIP bersama dengan Sekretariat TPIP setiap tahunnya rutin melaksanakan sosialisasi kriteria evaluasi kinerja kepada seluruh anggota TPID sebelum penilaian evaluasi kinerja TPID dilakukan. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, akan disampaikan kriteria evaluasi kinerja TPID terkini dan tata cara penyusunan serta pengumpulannya. Adapun hasil dari pelaksanaan *capacity building* dan sosialisasi yang rutin tersebut adalah peningkatan jumlah partisipasi dalam evaluasi kinerja TPID 2021 (*Award 2022*), yang mencapai 78%.

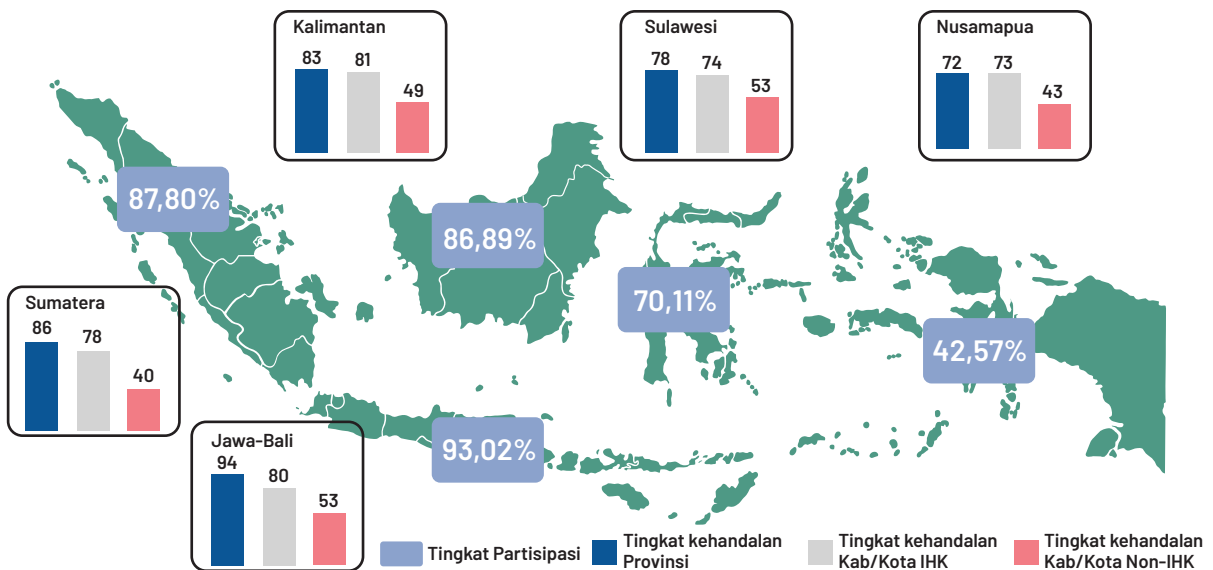
**Grafik 2.3. Tingkat Partisipasi TPID Dalam TPID Award 2022**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Sejalan dengan tingkat partisipasi, tingkat keandalan TPID yang dihitung dari median nilai dalam evaluasi kinerja relatif sejalan sesuai dengan target. Jika dilihat dari kawasannya, Jawa-Bali menjadi kawasan dengan tingkat keandalan tertinggi pada level Provinsi, dan Kabupaten/Kota Non-IHK. Sementara pada level Kabupaten/Kota IHK, kawasan Kalimantan menjadi kawasan dengan tingkat keandalan tertinggi. Secara umum, tingkat keandalan TPID tetap perlu ditingkatkan terutama untuk daerah Kabupaten/Kota Non-IHK.

**Gambar 2.5. Tingkat Partisipasi dan Keandalan TPID Berdasarkan Wilayah Dalam TPID Award 2022**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Sekretariat TPIP bersama dengan Pokja Daerah TPIP juga rutin melaksanakan kegiatan *capacity building* atau sosialisasi yang diperuntukkan kepada TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan keandalan TPID bersangkutan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan *capacity building* tersebut di antaranya adalah tata cara penyusunan program kerja, kerja sama antardaerah, mitigasi risiko, kelembagaan, program pusat terkait pengendalian inflasi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah untuk mendukung kestabilan harga di wilayahnya, serta hasil penilaian evaluasi kinerja TPID tahun sebelumnya maupun ruang untuk perbaikan ke depan.

Dalam rangka memperkuat koordinasi antara TPIP dan TPID, diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menjadi sangat penting, terutama di tengah tekanan inflasi global yang cukup tinggi. Beberapa arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi ialah memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail; memperluas KAD untuk mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah; menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah, serta menurunkan harga tiket pesawat; mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; dan mempercepat penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Arahan Rakornas PI 2022 kemudian ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP. Dalam kesempatan ini, Menko Perekonomian menyampaikan beberapa arahan penting terkait pengendalian inflasi, yaitu TPID diharapkan dapat lebih mengutamakan program-program yang dapat mendukung stabilisasi harga, seperti pelaksanaan KAD; memperluas kerja sama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya dalam rangka memperlancar distribusi; dan mendorong penggunaan BTT dan 2% DTU dalam rangka pengendalian inflasi maupun penanggulangan dampak penyesuaian harga BBM. Selain itu, Menko Perekonomian juga mengumumkan hasil penilaian evaluasi kinerja TPID 2021 (TPID Award 2022) yang telah dilaksanakan oleh tim teknis TPIP. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penetapan Keputusan Menko Perekonomian 135/2022 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022. TPID yang menjadi pemenang dan nominasi tersebut juga diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat insentif tambahan. Insentif tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.9. Pemenang TPID Award 2022**

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Bengkulu	Kota Pekanbaru	Kab. Tanah Datar
2	Jawa-Bali	Jawa Barat	Kab. Banyuwangi	Kab. Blitar
3	Kalimantan	Kalimantan Timur	Kota Pontianak	Kab. Landak
4	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Kota Gorontalo	Kab. Bone Bolango
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Kab. Lombok Barat

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tabel 2.10. Nominasi TPID Award 2022

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Riau	Kota Metro	Kab. Kepahiang
		Sumatera Utara	Kabupaten Belitung (Tanjung Pandan)	Kab. Belitung Timur
2	Jawa-Bali	Dareah Istimewa Yogyakarta	Kota Madiun	Kab. Bangli
		Jawa Timur	Kota Surakarta	Kab. Badung
3	Kalimantan	Kalimantan Utara	Kab. Tarakan	Kab. Seruyan
		Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kab. Kapuas Hulu
4	Sulawesi	Gorontalo	Kab. Parepare	Kab. Kepulauan Selayar
		Sulawesi Tengah	Kota Makassar	Kab. Pangkajene
5	Nusa Tenggara-Maluku- Papua	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Kab. Sumbawa

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

#### 2.2.4.5. Pelaksanaan Bauran Kebijakan yang Kredibel untuk Menjaga Ekspektasi, Didukung Komunikasi Kebijakan yang Rutin dan Terpercaya

Intensitas ketidakpastian global meningkat dan kenaikan harga energi serta pangan global terus berlanjut sejak awal 2022, sehingga berdampak pada kenaikan inflasi maupun ekspektasi inflasi. Berbagai perkembangan tersebut terus mendorong ekspektasi inflasi 2022, yang diindikasikan oleh *Consensus Forecast*, yang sempat mencapai level tertinggi pada publikasi September dan Oktober 2022 mencapai masing-masing sebesar 6,5% (akhir periode, yoy) dan 6,7% (akhir periode, yoy). Peningkatan ekspektasi inflasi tersebut terjadi khususnya setelah penyesuaian

harga BBM bersubsidi. Sepanjang 2022, Pemerintah dan Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat komunikasi kebijakan dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri, secara terbuka baik melalui konferensi pers maupun berbagai media komunikasi lainnya. Upaya tersebut ditempuh tidak hanya untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, namun juga menjaga persepsi positif dan keyakinan investor terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Setelah serangkaian kebijakan kenaikan BI7DRR sejak Agustus hingga Desember 2022 dan komunikasi kebijakan yang telah ditempuh untuk mengendalikan ekspektasi inflasi, ekspektasi inflasi *Consensus Forecast* di akhir 2022 mulai menurun meski masih di level tinggi dan berada di atas kisaran sasaran.



BAB III

---

# PRAKIRAAN INFLASI 2023



Inflasi 2023 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya dan kembali berada dalam kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1,0\%$ . Proyeksi inflasi yang lebih rendah tersebut diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok disagregasinya, yaitu kelompok inti, *Volatile Food* (VF), maupun *Administered Prices* (AP). Prakiraan tersebut dipengaruhi terutama oleh asumsi (i) tekanan harga komoditas global yang menurun dan nilai tukar yang terkendali; (ii) peningkatan permintaan domestik yang relatif terbatas; dan (iii) kondisi cuaca domestik yang

lebih kondusif untuk produksi pertanian. Potensi penurunan harga komoditas global, termasuk minyak global, tersebut diperkirakan dapat meminimalisir tekanan terhadap sisi fiskal sehingga menurunkan probabilitas penyesuaian harga BBM bersubsidi. Penurunan proyeksi inflasi 2023 tersebut juga didukung oleh sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) yang akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.

Ketidakstabilan geopolitik global yang berkepanjangan dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara diperkirakan akan menyebabkan pelemahan ekonomi global pada 2023. Perang Rusia dan Ukraina telah menyebabkan *supply disruption* komoditas energi dan pangan di banyak negara yang mengakibatkan peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi dan lama dari prakiraan semula. Tekanan inflasi global diperkirakan secara umum bertahan tinggi selama 2023 dan menurun pada 2024. Tekanan inflasi yang persisten tersebut mendorong berbagai bank sentral di dunia untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter yang berlangsung sejak 2022, walaupun frekuensinya diperkirakan berkurang pada 2023. Kenaikan suku bunga kebijakan tersebut diperkirakan akan menyebabkan pelemahan ekonomi global, bahkan beberapa negara diperkirakan mengalami resesi. Selain itu, kenaikan suku bunga kebijakan di beberapa negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS), menyebabkan terjadinya *capital outflows* yang mendorong pelemahan nilai tukar berbagai negara *emerging*, termasuk Rupiah. Dari sisi domestik, kenaikan permintaan domestik diperkirakan masih terbatas selama tahun 2023 dan belum pulih ke tingkat sebelum pandemi di antaranya karena penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 2022. Ekspektasi inflasi 2023 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya didukung oleh penurunan risiko inflasi dari harga komoditas yang diatur Pemerintah dan harga pangan yang relatif terjaga. Berbagai asumsi ekonomi global dan domestik yang melandasi proyeksi inflasi domestik 2023 sebagaimana pada Tabel 3.1. Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi inflasi 2023 diperkirakan akan kembali terjangkau dalam kisaran sasaran sebesar  $3,0\% \pm 1\%$ .

Kondisi pemulihan perekonomian global dan domestik, perkembangan ekspektasi inflasi, serta dampak lanjutan inflasi VF dan AP menjadi faktor penentu utama pencapaian inflasi inti 2023. Dari sisi eksternal, harga komoditas impor diperkirakan menurun didukung oleh permintaan ekonomi global yang melemah karena berlanjutnya krisis geopolitik dan kebijakan moneter ketat di berbagai negara (Tabel 3.1). Dari sisi domestik, akselerasi pemulihan ekonomi diharapkan terjadi secara gradual sepanjang tahun 2023 didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, walau peningkatan permintaan domestik cenderung tertahan akibat penyesuaian harga BBM

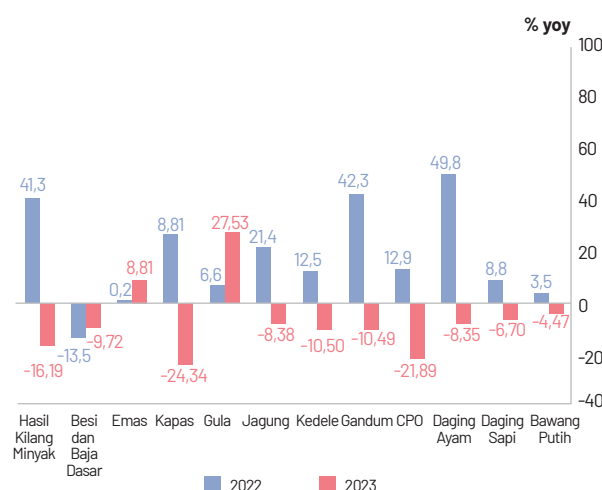
Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Global dan Domestik

		2022	2023
1	Harga Minyak Dunia (ICP)	97	▼
2	IHIM (Semua IHIM dalam average % yoy)	19,53	▼
2.1	• IHIM Oil	41,28	▼
2.2	• IHIM Non Oil	14,48	▼
2.2.1	• IHIM Pangan	12,69	▼
2.2.2	• IHIM Non Pangan Non Oil	19,17	▼
3	Nilai Tukar Rupiah	14.860	▲
4	Produk Domestik Bruto (% yoy)	5,24	▼
5	Ekspetasi Inflasi (average yoy)	4,3	▼

\*Angka prakiraan per Juni 2023

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, World Bank, diolah

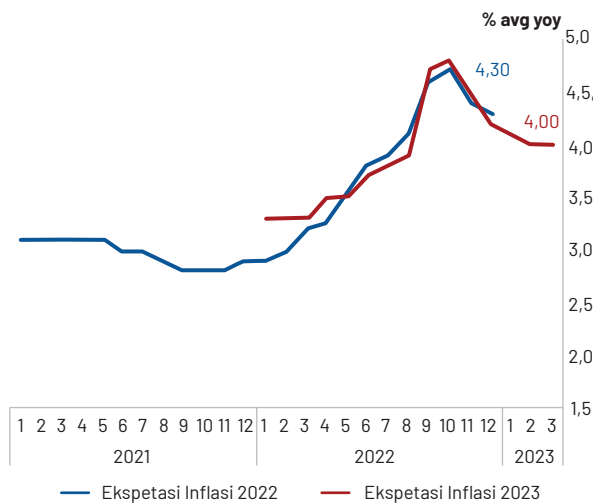
Grafik 3.1. Prakiraan Harga Komoditas Global



Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg dan World Bank (future per Juni 2023), diolah

bersubsidi pada 2022 dan kebijakan moneter *pro-stability*. Oleh karena itu, Pemerintah secara konsisten memberikan berbagai stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain pelonggaran uang muka untuk kredit sektor properti, dan relaksasi aturan kredit untuk UMKM maupun sektor pariwisata. Pergerakan nilai tukar Rupiah diproyeksikan cenderung depresiatif disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter negara maju dan *interest rate differential* yang menurun. Sementara itu, dampak lanjutan inflasi kelompok VF dan AP ke inflasi inti diperkirakan menurun seiring dengan asumsi produksi pangan yang lebih baik dan penyesuaian harga energi yang minimal. Ekspektasi inflasi juga diperkirakan menurun karena tekanan inflasi dari sisi *supply* yang mereda (Grafik 3.2).

Grafik 3.2. Ekspektasi Inflasi



Sumber: Consensus Economics

Tekanan inflasi VF diperkirakan menurun didukung oleh permintaan yang cenderung tertahan, harga pangan global yang menurun, dan faktor cuaca yang lebih kondusif. Permintaan pangan domestik pada 2023, khususnya dari sektor horeca, diperkirakan tidak setinggi 2022. Kondisi cuaca sepanjang 2023 diperkirakan kondusif mendukung produksi pangan. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca 2023 akan kembali berada pada kondisi normal didukung oleh fenomena La Nina yang akan menuju netral pada akhir triwulan I tahun 2023. Secara umum, curah hujan pada 2023 diperkirakan kembali pada intensitas normalnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan curah hujan pada 2022. Sementara itu, prospek produksi tahunan diperkirakan meningkat didukung oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas area tanam. Risiko *supply disruption* pangan global juga diperkirakan menurun. Untuk menekan risiko terjadinya gangguan pasokan, Pemerintah melalui TPIP terus memperkuat sinergi dengan menyiapkan berbagai langkah antisipasi dalam meminimalisir gangguan produksi dan distribusi pangan dengan tetap berpedoman pada kerangka 4K. Di samping itu, GNPIP yang digagas pada 2022 akan dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung stabilitas harga pangan.

Inflasi AP 2023 diperkirakan lebih rendah dari tahun sebelumnya terutama karena penurunan harga energi global. Pada 2023, harga energi global diperkirakan lebih rendah dari 2022 sehingga dapat mendorong penurunan harga keekonomian sejumlah komoditas energi domestik. Ke depan, *gap* harga jual dengan harga keekonomian energi diperkirakan semakin menyempit, sehingga probabilitas penyesuaian harga energi domestik terutama golongan bersubsidi oleh Pemerintah semakin berkurang. Inflasi komoditas jasa angkutan penumpang umumnya juga diperkirakan lebih rendah seiring dengan minimnya dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi, di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat dan kembali normal ke level prapandemi. Di sisi lain, tekanan inflasi rokok dan tembakau diperkirakan meningkat pada 2023, terutama disebabkan oleh kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2023 dengan rerata tertimbang sebesar 10%. Transmisi kenaikan tarif cukai oleh produsen rokok diperkirakan bersifat *front loading* di awal tahun dan kemudian berlanjut *gradual* dan terbatas hingga hingga akhir tahun. Pada 2023, tekanan inflasi AP juga diperkirakan berasal dari penyesuaian tarif administrasi lainnya, seperti tarif jalan tol maupun tarif yang diatur oleh Pemerintah Daerah, yaitu tarif Perusahaan Air Minum (PAM) dan tarif parkir.

Secara spasial, proyeksi inflasi yang menurun juga diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Inflasi IHK 2023 diperkirakan menurun di seluruh wilayah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan sebagian besar diperkirakan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional  $3,0\% \pm 1\%$ . Inflasi inti diperkirakan menurun khususnya karena permintaan domestik yang tertahan dan harga komoditas global yang menurun. Inflasi VF diperkirakan menurun didorong oleh permintaan domestik yang tidak setinggi 2023, khususnya dari sektor horeca. Namun demikian, produksi pangan yang masih terdampak beberapa faktor fundamental, seperti cuaca dan pola tanam, diperkirakan masih akan meningkatkan inflasi VF di berbagai daerah sentra produksi, khususnya wilayah Jawa. Inflasi AP diperkirakan menurun karena

minimnya kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan harga komoditas energi bersubsidi di tengah perbaikan mobilitas masyarakat yang mendorong penyesuaian tarif aneka angkutan, terutama AU, di wilayah luar Jawa. Ke depan, koordinasi yang kuat dalam TPID perlu terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat meminimalisir tekanan inflasi di berbagai daerah, baik yang berasal dari komoditas bahan pangan strategis, maupun dari kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berdampak pada inflasi AP.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan perbaikan struktural yang menyeluruh.<sup>11</sup> Anggaran ketahanan pangan pada 2023 mencapai Rp104,2 triliun, sedikit meningkat dari *outlook* 2022 sebesar Rp89 triliun, yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan dan modernisasi.

---

11 Siaran Pers Menteri Keuangan tanggal 16 Agustus 2022 terkait RAPBN 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan





BAB IV

---

# ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI 2023



Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK berada dalam kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  pada 2023. Kelima langkah strategis yang disepakati dalam *High Level Meeting* (HLM) TPIP pada 20 Februari 2023 tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah yaitu untuk memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; menjaga inflasi VF, utamanya pada masa Hari Besar

Keagamaan Nasional (HBKN) berada dalam kisaran 3,0-5,0%; memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah; serta memperkuat ketersediaan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada 2023 sebagai bagian dari peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024.

## 4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023

### 4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia 2023 akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian dalam sinergi serta komunikasi yang erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Bauran kebijakan tersebut ditempuh untuk memitigasi dampak rambatan dari gejolak global, antara lain risiko resesi ekonomi dan tingginya inflasi, berlanjutnya kebijakan suku bunga tinggi di berbagai negara utama dunia, risiko tekanan pelemahan nilai tukar Rupiah, dan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan global. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia akan terus difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (*pro-stability*) untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan stabilitas makroekonomi serta keuangan. Gejolak global telah dan dikhawatirkan terus berdampak pada kinerja perekonomian nasional, termasuk tingkat inflasi, nilai tukar, dan aliran modal asing, sehingga meningkatkan tantangan terhadap kebijakan moneter (trilema kebijakan moneter). Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan 3 (tiga) instrumen kebijakan moneter, yaitu kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa.

Kebijakan suku bunga akan dilanjutkan secara *front loaded*, *pre-emptive*, dan *forward looking* untuk memastikan terkendalinya ekspektasi inflasi dan inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran  $3,0 \pm 1\%$ . Bank Indonesia akan secara konsisten melakukan kalibrasi secara terukur (*well-calibrated*), perencanaan secara matang (*well-planned*), dan komunikasi secara transparan (*well-communicated*) terhadap respons kebijakan suku bunga lebih lanjut. Perumusan respons kebijakan suku bunga dimaksud terutama akan mempertimbangkan kondisi perekonomian khususnya ekspektasi inflasi dan inflasi inti, pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit perbankan, perkembangan perekonomian global, khususnya yang berdampak terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah, dan daya tarik imbal hasil SBN.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diarahkan untuk memitigasi dampak rambatan gejolak global terhadap pengendalian inflasi maupun upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah yang stabil menjadi faktor penting dalam mengendalikan dampak harga energi dan pangan global yang tinggi terhadap inflasi dalam negeri (*imported inflation*), menjaga kinerja fiskal Pemerintah, khususnya dalam menjaga daya tarik *yield* SBN untuk kebutuhan pembiayaan APBN, serta mempengaruhi neraca perbankan dan neraca korporasi, termasuk menjaga keyakinan pengusaha dan masyarakat. Kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui *triple intervention* pada 2023 akan terus dilakukan untuk menjaga nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Penguatan strategi operasi moneter juga akan ditempuh untuk mendukung efektivitas kenaikan suku bunga BI7DRR dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, untuk memperkuat stabilisasi Rupiah lebih lanjut, Bank Indonesia pada 2023 akan terus menjaga dan meningkatkan kecukupan cadangan devisa, mengoptimalkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga daya tarik imbal hasil SBN, termasuk melanjutkan strategi *twist operation*.

Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengendalian inflasi pada 2023 juga akan terus berlanjut. Dalam rangka pengendalian inflasi, kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia akan diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal-moneter bersama dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, sinergi erat TPIP-TPID dan GNPIP bersama Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, maupun mitra strategis lainnya juga akan semakin ditingkatkan untuk mengendalikan inflasi terutama yang berasal dari sisi penawaran.

Dalam rangka sinergi TPIP-TPID dan GNPIP, terdapat tujuh program unggulan yang akan dilakukan pada 2023 dan difokuskan pada upaya pengendalian inflasi yang bersifat struktural, *forward looking*, dan berbasis digital. Program tersebut secara umum terdiri dari: (i) dukungan optimalisasi anggaran Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk operasi pasar, pasar murah, dan Strategi Pengendalian Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga daya beli; (ii) dukungan memperkuat ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya; (iii) peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi pertanian untuk mendukung pengembangan kluster pangan secara *end to end*; (iv) perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), termasuk penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di daerah; (v) penguatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk monitoring untuk optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan; (vi) penguatan data/informasi diantaranya terkait neraca pangan daerah, termasuk melalui *Early Warning System* (EWS) harga pangan daerah; serta (vii) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi, antara lain dalam bentuk penguatan *capacity building*, sosialisasi dan komunikasi, serta penguatan koordinasi kelembagaan.

#### 4.1.2. Kebijakan Fiskal

Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus arahan Presiden dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan fiskal memberikan dukungan pada seluruh program pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Strategi kebijakan fiskal pada 2023 yang diarahkan pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap mewaspadaikan potensi risiko kondisi global yang masih dalam ketidakpastian. APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen stabilisasi perekonomian untuk menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pada 2023, Pemerintah terus melanjutkan program-program perlintas guna menjamin terjaganya beli bagi masyarakat miskin dan rentan. Dalam APBN 2023, anggaran perlintas dialokasikan sebesar Rp476,0 triliun. Berbagai program difokuskan pada output prioritas yang meliputi menjaga akses masyarakat, terutama miskin dan rentan, terhadap kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, energi (bahan bakar rumah tangga, listrik), perumahan, dan kebutuhan lainnya. Dalam menunjang program-program tersebut, kebijakan perlintas diarahkan untuk

perbaiki data dan penargetan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan program pemberdayaan, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan perlintas sepanjang hayat, serta pelaksanaan perlintas yang adaptif terhadap krisis.

Di sisi subsidi, APBN berperan sebagai *shock absorber* di tengah masih tingginya risiko global. Alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp339,6 triliun, antara lain Rp139,4 triliun untuk BBM dan LPG Tabung 3kg dan Rp72,6 triliun untuk listrik. Pada 2023, kebijakan subsidi solar menaikkan subsidi solar tetap sebesar Rp1.000/liter, naik dari Rp500/liter dari 2022. Untuk memperkuat sektor pertanian tanaman pangan, telah dialokasikan subsidi pupuk yang juga masuk dalam klasifikasi anggaran ketahanan pangan, untuk dua jenis pupuk dan sembilan jenis komoditas. Selain itu, dukungan subsidi difokuskan untuk peningkatan pelayanan transportasi umum, pengembangan akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR, serta insentif perpajakan untuk stimulus dunia usaha.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan perbaikan struktural yang menyeluruh. Anggaran ketahanan pangan pada 2023 mencapai Rp104,2 triliun, meningkat dari realisasi 2022 sebesar Rp89,0 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk melalui peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas, baik pertanian maupun perikanan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan dan modernisasi. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan perbaikan struktural yang menyeluruh.

Dalam upaya mengurangi disparitas harga antardaerah, Pemerintah terus mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran distribusi. Anggaran infrastruktur mencapai Rp 391,7 triliun sebagai dukungan program ketahanan pangan, energi, dan konektivitas. Selain itu, alokasi DAK fisik juga berperan dalam pembangunan infrastruktur bidang jalan, transportasi pedesaan dan perairan, serta bidang perdagangan.

### 4.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan 2023 semakin diperkuat antara lain melalui transisi peran Badan Pangan Nasional yang lebih menyeluruh sebagaimana pada Perpres No.66 Tahun 2021. Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden memiliki tugas utama untuk melaksanakan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan<sup>12</sup>. Arah kebijakan pangan 2023 difokuskan pada upaya penguatan instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama dengan Kementerian/ Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, disertai dengan penguatan pemantauan upaya pengendalian inflasi secara berkelanjutan. Selain itu, arah kebijakan pangan 2023 juga mencakup upaya untuk memperkuat kualitas data pangan nasional melalui program satu data pangan.

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan bidang pangan, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan sejumlah ketentuan untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beberapa ketentuan yang telah efektif diberlakukan di antaranya ialah pembaruan harga acuan pembelian komoditas pangan, penyempurnaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan program stabilisasi pasokan, serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi. Ke depan, penguatan implementasi kebijakan pangan terutama di daerah, akan terus diupayakan antara lain melalui peningkatan kelancaran distribusi pangan antardaerah dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk pengendalian inflasi pangan.

### 4.1.4. Kebijakan Energi

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi masih menjadi prioritas utama Pemerintah pada 2023, sehingga berbagai kebijakan termasuk terkait energi domestik akan terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan pelaku usaha. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan harga

komoditas khususnya minyak yang masih mengalami fluktuasi, tantangan implementasi kebijakan energi masih mengemuka, khususnya agar Pemerintah tetap dapat memastikan keterjangkauan harga maupun akses masyarakat terhadap BBM, LPG, dan tarif listrik yang mendapatkan subsidi dan/atau kompensasi.

Upaya mewujudkan keterjangkauan harga dan akses masyarakat terhadap komoditas energi terus didukung oleh subsidi APBN dan diperkuat melalui upaya transformasi subsidi tepat sasaran. Alokasi anggaran untuk subsidi energi pada 2023 mencapai Rp212 triliun, meningkat dibandingkan Rp172 triliun pada 2022. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pemberian subsidi juga disertai oleh upaya transformasi energi, termasuk pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Transformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran akan disesuaikan menjadi subsidi berbasis penerima manfaat yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat. Transformasi subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik rumah tangga selanjutnya akan dilakukan dengan memanfaatkan data yang terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya, melalui koordinasi antarKementerian dan Lembaga, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, PT. PLN, dan PT. Pertamina. Untuk memastikan kemudahan para nelayan untuk mendapatkan solar subsidi, koordinasi dilakukan antara lain oleh Kementerian BUMN, PT. Pertamina, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Selain itu, PT. Pertamina juga memastikan penggunaan Solar dan Peralite kepada konsumen secara tepat sasaran dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Akses masyarakat terhadap energi tetap dijaga untuk menciptakan ketahanan energi nasional. Dalam rangka mendukung keterjangkauan harga dan ketersediaan energi di seluruh negeri, Pemerintah melanjutkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Hingga 2022, Pemerintah telah membangun 423 lokasi

<sup>12</sup> Pembentukan Badan Pangan Nasional didasarkan pada Perpres Nomor 66 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2021 sebagai mandat dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

penyedia BBM Satu Harga dan akan berlanjut di 2023 dengan target sebanyak 89 lokasi tambahan. Untuk mendukung ketahanan energi, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada akhir 2022, Pemerintah pada Februari 2023 mulai melaksanakan program B35, yaitu peningkatan bauran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis solar sebesar 35% dari sebelumnya 30%. Program ini selanjutnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

#### 4.1.5. Kebijakan Konektivitas

Pada 2023 penguatan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan mendukung perbaikan pada pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Program prioritas peningkatan konektivitas wilayah dilaksanakan melalui lima kegiatan prioritas untuk melanjutkan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, meliputi: (i) konektivitas transportasi jalan; (ii) konektivitas transportasi kereta api; (iii) konektivitas transportasi laut; (iv) konektivitas transportasi udara; dan (v) konektivitas transportasi darat.

Kebijakan peningkatan aksesibilitas juga terus difokuskan untuk meningkatkan kelancaran distribusi. Kebijakan peningkatan aksesibilitas tersebut dilaksanakan dengan (i) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (ii) menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas, yaitu untuk *food estate*, industri dan pariwisata; (iii) melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi

tarif jasa pelabuhan; (iv) melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer dan jaringan hub and spoke penerbangan, serta pembangunan bandara perairan (*waterbase airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan; (v) melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru maupun lanjutan serta peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan; (vi) Menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan meliputi darat, kereta api, laut, dan udara, serta program tol laut bersubsidi dan jembatan udara; (vii) meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemanfaatan skema DAK dan Program Hibah untuk Penanganan Jalan Daerah (PHJD), rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang; serta (viii) melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan memastikan sinkronisasinya dengan infrastruktur lain.

#### 4.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan terus diarahkan untuk mendukung akselerasi ekonomi. Pada 2023, upaya strategis ketenagakerjaan mencakup: (i) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; (ii) pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi; dan (iii) penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja. Program Kartu Prakerja juga akan dilaksanakan dengan skema normal yang fokus pada peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dengan metode pelatihan daring, luring, dan bauran. Target penerima Kartu Prakerja 2023 sebanyak satu juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp4,37 triliun. Terkait penetapan upah minimum tahun 2023, penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10%.

## 4.2. Program Kerja TPIP 2023

### 4.2.1. Keterjangkauan Harga

#### 4.2.1.1. Stabilisasi Harga

##### 4.2.1.1.1. Evaluasi Harga Eceran dan Acuan Komoditas Pangan Strategis

Evaluasi atas Harga Acuan Pembelian di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen (HAP), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas pangan strategis akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan harga komoditas pangan sekaligus memberi insentif bagi petani dan/atau peternak untuk produksi. HAP yang sesuai dengan kondisi terkini yang mempertimbangkan biaya pokok produksi dan harga pasar dapat memberikan kepastian bagi para petani dan/atau peternak, sekaligus mengurangi potensi gejolak dan fluktuasi harga di tingkat konsumen. Evaluasi atas struktur harga komoditas pangan yang mempertimbangkan kualitas produk dan keseimbangan harga dari hulu ke hilir, serta daya beli masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian HPP dan HET dengan kondisi terkini. Penetapan acuan harga khususnya HET perlu dipertimbangkan dengan baik mengingat implikasi terhadap tingkat inflasi.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menetapkan HPP dan HET untuk gabah dan beras pada Maret 2023. HPP untuk gabah dan beras yang telah ditetapkan yaitu Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000/kg, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp6.200/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG Rp6.300/kg, dan beras di gudang Perum BULOG Rp9.950/kg. HPP tersebut selanjutnya akan menjadi panduan bagi Perum BULOG untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). Sementara itu, HET yang akan menjadi acuan bagi pedagang untuk dikenakan kepada konsumen ditetapkan sesuai dengan zona wilayah. Zona 1 untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 mencakup wilayah untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, serta Kalimantan. Zona 3 mencakup wilayah Maluku dan Papua. HET yang ditetapkan untuk beras medium

zona I, II, dan III masing-masing sebesar Rp10.900/kg, Rp11.500/kg, dan Rp11.800/kg. Untuk beras premium, HET zona I, II, dan III masing-masing ditetapkan sebesar Rp13.900/kg, Rp14.400/kg, dan Rp14.800/kg.

Upaya peningkatan stabilisasi dan pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk saat HBKN pada 2023 terus diperkuat. Badan Pangan Nasional sebagai koordinator dalam program kerja ini akan didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Capaian dari program kerja ini akan diukur melalui perhitungan rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional, yaitu: (i) harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP)/Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Keekonomian; serta (ii) harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian. Selanjutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan di wilayah Kepolisian Daerah akan secara konsisten memperkuat upaya pengawasan harga maupun stok bahan pokok, termasuk pada masa HBKN dengan melakukan monitoring setiap bulan, atau sebanyak 12 kali dalam setahun.

##### 4.2.1.1.2. Optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/ Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/ Bazar/Gelar/Gerakan Pangan Murah

Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengupayakan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau. Pada 2023, komitmen Pemerintah tersebut akan diwujudkan melalui berbagai upaya yang mencakup optimalisasi kegiatan Operasi Pasar (OP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)<sup>13</sup>, berbagai kegiatan bazar, gelar, dan Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah di Indonesia. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mencegah dan/atau menangani terjadinya gejolak harga pangan, antara lain beras. Sesuai instruksi Kepala Badan Pangan Nasional, SPHP oleh Perum BULOG pada 2023 akan dilakukan sepanjang tahun dengan volume sekitar 1,2 juta ton, atau sesuai dengan volume operasi pasar pada 2022. Dengan demikian, target yang akan dicapai oleh Perum BULOG adalah menjaga penyaluran beras

<sup>13</sup> Sebelumnya bernama program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)

dan kecukupan stok di kisaran 0,8 - 1,3 juta ton per tahun. Lebih lanjut, saat ini tengah dikaji perluasan pelaksanaan SPHP untuk komoditas jagung dan kedelai. Selain itu, pelaksanaan kegiatan OP/bazar/gelar/gerakan pangan murah akan terus dilakukan antara lain oleh Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Daerah, termasuk lintas Kementerian dan Lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, koordinasi bersama Bank Indonesia dalam kerangka GNPIP juga diperluas pada komoditas selain beras, yaitu minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, daging, ikan, serta komoditas lainnya yang akan disesuaikan dengan risiko inflasi dan karakteristik masing-masing daerah.

Pelaksanaan kegiatan SPHP akan terus dioptimalkan melalui penguatan mekanisme pelaksanaan dan perbaikan target pasar. Penguatan mekanisme SPHP dilakukan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan SPHP antar instansi yang berwenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Sementara itu, perbaikan target pasar SPHP dilakukan antara lain melalui: (i) penataan kembali pasar-pasar target pelaksanaan SPHP yang memberikan pengaruh besar pada pergerakan harga beras dan komoditi lainnya; dan (ii) optimalisasi jalur distribusi dengan mendekatkan akses konsumen pada komoditas program SPHP melalui kerjasama dengan Rumah Pangan Kita dan Toko Tani Kita. Selain itu, perbaikan target pasar SPHP juga dilakukan melalui penyediaan kemasan produk dalam ukuran kecil sehingga lebih memudahkan bagi konsumen. Pengemasan komoditas SPHP dari kemasan 50 kg menjadi kemasan yang lebih kecil juga mempermudah proses pemeriksaan kualitas sebelum penyaluran sehingga mendukung kualitas produk SPHP yang terjaga.

#### 4.2.1.1.3. Koordinasi penetapan kebijakan Administered Prices (AP)

Tekanan eksternal khususnya dari harga energi global pada 2023 diperkirakan menurun sehingga potensi penyesuaian kebijakan energi yang mempengaruhi inflasi AP masih minim. Namun demikian, risiko dan tantangan inflasi ke depan termasuk dari harga energi global masih mengemuka. Risiko kenaikan harga energi global dapat menyebabkan selisih harga

keekonomian dengan harga jual eceran domestik, khususnya komoditas subsidi semakin melebar. Hal ini juga mendorong harga avtur domestik lebih tinggi yang dapat berdampak pada peningkatan inflasi tarif AU. Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus menjaga sinergi dan koordinasi dalam penetapan kebijakan terkait inflasi AP, dengan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan *magnitude*, *timing*, dan *sequencing* yang terukur serta memperhatikan seluruh aspek sektoral.

#### 4.2.1.1.4. Menjaga Volatilitas Nilai Tukar

Sebagai upaya pengendalian inflasi terutama yang bersumber dari tekanan harga barang impor (*imported inflation*), Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Upaya tersebut menjadi semakin penting untuk mengantisipasi risiko *imported inflation* khususnya terhadap inflasi inti. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan berupaya menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah maksimal sebesar 15% pada 2023. Langkah tersebut ditempuh antara lain melalui berbagai kebijakan, yaitu stabilisasi Rupiah, akselerasi pendalaman pasar keuangan, dan penguatan cadangan devisa termasuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui kerja sama keuangan internasional.

#### 4.2.1.2. Mengelola Permintaan

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan akan terus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan, menjaga momentum pemulihan dan mendorong kebangkitan perekonomian nasional. Untuk itu, koordinasi erat antara kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, baik secara internal maupun eksternal, yang antara lain tercermin dari inflasi IHK yang kembali ke sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ , defisit APBN yang terkendali, dan nilai tukar Rupiah yang stabil. Penguatan koordinasi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan dilanjutkan untuk memastikan ketahanan lembaga keuangan, sehingga dapat terus mendorong kredit dan pembiayaan.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 akan diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Kebijakan moneter pada 2023 akan difokuskan pada upaya stabilitas (*pro-stability*), yaitu dengan menjaga nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  lebih awal. Kebijakan makroprudensial pada 2023 akan terus bersifat longgar untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*), dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau juga akan terus diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut (*pro-growth*).

## 4.2.2. Ketersediaan Pasokan

### 4.2.2.1. Memperkuat Produksi Domestik

Dalam rangka optimalisasi produktivitas pangan, Bank Indonesia akan terus memperluas adopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya pertanian. Selaras dengan penyempurnaan model bisnis yang telah dilakukan pada 2022, Bank Indonesia pada 2023 akan melanjutkan upaya perluasan implementasi adopsi teknologi pertanian dengan target tujuh UMKM pangan binaan. Tidak hanya memanfaatkan teknologi IoT, upaya peningkatan produktivitas di beberapa wilayah juga akan dipadukan dengan penerapan budidaya organik sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lebih tinggi.

Pengembangan lumbung pangan (*food estate*) terus berlanjut sebagai upaya pemenuhan ketahanan pangan domestik dalam jangka panjang. Pada 2023, pengembangan lumbung pangan untuk komoditas padi akan dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Sumatera Utara. Selain pengembangan wilayah, peningkatan produksi pangan khususnya hortikultura melalui kawasan sentra produksi pangan juga dilakukan terutama untuk wilayah eksisting, dengan target yang akan dicapai untuk komoditas bawang merah, bawang putih, aneka cabai, dan komoditas pendukung di lokasi lumbung pangan Temanggung seluas 500 ha dan Wonosobo seluas 350 ha. Upaya peningkatan produksi padi dilakukan di 33 Provinsi yang terdiri dari kegiatan budi daya padi kaya gizi (biofortifikasi), budidaya padi ramah lingkungan, model/*demonstration plot* (demplot), Optimalisasi

Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP) padi, pengembangan budidaya padi lahan kering, demplot padi SAHAJA (Salibu-Hazton-Jarwo), pengembangan budidaya padi rawa dan *food estate/integrated farming* padi/Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/kemitraan padi.

Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan produksi hortikultura terus difokuskan khususnya untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai. Dalam kaitan ini, Kementerian Pertanian akan memperkuat sinergi dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait dalam pengembangan kampung hortikultura untuk mewujudkan pengembangan kampung hortikultura untuk komoditas bawang merah seluas 8,9 ribu ha atau sebanyak 750 kampung dan untuk komoditas cabai ditargetkan seluas 7,18 ribu ha atau sebanyak 650 kampung. Pengembangan kampung hortikultura tersebut dilakukan di 34 provinsi di Indonesia untuk menopang ketersediaan komoditas hortikultura di wilayah setempat maupun daerah sekitarnya, serta diharapkan dapat mendorong pengembangan sentra-sentra produksi baru yang lebih luas.

Optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, serta penerapan praktik budidaya yang baik sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) terus dilakukan untuk memastikan upaya peningkatan produksi pangan dapat konsisten dan berkelanjutan. Sarana produksi dan infrastruktur pertanian yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan sektor pertanian. Dalam hal ini, Kementerian PUPR pada 2023 akan melaksanakan pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan target masing-masing sebesar 5,5 ribu ha dan 105 ribu ha. Sementara itu, Perum BULOG akan mendorong penyerapan pagu anggaran PMN untuk pembangunan sarana produksi dan infrastruktur dengan target sebesar 75% pada 2023. Selain sarana dan prasarana, penerapan praktik budidaya yang baik juga merupakan kunci penting dalam menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas. Penerapan GAP dapat menjamin *sustainability*, menjaga keamanan dan memastikan keselamatan petani dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Sementara itu, penerapan GHP baik saat panen, pascapanen, standarisasi mutu dan pengelolaan lingkungan diperlukan untuk memastikan produk pertanian memenuhi persyaratan

mutu dan keamanan pangan. Selanjutnya, penerapan GMP dapat memastikan produksi dan pengolahan hasil pertanian dilakukan secara baik dan benar sehingga memenuhi standar mutu yang diharapkan dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pada 2023, Kementerian Pertanian akan berupaya meningkatkan jumlah kebun dan lahan usaha yang telah menerapkan GAP dan GHP dengan target sebesar 5%.

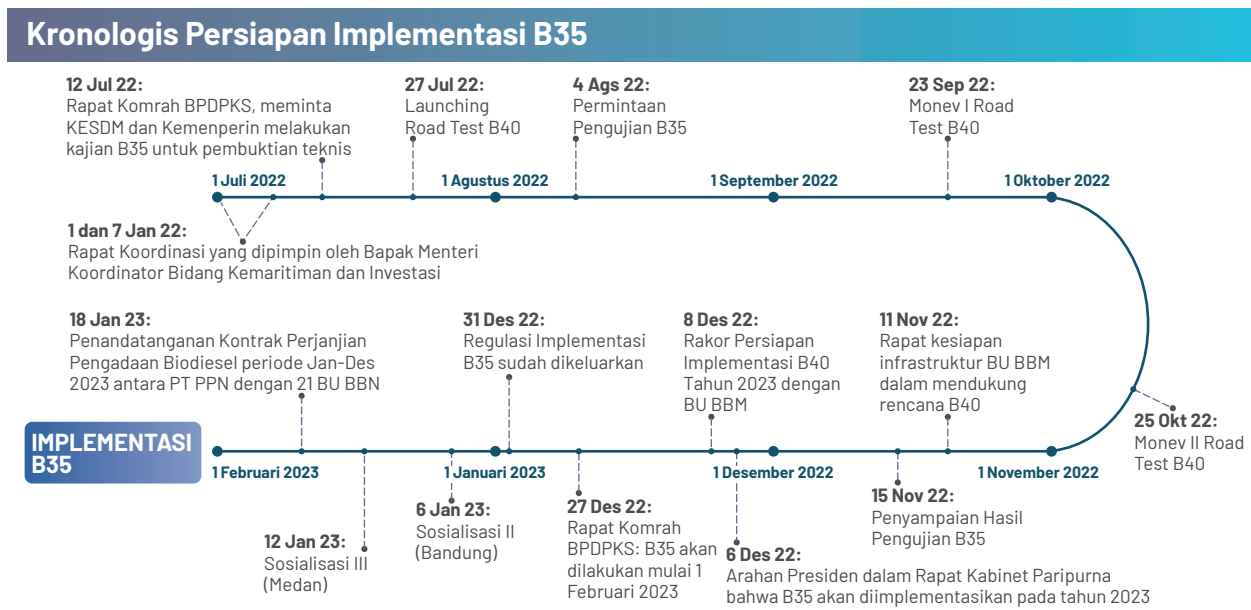
Upaya peningkatan produksi dan ketersediaan bahan pangan khususnya hasil peternakan, perkebunan tebu, dan kelapa sawit juga terus dilanjutkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk komoditas pangan hasil ternak, Kementerian Pertanian pada 2023 akan berupaya meningkatkan produksi: (i) protein hewani sebesar 4,64 juta ton, khususnya daging sapi agar dapat memenuhi kebutuhan domestik dan menjaga stabilitas harga daging; dan (ii) telur dengan kenaikan maksimal per tahun sebesar 1,48% dengan pertimbangan produktivitas dan persistensi produksi, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan telur ayam agar dapat menjaga stabilitas harga baik di tingkat peternak dan konsumen. Terkait komoditas gula, upaya percepatan pemenuhan ketersediaan gula nasional berlanjut pada 2023, sehingga diharapkan pada 2024 Indonesia sudah dapat mencapai swasembada gula. Untuk itu, Kementerian terus mendorong peningkatan produksi gula antara lain melalui kegiatan intensifikasi tebu (rawat ratoon) seluas 4,7 ribu ha yang dilaksanakan di 7 provinsi, yaitu Jawa Timur seluas 1700 ha, Jawa Tengah 1100 ha, Jawa Barat seluas 500 ha, DI Yogyakarta seluas 50 ha, Lampung seluas 400 ha, Sumatera Selatan seluas 400 ha, Nusa Tenggara Barat seluas 200 ha, dan Sulawesi Selatan seluas 350 ha. Sementara itu, untuk peningkatan produksi CPO dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik maupun ekspor, Kementerian Pertanian akan melanjutkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mencakup peningkatan produksi, produktivitas, dan perluasan lahan kebun sawit. Pada 2023, target produksi yang akan dicapai adalah sebesar 56 juta ton, produktivitas sebesar 4 ton/ha, dan perluasan lahan kebun sawit menjadi sebesar 15,85 juta ha. Pada 2023 Kementerian Pertanian

merencanakan untuk melakukan peningkatan produksi CPO hingga mencapai 56,04 juta ton dengan produktivitas 4,00 ton/ ha, dan luas lahan perkebunan kelapa sawit secara nasional seluas 15,85 juta ha dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan seluas 14 juta ha. Sementara itu, target kegiatan PSR 2023 seluas 180 ribu ha tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.

Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan akan terus didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pengolahan serta penyimpanan produk pertanian. Dalam rangka penyimpangan produk pertanian, Badan Pangan Nasional akan memperkuat tata kelola sistem logistik pangan dan manajemen rantai pasok pangan. Target yang akan dicapai pada 2023 berupa penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan untuk memperpanjang umur simpan berupa *cold storage* dan *dry storage* sebanyak 40 unit. Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan melanjutkan upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura dengan target kenaikan sebesar 5% setiap tahun.

Peningkatan pasokan untuk komoditas bahan bakar terus diperkuat, terutama dengan penggunaan bahan bakar non-BBM. Pada sidang kabinet 6 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar implementasi B35 dimulai pada 2023 sebagai upaya meningkatkan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Pada 1 Februari 2023, Pemerintah resmi mewajibkan penggunaan biodiesel minimal sebesar 35% dalam campuran BBM dengan total alokasi sebesar 13,15 juta kilo liter sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri ESDM No. 208.K/EK.05/DJE/2022. Meski demikian, Pemerintah masih memberikan kelonggaran implementasi pencampuran B35, yaitu pencampuran maksimal 30% hingga 31 Juli 2023 sehubungan dengan keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana terpasang di lokasi terminal BBM tertentu. Per tanggal 1 Agustus 2023, seluruh badan usaha BBM diwajibkan untuk sudah menyediakan B35 sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Gambar 4.1. Kronologis Persiapan Implementasi B35



#### 4.2.2.2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Di tengah tantangan ketahanan pangan yang semakin besar, Pemerintah akan terus melanjutkan sinergi dalam mengupayakan penguatan cadangan pangan Pemerintah (CPP) domestik. Di tingkat pusat, koordinasi dilakukan lintas Kementerian dan Lembaga, antara lain Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan untuk pemenuhan CPP baik untuk beras maupun komoditas pangan strategis lainnya, misalnya jagung dan kedelai. Terkait beras, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum BULOG untuk melakukan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton, dengan pengelolaan CBP minimal 1 juta ton sepanjang tahun dan stok akhir tahun yang dijaga minimal sebesar 1 juta ton.

Pemerintah juga akan melanjutkan upaya pemenuhan cadangan pangan pemerintah secara umum (CPP) pada 2023. Anggaran yang akan dialokasikan kepada Perum BULOG diperkirakan total sebesar Rp14,7 triliun, dengan rincian yaitu sebesar Rp10,5 triliun untuk pengadaan sebanyak 1,2 juta ton beras, Rp1,47 triliun untuk pengadaan sebanyak 350 ribu ton jagung, dan Rp2,69 triliun untuk pengadaan sebanyak 250 ribu ton kedelai. Sementara itu, total anggaran yang akan diberikan kepada ID Food diperkirakan sebesar

Rp12,17 triliun. Secara keseluruhan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dalam APBN 2023. Untuk pemenuhan CPP yang akan dikelola oleh Perum BULOG, target yang akan dicapai pada 2023 adalah terkait penyempurnaan kajian dan ketentuan pembentukan dan/atau penguatan untuk komoditas beras, jagung dan kedelai. Dalam hal ini, Perum BULOG akan melakukan pemenuhan jumlah cadangan beras, jagung, dan kedelai yang dinilai optimal sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Pada 2023, telah ditetapkan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang akan dikelola sebesar 250 ribu ton dengan stok akhir sejumlah 60 ribu ton dan Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) yang akan dikelola sebesar 300 ribu ton dengan stok akhir sejumlah 75 ribu ton.

#### 4.2.2.3. Pengelolaan Mekanisme Ekspor-Import

Pemerintah akan melanjutkan komitmen optimalisasi pengelolaan mekanisme ekspor-impor pada 2023. Terkait impor, Kementerian Perdagangan terus melakukan penguatan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan komoditas pangan dari negara lain khususnya untuk komoditas yang tidak dapat dipenuhi produksinya dari dalam negeri. Penguatan impor dilakukan melalui perencanaan impor yang lebih baik, dan implementasi impor yang dikoordinasikan secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan

kelancaran proses pemasukan, produksi dan distribusi komoditas yang akan diimpor, yang selanjutnya akan tercermin dari realisasi impor bahan pangan tepat jumlah dan tepat waktu. Untuk komoditas pangan strategis seperti beras, daging, sapi atau kerbau bakalan, gula, dan jagung, keputusan impor dilakukan melalui proses rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait. Selanjutnya, proses pengajuan impor komoditas termasuk perizinannya harus dilakukan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SiNas NK). Ke depan, upaya diversifikasi negara asal impor komoditas pangan, khususnya sapi bakalan ataupun kerbau bakalan, pengadaan impor tidak harus dalam bentuk MoU. Upaya diversifikasi negara asal impor perlu juga memperhatikan harga yang ditawarkan agar diversifikasi negara dapat terealisasi karena harga merupakan faktor yang penting dalam kesepakatan perdagangan. Negara alternatif tanpa diimbangi dengan harga komoditas yang kompetitif akan mempengaruhi preferensi pelaku usaha. Salah satu negara alternatif impor daging sapi yang potensial selain Australia adalah Chile yang saat ini telah memiliki *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Indonesia.

Upaya pemenuhan ketersediaan pasokan melalui impor semakin diperkuat khususnya sebagai langkah antisipatif menjelang masa Hari Raya Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kebutuhan bahan pokok yang akan diimpor dalam rangka persiapan HBKN Ramadan dan Idul Fitri antara lain mencakup gula, daging sapi/kerbau, beras, bawang putih, serta kedelai. Dalam pelaksanaannya, impor gula dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui *holding* pangan BUMN, yaitu ID Food, sementara impor beras dilakukan oleh BULOG. Selain itu, penguatan impor juga dilakukan melalui upaya diversifikasi negara asal impor komoditas pangan strategis. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan akan terus melakukan penjajagan kerja sama impor komoditas pangan strategis dengan sejumlah negara yang akan disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan di impor.

Penguatan pengelolaan ekspor dilakukan antara lain melalui ekspansi dan penetrasi pasar ekspor ke pasar nontradisional, termasuk peningkatan ekspor untuk komoditas yang pasokannya melimpah di domestik.

Dalam rangka ekspansi dan penetrasi ke pasar ekspor nontradisional seperti di Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah, Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan berbagai perundingan kerja sama dengan negara mitra dagang. Khusus daging ayam, Pemerintah terus mendorong ekspor komoditas dimaksud untuk memasok kebutuhan di Singapura sejak 2022. Selain untuk mendorong peningkatan hilirisasi dan ekspor komoditas pertanian, upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi kondisi *oversupply* dan selanjutnya menstabilkan harga daging ayam domestik, khususnya di tingkat produsen.

#### 4.2.2.4. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan petani terus dilakukan secara konsisten untuk mendukung kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, sehingga dapat terus meningkatkan produksi pangan. Dalam kaitan ini, Kementerian Pertanian pada 2023 akan melanjutkan upaya penguatan kelembagaan untuk petani hortikultura, pekebun sawit, serta petani tebu, yang diwujudkan melalui: (i) pembentukan kluster petani hortikultura sebanyak 150 kluster; (ii) mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula sebanyak 15 pabrik; dan (iii) fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit di sebanyak 15 provinsi. Fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit dilakukan untuk melindungi harga TBS pekebun yang melakukan kemitraan dengan Perusahaan/PKS sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 01 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun. Penetapan Harga Pembelian TBS produksi pekebun di tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun 2022 telah di dilaksanakan di 20 provinsi sentra sawit.

Akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga terus dilakukan untuk mendukung produksi. Kementerian Pertanian telah melakukan revisi peraturan PSR, terakhir adalah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Permentan No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Kelapa Sawit dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Salah satu klausul perubahan adalah menghapus salah satu syarat pengajuan usulan PSR sehingga lebih menyederhanakan persyaratan usulan.

Selain itu, dalam regulasi yang baru dibuka jalur baru pengajuan usulan PSR yaitu melalui jalur kemitraan atau melibatkan perusahaan mitra, dimana usulan dapat langsung ditujukan ke Ditjen Perkebunan dari tingkat pengusul.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan dari aspek pembiayaan perdagangan dan perlindungan usaha agar dapat memastikan keberlanjutan usaha serta mendorong kesejahteraan petani. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan cara: (i) optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) dengan target peningkatan transaksi SRG, khususnya untuk komoditas penting, yaitu gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, ayam karkas beku, ikan, dan gula, sebesar 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya; (ii) optimalisasi pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dengan target peningkatan transaksi PLK sebesar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya; serta (iii) peningkatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha, yang antara lain tercermin dari peningkatan indeks aksesibilitas menjadi sebesar 67,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Khusus integrasi SRG dan PLK, penerapannya akan terus diperkuat agar dapat mendorong akses pasar dan menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan.

### 4.2.3. Kelancaran Distribusi

#### 4.2.3.1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah akan terus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi antar pemangku kebijakan. Penguatan KAD akan dilakukan melalui perluasan cakupan komoditas pangan strategis sesuai kondisi inflasi dan karakteristik masing-masing daerah, mendorong penguatan peran kelembagaan (a.l BUMD pangan) sebagai pelaku KAD, serta meningkatkan inovasi dan digitalisasi guna memperkuat efisiensi KAD. Lebih lanjut, peningkatan peran pemangku kebijakan di masing-masing daerah dalam mengidentifikasi komoditas dan wilayah yang mengalami surplus dan defisit, serta menjadi fasilitator dalam memperluas KAD juga akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencapai target KAD 2023 yakni kenaikan 10% jumlah KAD, dan/atau penambahan jenis komoditas, dan/atau volume transaksi setiap tahun.

Upaya mendorong kelancaran distribusi di daerah sekaligus menjaga keterjangkauan harga terus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi antar Kementerian, Lembaga, dan pihak terkait dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan Melalui Distribusi Antarwilayah dan Basar/Gelar/Gerakan Pangan Murah. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional pada 2023 akan melanjutkan kegiatan fasilitasi distribusi pangan di 34 provinsi bersama dengan poktan/gapoktan/distributor/asosiasi dan para pelaku usaha pangan lainnya, dengan target peningkatan volume penjualan sebanyak 500 ton dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Bank Indonesia melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian maupun Lembaga terkait juga turut mendukung optimalisasi program fasilitasi distribusi pangan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup di antaranya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan Program Mobilisasi Pangan oleh Badan Pangan Nasional.

#### 4.2.3.2. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Perbatasan (3TP) masih menjadi salah satu fokus kebijakan Pemerintah dalam mendukung kelancaran distribusi. Secara keseluruhan, program kerja terkait konektivitas oleh Kementerian Perhubungan pada 2023 masih difokuskan pada program subsidi jembatan udara dan tol laut terutama untuk mendukung kelancaran logistik bahan pangan, khususnya ke daerah Kawasan Indonesia Timur (KIT) maupun 3TP. Target subsidi jembatan udara yang akan dicapai berupa 41 subsidi rute yaitu 40 perintis kargo, dan 1 subsidi kargo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp91 miliar, turun dibandingkan Rp92 miliar pada tahun sebelumnya. Wilayah penyelenggaraan dan rute subsidi jembatan udara (rute pulang-pergi) masih sama dibandingkan 2022, yaitu mencakup wilayah Tarakan, Masamba, Timika, Tanah Merah, Dekai, dan Oksibil. Sementara itu, target subsidi tol laut yang akan dicapai berupa penyelenggaraan 39 trayek tol laut, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp711,4 juta miliar. Wilayah penyelenggaraan tol laut tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia, dengan total sebanyak 115 pelabuhan singgah.

Komitmen peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas juga masih difokuskan pada jalur darat, sebagaimana dilakukan oleh Kementerian PUPR. Selain mudah dijangkau melalui jalur laut dan udara, infrastruktur jalan terutama di daerah 3TP juga harus terhubung dan memiliki kemantapan yang memadai guna mendukung terselenggaranya kegiatan logistik ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta mengurangi biaya logistik dan disparitas harga bahan pangan pokok. Pada 2023, Kementerian PUPR akan berupaya menyediakan tingkat mantap jalan nasional mencapai sebesar 93,57% yang akan dicapai melalui pemeliharaan rutin jembatan, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, serta pemeliharaan rutin dan preservasi jembatan melalui program pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol, jalan non-tol, jembatan dan *flyover/underpass*. Terdapat *backlog* anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan 2023, sehingga diprediksi kemantapan jalan tidak memenuhi target di tahun 2023 yang sebesar 93.57%.

Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir akan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, memperlancar distribusi bahan pangan, dan meningkatkan akses petani terhadap masyarakat. Pandemi Covid-19 mulai berakhir, namun perubahan perilaku konsumen yang telah terbiasa membeli bahan pangan secara *online* melalui *platform e-commerce* diperkirakan masih terus berlanjut. Oleh karena itu, Bank Indonesia pada 2023 akan terus melakukan penguatan digitalisasi UMKM di sisi hilir untuk memberikan fasilitas UMKM pangan dengan *platform e-commerce* nasional maupun daerah dengan target sebanyak 20% dari jumlah UMKM pangan binaan dan mitra BI.

#### 4.2.4. Komunikasi Efektif

##### 4.2.4.1. Perbaikan Kualitas Data

Penyediaan sistem informasi data pangan yang teintegrasi akan terus diperkuat pada 2023. Perbaikan kualitas data harga pangan pada PIHPS Nasional terus berlanjut melalui penguatan aplikasi yang digunakan dalam proses survei, baik yang berbasis *mobile* maupun web. Cakupan survei PIHPS Nasional juga diperluas ke beberapa kota/kabupaten untuk mengakomodir penambahan kabupaten/kota pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Faktor keamanan data PIHPS Nasional juga diperkuat dengan migrasi

PIHPS ke dalam server internal Bank Indonesia dan pemindahan publikasi data harga pangan melalui situs resmi Bank Indonesia efektif per 1 Juli 2023. Selain itu, evaluasi terhadap hasil survei harga PIHPS Nasional juga dilakukan secara rutin melalui pendekatan statistik dengan perhitungan korelasi antara perubahan data harga PIHPS dengan data inflasi BPS yang dijaga sebesar 0,8. Penguatan penyediaan pangan yang terintegrasi juga dilakukan melalui aplikasi panel harga pangan strategis di 34 provinsi maupun data nasional, termasuk penyediaan data harga harian 20 barang kebutuhan pokok di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) oleh Kementerian Perdagangan. Data SP2KP tersebut telah menjadi sumber perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihitung oleh BPS sebagai *proxy* inflasi dan digunakan sebagai evaluasi dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara mingguan.

##### 4.2.4.2. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

Evaluasi atas penilaian kinerja TPID pada 2021 menunjukkan perlunya konsistensi dalam upaya peningkatan keandalan TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Beberapa hasil evaluasi (*lessons learned*) dari evaluasi tersebut mencakup: (i) kebutuhan inovasi program dan kebijakan pengendalian inflasi di daerah mendukung pencapaian inflasi nasional; (ii) pentingnya peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di wilayahnya sangat strategis dalam mendukung pencapaian inflasi provinsi maupun nasional; (iii) kebutuhan peningkatan kapasitas SDM TPID agar dapat menciptakan program dan kebijakan yang inovatif dan strategis; serta (iv) adanya tantangan dalam hal tingkat partisipasi maupun keandalan TPID khususnya non-IHK di daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Oleh karena itu, Pemerintah antara lain melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk melanjutkan program pembinaan TPID. Pada 2023, target dari program pembinaan TPID dimaksud mencakup tingkat keandalan TPID IHK yang sebesar 80-90 (median) dan tingkat keandalan TPID non-IHK yang sebesar 40-50 (median).

#### 4.2.4.3. Pengendalian Ekspektasi Inflasi

Pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat masih menjadi salah satu fokus utama upaya penguatan pengendalian inflasi nasional. Oleh karena itu, Kementerian dan Lembaga terkait akan memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan melanjutkan pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi, didukung komunikasi kebijakan yang rutin dan terpercaya. Upaya komunikasi tersebut akan mencakup *press release* dan konferensi pers atas pelaksanaan RDG setiap bulan, maupun bentuk inovasi komunikasi lainnya melalui berbagai jalur komunikasi serta media. Dengan adanya implementasi bauran kebijakan dan komunikasinya tersebut, ekspektasi inflasi masyarakat yang tercermin dari angka proyeksi inflasi IHK oleh *Consensus Forecast* pada 2023 ditargetkan dapat menurun dari 2022, serta terjaga di kisaran sasaran inflasi sebesar  $3,0 \pm 1\%$ .

#### 4.2.4.4. Pembahasan Usulan Sasaran Inflasi 2025-2027

Sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang akan dicapai oleh Bank Indonesia, yang penetapannya dikoordinasikan bersama oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Sasaran inflasi sangat penting untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan dan akan menentukan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, usulan sasaran inflasi dibahas bersama dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga dalam TPIP yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah untuk kurun waktu tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sasaran inflasi untuk 2022, 2023, dan 2024 telah ditetapkan melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing sebesar  $\pm 1\%$ . Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan pada 2023 akan menyusun usulan sasaran inflasi untuk tiga tahun mendatang, yaitu 2025, 2026, dan 2027. Koordinasi penyusunan usulan sasaran inflasi akan terus dilakukan yang selanjutnya akan disampaikan pada *High Level Meeting* TPIP untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sasaran inflasi 2025-2027 akan diarahkan untuk terus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sasaran inflasi perlu mencerminkan kondisi pasar yang semakin efisien dan mampu mendukung perkembangan dunia usaha yang optimal. Mempertimbangkan hal tersebut, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun usulan sasaran inflasi diantaranya ialah perkembangan aktivitas ekonomi secara umum, upaya-upaya pengendalian inflasi pangan, serta perkembangan kebijakan di sektor moneter. Sasaran inflasi yang diusulkan diharapkan dapat menciptakan jangkar yang kuat bagi ekspektasi inflasi guna memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.



## Daftar Istilah

Istilah	Arti
<i>Administered Prices</i>	Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur oleh Pemerintah
<i>Affordability</i>	Keterjangkauan
<i>Automatic Adjustment</i>	Langkah untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak menentu di tahun ini
<i>Bankable</i>	Individu yang cukup umur dan memenuhi persyaratan untuk mengakses produk-produk keuangan yang disediakan oleh perbankan
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik dengan bersyarat maupun tidak bersyarat terutama untuk masyarakat prasejahtera
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial
BI7DRR	Suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru menggantikan BI <i>rate</i>
<i>Best Practice</i>	Metode yang telah diterima secara umum lebih unggul
<i>Capacity Building</i>	Proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik
<i>Closed Loop</i>	Model kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital
<i>Consensus Forecast</i>	Prediksi masa depan yang disusun dengan menggabungkan beberapa perkiraan yang dilakukan oleh berbagai pengamat/ekonom secara terpisah
Covid-19	Virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan tahun 2019
Daging Ruminansia	Daging sapi dan kerbau yang berasal dari hewan ternak pemamah biak

Istilah	Arti
<i>Demonstration Farming (Demfarm) Padi</i>	Metode percontohan yang dilaksanakan oleh kelompok tani padi
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital
Disagregasi Inflasi	Pengelompokan inflasi untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental
Disparitas Inflasi	Perbedaan besaran inflasi yang bisa terjadi antarwilayah di suatu negara
<i>Domestic Market Obligation</i>	Kewajiban suatu badan usaha untuk menyerahkan komoditas atau produk dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan komoditas atau produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam suatu kontrak kerja sama
<i>Domestic Non Deliverable Forward</i>	Transaksi derivatif standar ( <i>plain vanilla</i> ) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme fixing dan mata uang penyelesaiannya dalam rupiah
<i>Domestic Price Obligation</i>	Kewajiban suatu badan usaha untuk menggunakan harga penjualan komoditas atau produk dari bagiannya di dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam suatu kontrak kerja sama
<i>E-commerce</i>	Transaksi perdagangan secara <i>online</i> atau menggunakan teknologi internet
<i>Refocusing Anggaran</i>	Memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran
<i>Energy Transition Mechanism</i>	Sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi
Ekonomi Digital	Ekonomi yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
Ekspektasi Inflasi	Faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain
<i>End-to-end</i>	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif
<i>Food Estate</i>	Konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan
<i>Forward Looking</i>	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter

Istilah	Arti
<i>Free Trade Agreement</i>	Perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya
<i>Front Loaded</i>	Respons dari BI dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang lebih besar di awal
<i>Fuel Surcharge</i>	Biaya yang terjadi saat terdapat kenaikan harga avtur
Giro	Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan
Giro Wajib Minimum	Dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia
<i>Google mobility Index</i>	Pelaporan aktivitas warga dari waktu ke waktu berdasarkan kategori tujuan
<i>Global Food Security Index</i>	Indeks yang mengukur aspek keterjangkauan pangan, ketersediaan, kualitas, keamanan, dan sumber daya/ketahanan alam di 113 negara
<i>Green House</i>	Bangunan untuk budidaya tanaman, yang memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya
<i>Hazton</i>	Teknik menanam padi untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan 20 hingga 30 bibit per lubang tanam dan dapat meningkatkan produksi tanaman padi
<i>Hedging</i>	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko
IHK	Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri
<i>Imported Inflation</i>	Inflasi barang impor atau yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri
Inflasi Inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi
Inklusi ekonomi-keuangan	Perluasan akses pasar keuangan dan pasar barang yang berkesinambungan
Inklusi ekonomi-keuangan hijau	Perluasan akses pasar keuangan dan pasar barang yang berkesinambungan yang mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik
<i>Inward Looking</i>	Kegiatan ekonomi yang melakukan industrialisasi dan substitusi barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

Istilah	Arti
IOD	Perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah yaitu di Laut Arab (Samudera Hindia bagian barat) dan Samudera Hindia bagian timur di Selatan Indonesia
Jarwo (Jajar Legowo)	Rekayasa teknik tanam dengan mengatur jarak tanam antar rumpun dan antar barisan sehingga terjadi pemadatan rumpun padi dalam barisan dan melebar jarak antar barisan
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM
Konsep Hub dan Spoke	Sebuah pola jaringan yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan pengumpul
La Nina	Fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan
<i>Market place</i>	Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik (dalam <i>e-commerce</i> )
<i>Market Share</i>	Besarnya bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan
<i>Memorandum of Understanding</i>	Nota kesepakatan, nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama
<i>Modern Rice Milling Plant</i>	Fasilitas pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi modern yang terdiri dari dryer sebagai pengering gabah hasil panen dan RMU sebagai mesin konversi gabah menjadi beras
Nontunai	Metode pembayaran selain dengan menggunakan uang tunai, yakni melalui uang elektronik, mobile banking, ataupun internet banking
<i>Offline</i>	Luring atau luar jaringan, yaitu tidak terhubung atau terkoneksi dengan internet
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
<i>Output Gap</i>	Selisih antara output aktual dengan output potensial
Pandemi	Wabah penyakit yang tersebar luas di beberapa benua atau bahkan di seluruh negara
<i>Passenger Service Charge</i>	Tarif yang dikenakan pada penumpang pesawat udara untuk layanan tertentu di bandar udara
<i>People Centered Development</i>	Pembangunan yang menitik beratkan pada manusia

Istilah	Arti
<i>Perishable</i>	Tidak tahan lama atau mudah rusak
<i>Pre-emptive</i>	Respons cepat untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi di depan
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi
<i>Public Service Obligation</i>	Subsidi pelayanan publik kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang
Resiliensi	Mampu beradaptasi dan tetap kuat meski dalam situasi sulit
Salibu	Teknologi budidaya ratun yang artinya tunggu setelah panen tanaman utama dengan tinggi kurang lebih 25 cm, dipelihara 7 sampai 10 hari atau dibiarkan sampai keluar tunas baru. Keuntungan dari teknik budidaya ini yaitu hemat tenaga kerja, waktu, dan biaya
<i>Seat Load Factor</i>	Perbandingan antara <i>seat</i> yang terjual dengan kapasitas <i>seat</i> yang tersedia dari suatu rute pesawat
<i>Scarring effect</i>	Dampak memar pada perekonomian dan lebih bersifat struktural
<i>Shock Absorber</i>	Langkah kebijakan, koordinasi, atau kerja sama sebagai penahan kejutan dalam mengurangi dampak akibat adanya guncangan/gejolak
Siklus Ekonomi	Fluktuasi aktivitas ekonomi dari tren pertumbuhan jangka panjangnya
Sistem Resi Gudang	Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang
<i>Sister City</i>	Bentuk konsep kerjasama dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik
<i>Smart Farming</i>	Sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas
<i>Smart irrigation</i>	Alat irigasi pintar yang memiliki dua buah sensor untuk membantu para petani, di antaranya adalah sensor kelembapan tanah dan sensor ketinggian air
<i>Soil Block</i>	Alat untuk membantu persemaian tanpa plastik, sehingga ramah lingkungan
<i>Stress Test</i>	Uji Ketahanan
Tata Niaga	Produsen selaku pihak yang memproduksi barang/jasa mampu mengenalkan, menyalurkan, dan mendistribusikan barang/jasanya kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati

Istilah	Arti
Subsidi	Transfer dana dari Pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah
Stakeholder	Seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan
Stunting	Masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak
Trade Repository	Repositori perdagangan mengumpulkan dan menyimpan catatan perdagangan derivatif, dengan tujuan membantu regulator memantau peningkatan risiko sistemik
Transformasi Ekonomi	Proses berkelanjutan yang ditujukan untuk mengarahkan perekonomian menuju sektor-sektor yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi ataupun untuk meningkatkan produktivitas di suatu sektor
Transformasi Kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi
Triple Intervention	Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, penyediaan likuiditas valas terkait instrumen lindung nilai melalui DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder guna menjaga kecukupan likuiditas Rupiah
True Shallot Seed	Bawang merah yang berasal dari biji
Turnover	Perputaran persediaan
Twist Operation	Kebijakan Bank Indonesia melalui pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder, melalui penjualan SBN tenor jangka pendek dan pembelian SBN tenor jangka panjang untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka pendek dan mendorong struktur <i>yield</i> SBN jangka panjang lebih landai
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu
Upside Risks	Risiko yang dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi
Volatile Food	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional
Yoy	Pertumbuhan dari tahun ke tahun

## Daftar Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
3TP	Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
AP	<i>Administered Prices</i>
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
AUTSK	Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau
BBRT	Bahan Bakar Rumah Tangga
BKP	Badan Ketahanan Pangan
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BSU	Bantuan Subsidi Upah
BTT	Belanja Tidak Terduga
BUK	Bank Umum Konvensional
BUS	Bank Umum Syariah
CBP	Cadangan Beras Pemerintah
CDC	<i>Corn Drying Centre</i>
CF	<i>Consensus Forecast</i>
CJP	Cadangan Jagung Pemerintah
CKP	Cadangan Kedelai Pemerintah
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah
DAK	Dana Alokasi Khusus
Demplot	<i>Demonstration plot</i>
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DID	Dana Insentif Daerah
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DNDF	<i>Domestic Non-deliverable Forward</i>
DTU	Dana Transfer Umum
EBT	Energi Baru Terbarukan

Singkatan	Kepanjangan
ETM	<i>Energy Transition Mechanism</i>
EWS	<i>Early Warning System</i>
FDP	Fasilitasi Distribusi Pangan
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
Gakoptindo	Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia
GAP	<i>Good Agricultural Practice</i>
GHP	<i>Good Handling Practices</i>
GKG	Gabah Kering Giling
GKP	Gabah Kering Panen
GKP	Gudang Komoditas Pangan
GM	Gudang Modern
GWM	Giro Wajib Minimum
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
HAP	Harga Acuan Pembelian
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
HET	Harga Eceran Tertinggi
HLM	<i>High Level Meeting</i>
HPP	Harga Pembelian Pemerintah
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IHIM	Indeks Harga Barang Impor
IOD	<i>Indian Ocean Dipole</i>
IOT	<i>Internet of Things</i>
IPH	Indeks Perkembangan Harga
IPN	<i>Integrated Port Network</i>
JKP	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
KAD	Kerjasama Antar Daerah

Singkatan	Kepanjangan	Singkatan	Kepanjangan
KEP	Kelembagaan Ekonomi Petani	PSR	Peremajaan Sawit Rakyat
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Rakornas	Rapat Koordinasi Nasional
KPSH	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga	RPHU	Rumah Potong Hewan Unggas
KSP	Kawasan Sentra Produksi Pangan	RTR	<i>Rice To Rice</i>
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan	SAHAJA	Salibu-Hazton-Jarwo
KUR	Kredit Usaha Rakyat	Saprodi	Sarana produksi
MPP	Mitra Pangan Pengadaan	SBH	Survei Biaya Hidup
MRMP	<i>Modern Rice Milling Plant</i>	SBN	Surat Berharga Negara
NLE	<i>National Logistic Ecosystem</i>	SDA	Sumber Daya Air
OP	Operasi Pasar	Sinas NK	Sistem Nasional Neraca Komoditas
OPIP	Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman	SISMONTAVAR	Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
P3DN	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	SDA	Sumber Daya Alam
P3TGAI	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi	SDA	Sumber Daya Air
PDB	Produk Domestik Bruto	Sinas NK	Sistem Nasional Neraca Komoditas
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional	SISMONTAVAR	Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
Perbadan	Peraturan Badan Pangan Nasional	SOA	Subsidi Ongkos Angkut
Perlinsos	Perlindungan Sosial	SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok
PHJD	Program Hibah Jalan Daerah	SRG	Sistem Resi Gudang
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	STA	Sub Terminal Agribisnis
PINA	Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah	Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
PJP4U	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara	TBA	Tarif Batas Atas
PJPB	Pengadaan Jangka Panjang Bertarget	TBB	Tarif Batas Bawah
PKT	Padat Karya Tunai	TMT	Toko Mitra Tani
PLK	Pasar Lelang Komoditas	TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
PMK	Penyakit Mulut dan Kuku	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
PMN	Penyertaan Modal Negara	TSS	<i>True Shallot Seed</i>
PMT	Pasar Mitra Tani	TTIC	Toko Tani Indonesia Center
PSO	<i>Public Service Obligation</i>	TTI	Toko Tani Indonesia
		UUS	Unit Usaha Syariah
		VF	<i>Volatile Food</i>
		Yoy	<i>Year on year</i>

## Tim Penyusun

Pengarah	:	Ferry Irawan, Firman Mochtar, Febrio N. Kacaribu, Restuardy Daud
Editor	:	Abdul Majid Ikram, Gunawan Pribadi
Koordinator Penyusun	:	Alexander Lubis, Sri Purwanti, Raditya Harya Pamungkas
Penulis	:	Ratih Puspitasari, Filza Amalia, Adi Nurahmat, Gilang Andrianty, Neva Andina, Tri Kurnia Ayu S., M. Yafi Satryatama, Muhammad Arifian Adin, Johan Muhamad Alwi, Aan Cahya Noviadh, Yurian Yudianto, Berthariana, Nourma Rasyidah, Hilda Choirunnisah, Tri Achya Ngasuko
Kontributor	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Asisten Deputi Pangan</li> <li>- Bank Indonesia Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter</li> <li>- Kementerian Keuangan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro</li> <li>- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah</li> <li>- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter</li> <li>- Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>- Kementerian pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian</li> <li>- Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</li> <li>- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa Direktorat Bendungan dan Danau Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol</li> <li>- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk</li> <li>- Badan Pangan Nasional Direktorat Ketersediaan Pangan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li> <li>- Perum BULOG Direktorat Supply Chain dan Pelayanan Publik</li> <li>- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Bioenergi</li> </ul>